

**DETERMINAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP GOOD GOVERNANCE  
( STUDI PADA DESA DI KABUPATEN LANGKAT )**

**TESIS**

Oleh :

**RIZKY RIDHANI SIRAIT**

**NPM. 1820050049**



**POGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI  
PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**

**PENGESAHAN TESIS**

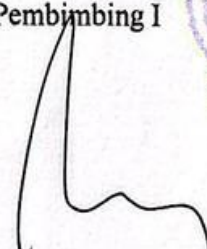
Nama : **RIZKY RIDHANI SIRAIT**  
Nomor Pokok Mahasiswa : **1820050049**  
Prodi/Konsentrasi : **Magister Akuntansi/Akuntansi Sektor Publik**  
Judul Tesis : **DETERMINAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GOOD GOVERNANCE ( STUDI PADA DESA DI KABUPATEN LANGKAT )**

Pengesahan Tesis  
Medan, 14 Oktober 2021

**Komisi Pembimbing**

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Assoc. Prof. Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., Ak., M.Si., CA.

  
Dr. WIDIA ASTUTY, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA., CPA.

**UMSU**  
Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi

  
Dr. SYAIFUL BAHRI, M.AP.

  
Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak., CA.

Unggul | Cerdas | Terpercaya



**PENGESAHAN**  
**DETERMINAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA**  
**DAN IMPLIKASINYA TERHADAP GOOD GOVERNANCE**  
**( STUDI PADA DESA DI KABUPATEN LANGKAT )**

**RIZKY RIDHANI SIRAIT**  
**NPM. 1820050049**

Program Studi : Magister Akuntansi

Tesis Ini Telah Dipertahankan Dihadapan Komisi Penguji Yang dibentuk oleh Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Dinyatakan Lulus Dalam Ujian Tesis dan Berhak Menyandang Gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) Pada Hari Kamis, Tanggal 14 Oktober 2021



Komisi Penguji

1. **Dr. IRFAN, S.E., M.M**

Ketua

1.....

2. **Dr. EKA NURMALA SARI, S.E., M.Si., Ak. CA.**

Sekretaris

2.....

3. **Dr. ZULIA HANUM, S.E., M.Si.**

Anggota

3.....

**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## **Lembar Tidak Melakukan Plagiat dan Memalsukan Data**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Rizky Ridhani Sirait  
NPM : 1820050049  
Program Studi : Magister Akuntansi  
Judul Tesis : Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa  
Dan Implikasinya Terhadap Good Governance  
( Studi Pada Desa Di Kabupaten Langkat )

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Benar tesis saya adalah karya sendiri, bukan dikerjakan orang lain
2. Saya tidak melakukan plagiat dalam penulisan tesis saya
3. Saya tidak merubah dan memalsukan data penelitian saya

Jika ternyata dikemudian hari saya terbukti telah melakukan salah satu hal tersebut diatas, maka saya bersedia dikenai sanksi yang berlaku berupa pencopotan gelar saya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Medan, 14 Oktober 2021  
Saya yang membuat Pernyataan,

  
**RIZKY RIDHANI SIRAIT**  
**1820050049**

**DETERMINAN KUALITAS PELAPORAN KEUANGAN DESA DAN  
IMPLIKASINYA TERHADAP GOOD GOVERNANCE  
( STUDI PADA DESA DI KABUPATEN LANGKAT )**

**RIZKY RIDHANI SIRAIT  
NPM. 1820050049**

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kualitas pelaporan keuangan serta implikasinya terhadap good governance pada pemerintahan desa di daerah kabupaten langkat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah menggunakan pendekatan asosiatif. Populasi dalam penelitian adalah seluruh desa yang terdapat di wilayah pemerintahan Kabupaten Langkat. Responden yang digunakan adalah aparatur pemerintahan desa yang dipilih secara acak di beberapa desa di Kabupaten Langkat. Penelitian ini terdiri dari variabel independent kualitas sumber daya manusia, teknologi dan informasi, system pengendalian intern, dan komitmen organisasi dengan variable dependen good governance serta variable intervening kualitas pelaporan keuangan. Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif, Analisa *Structural Equation Modeling* (SEM) berbasis *variance (Partial Least Square)*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; (1) terdapat pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap good governace. (2) terdapat pengaruh teknologi informasi terhadap good governance; (3) terdapat pengaruh system informasi terhadap good governance, (4) terdapat pengaruhi komitmen organisasi terhadap good governance, (5) terdapat pengaruh kualitas pelaporan keuangan terhadap good governance, (6) terdapat pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap kualitas pelaporan keuangan, (7) terdapat pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan,(8) terdapat pengaruh system pengendalian intern terhadap kualitas pelaporan keuangan, (9) terdapat pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas pelaporan keuangan,(10) kualitas pelaporan keuangan dapat memediasi pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap good governance (11) kualitas pelaporan keuangan dapat memediasi pengaruh teknologi informasi terhadap good governance (12) kualitas pelaporan keuangan dapat memediasi pengaruh system pengendalian intern terhadap good governance (13) kualitas pelaporan keuanga dapat memediasi komitmen organisasi terhadap good governance.

**Kata Kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, Teknologi Informasi, Sistem Pengendalian Intern, Komitmen Organisasi, Kualitas Pelaporan Keuangan, Good Governance**

**DETERMINANTS OF THE QUALITY OF VILLAGE FINANCIAL  
REPORTING AND IS IMPLICATION FOR GOOD GOVERNANCE  
( IN VILLAGE IN LANGKAT DISTRICT )**

**RIZKY RIDHANI SIRAIT  
NPM. 1820050049**

**ABSTRACT**

The research is aim to know the determinants of the quality of financial reporting and its implication s for good governance in village government to the Langkat district. This type of research concludted is using and associative approach. The population in this research is a villages in Langkat district government area. The respondents used were village government officials who were randomly selected in several villages in Langkat district / regency. The research consists of the independence variabel of the quality of human resource technology and information internal control system and organizational commitment with the the dependent variable of Good governance and the intervention variable of financial reporting quality. The data analysis technique used in the research in descriptive analysis, structural analysis of equation modeling (SEM) based on variance ( Partial least square). The result showed that: (1) there is an influence of the quality of human research on good governance. (2) there is an influence of information, technology on good governance. (3) there is an influence of information system on good governance. (4) there is an effect of organizational commitment on good governance. (5) there is an influence of the quality of financial reporting on good governance. (6) there is an influence of human resource competence on the quality of financial reporting. (7) there is an influence of information technology on the quality of financial reporting. (8) there is an influence of internal control system of the quality of financial reporting. (9) there is an influence of organizational commitment on the quality of financial reporting. (10) quality of financial reporting can mediated the influence of human resource competence on good governance. (11) quality of financial reporting can mediated the effect of information technology on good governance. (12) the quality of financial reporting of the internal control system on good governance. (13) the quality of financial reporting can mediated organizational commitment to good governance.

**Kata Kunci : Competence of human resources, Information Technology, Internal Control System, Organizational Commitment, Financial Reporting Quality, Good Governance**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmad dan karuniaNya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis dengan judul **Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Dan Implikasinya Terhadap Good Governance (Studi Pada Desa Di Kabupaten Langkat)**. Penyusunan tesis ini adalah untuk memenuhi salah satu persyaratan kelulusan pada Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Program Pasca Sarjana Jurusan Magister Akuntansi.

Penyusunan tesis ini dapat terlaksana tidak terlepas dari dukungan dari berbagai pihak khususnya kepada kedua orang tua saya Bapak Drs, Samsuddin Sirait (Alm) dan Ibu Supriyati S.Pd serta Abang Bayu Wijaya Sirait, Adik Syifa Annisa Sirait beserta Ipar Risa Marsely S.E yang mana telah banyak memberikan dukungan dan do'a sehingga langkah saya di berkahi dan di rahmati Tuhan Yang Maha Esa. Terlepas dari pada itu, terdapat juga pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam penulisan tesis ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Agussani M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Syaiful Bahri, M.AP. Direktur Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Maya Sari., Ak., M.Si selaku Dosen pembimbing I dan Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA selaku Dosen pembimbing II untuk kesempurnaan tesis saya ini.

Kepada mereka semua, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar - besarnya. Semoga amal baik mereka di terima dan di lipat gandakan oleh Tuhan Yang maha Esa. Jauh dari pada itu penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini kurang mendekati kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mengharapkan sumbangsi dari para pembaca berupa kritik dan saran yang membangun guna tercapainya penyusunan tesis yang lebih baik lagi.

Penulis

Rizky Ridhani Sirait



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	viii
BAB 1 .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	13
1.3 Rumusan Masalah .....	13
1.4 Tujuan Penelitian .....	14
1.5 Manfaat Penelitian .....	15
BAB II.....	18
LANDASAN TEORI.....	18
2.1 Good Governance.....	18
2.1.1    Pengertian Good Governace .....	18
2.1.2    Manfaat Good Governance .....	20
2.1.3    Tujuan Good Governance .....	21
2.1.4    Prinsip-Prinsip Good Governace .....	22
2.1.5    Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance .....	29
2.2 Kualitas Pelaporan Keuangan .....	31
2.2.1    Pengertian Laporan Keuangan .....	31
2.2.2    Komponen Laporan Keuangan .....	33
2.2.3    Kualitas Pelaporan Keuangan .....	34
2.2.4    Tujuan Pelapoaran keuangan .....	35
2.2.5    Indikator Kualitas Pelaporan Keuangan.....	36
2.2.6    Faktor – Faktor Kualitas Pelaporan Keuangan .....	42

2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	43
2.3.2    Jenis-Jenis Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	45
2.3.3    Manfaat Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	48
2.3.4    Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia .....	49
2.4 Teknologi Informasi.....	52
2.4.1    Defenisi Teknologi Informasi .....	52
2.4.2    Tujuan dan Fungsi Teknologi Informsi.....	53
2.4.3    Indikator Teknologi informasi .....	54
2.5 Sistem Pengendalian Intern.....	56
2.5.1    Pengertian Sistem Pengendalian Intern.....	56
2.5.2    Tujuan Sistem Pengendalian Intern .....	58
2.5.3    Indikator Sitem Pengendalian Intern.....	60
2.6 Komitmen Organisasi.....	64
2.4.1    Pengertian Komitmen Organisasi .....	64
2.4.2    Dimensi Komitmen Organisasi .....	65
2.4.4    Indikator Komitmen Organisasi.....	67
2.7 Penelitian terdahulu.....	71
2.7 Kerangka Konsep .....	75
2.7.1    Keterkaitan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Good Governance .....	75
2.7.2    Keterkaitan Teknologi Informasi Terhadap Good Governance.....	76
2.7.3    Keterkaitan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Good Governance	77
2.7.4    Keterkaitan Komitmen Organisasi Terhadap Good Governance....	78
2.7.5    Keterkaitan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Good Governance .....	78
2.7.6    Keterkaitan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Pelaporan Keuangan.....	80

2.7.7	Keterkaitan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.....	81
2.7.9	Keterkaitan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.....	84
2.8	Hipotesis.....	85
BAB III .....		87
METODE PENELITIAN.....		87
3.1	Pendekatan Penelitian .....	87
3.2	Definisi Operasional.....	88
3.2.1	Good Governance.....	88
3.2.2	Kualitas Pelaporan Keuangan .....	89
3.2.3	Kompetensi Sumber Daya Manusia.....	89
3.2.4	Teknologi Informasi.....	90
3.2.5	Sistem Pengendalian Intern.....	91
3.2.6	Komitmen Organisasi.....	92
3.3	Tempat dan Waktu Penelitian .....	95
3.4	Populasi dan Sampel .....	96
3.5	Teknik Pengumpulan Data.....	98
3.6	Teknik Analisis Data.....	102
3.6.1	Analisis model pengukuran ( <i>Outer Model</i> ) .....	102
3.6.2	Analisis Model Struktural ( <i>Inner Model</i> ).....	103
BAB IV .....		106
HASIL DAN PEMBAHASAN.....		106
4.1	Hasil .....	106
4.1.1	Gambaran Umum Penelitian.....	106
4.1.2	Deskripsi Data.....	106
4.1.2	Hasil Analisis Data.....	117

5.2 Pembahasan.....	133
5.2.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Good Governance .....	135
5.2.2 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Good Governance .....	137
5.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian intern Terhadap Good Governance	139
5.2.4 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Good Governance .....	141
5.2.5 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Good Governance	144
5.2.6 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan .....	145
5.2.7 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	148
5.2.8 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	149
5.2.9 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan.....	151
5.2.10 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Good Governance yang di mediasi Kualitas Laporan Keuangan .....	153
5.2.11 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Good Governance yang dimediasi Kualitas Laporan Keuangan .....	154
5.2.12 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Good Governance yang di mediasi Kualitas Laporan Keuangan.....	154
5.2.13 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Good Governance yang di mediasi Kualitas Laporan Keuangan .....	155
BAB V.....	157
KESIMPULAN.....	157
5.1 Kesimpulan .....	157
5.2 Saran.....	158
DAFTAR PUSTAKA .....	159

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Good Governance merupakan wujud dari suatu penerimaan akan pentingnya pengaturan dan tata kelola yang baik terhadap hubungan dan fungsi serta kepentingan berbagai pihak dalam urusan bisnis maupun pelayanan publik. Hal ini menekankan pada segenap pemerintahan untuk menyediakan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja sektor publik untuk memberikan pertanggungjawaban akan segala aktivitas kepada semua pihak yang berkepentingan didalamnya. Sejalan dengan ini penyelenggaraan prinsip Good Governance di Indonesia telah di atur dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Good Governance menurut (Agus, 2010) “merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan peran pemangku kepentingan. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Defenisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak faktor lain. Pesan pertama dari terminology governance membantah pemahaman formal tentang berkerjanya institusi-institusi negara. Governance mengakui bahwa didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja pada tingkat yang berbeda (Winarno, 2002).

Menurut (Kooiman, 2003) governance adalah aktifitas interaksi sosial politik antara penguasa dengan masyarakat luas yang berhubungan mengenai berbagai bidang keperluan masyarakat dan menuntut pemerintah atas keperluan-keperluan tersebut. (Ihyaul & Sofyani, 2016) juga mengungkapkan mengungkapkan bahwa good governan mencakup seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial. Good governance juga sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Pemerintahan yang baik secara konseptual, mempunyai pengertian bahwa kata baik atau Good dalam istilah pemerintahan yang baik yang memiliki makna bahwa Good Governance telah mengandung dua pemahaman : pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2009).

Good governance juga merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and service disebut governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance (pemerintahan yang baik). Sejalan dengan hal tersebut governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik (Sedarmayanti, 2012).

Konsep pemerintahan yang baik (*Good Governance*) muncul karena adanya ketidakpuasan dari keinginan atau kehendak rakyat dalam persoalan pelayanan yang berorientasi pada kinerja pemerintahan yang selama ini dipercayasebagai penyelenggara urusan publik. Mengenai *Good Governance* sebagian besar publik



membayangkan bahwa dengan memiliki praktik Good Governance maka kualitas pelayanan publik menjadi semakin baik, angka korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) menjadi semakin rendah, masalah penegakan hukum berjalan dengan lancar, dan pemerintah semakin peduli dengan kepentingan masyarakat.

Penerapan prinsip-prinsip Good Governance sangat penting dalam pelaksanaan pelayanan publik untuk meningkatkan kinerja aparatur pelayanan publik. Dengan demikian pemerintah merancang konsep prinsip-prinsip Good Governance untuk meningkatkan potensi perubahan dalam birokrasi agar mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik. Untuk itu Good Governance sangat penting diterapkan dalam pemerintahan untuk meningkatkan kinerja aparatur pelayanan publik, karena saat ini banyak para aparatur pelayanan public belum sepenuhnya melaksanakan tugasnya dengan baik cenderung lamban, kurang profesional sehingga masyarakat merasa jenuh terhadap pelayanan yang ada. Dalam hal ini peran kinerja memiliki kedudukan dan fungsi yang signifikan dalam mewujudkan tujuan pemenuhan kebutuhan masyarakat yang merupakan komitmen dari pemerintah, karena peranan kinerja di tengah masyarakat senantiasa menjadi kepuasan terhadap masyarakat dan menjadi tolak ukur kesejahteraan.

Sebagai gambaran buruk yang terjadi dalam suatu birokrasi dapat dilihat dari gemuknya birokrasi dan kewenangan antar lembaga tumpang tindih, sistem, metode, dan prosedur kerja belum tertib, pegawai negeri sipil belum profesional dalam pekerjaannya, belum netral dalam orientasinya, praktik korupsi, kolusi dan nepotisme masih mengakar, koordinasi, integritas, dan sinkronisasi program belum terarah, serta disiplin dan etos kerja aparatur negara masih rendah.

Penerapan Good Government Governance memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat maupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan Good Governance menurut (Tunggal, 2012) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, yaitu: meminimalkan agency cost, meningkatkan kinerja pemerintahan, memperbaiki citra pemerintahan.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagai pelaksanaannya, yang pada hakekatnya adalah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pembangunan melalui desentralisasi dan demokratisasi.

Kehadiran UU No.6 Tahun 2014 sesungguhnya lahir dari kesenjangan antara peran dan fungsi strategis desa dalam penyelenggaraan roda pemerintahan yang dihadapkan dengan lemahnya kewenangan yang dimiliki desa untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan nasional. UU no.6 tahun 2014 telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada desa dalam hal perencanaan pembangunan dan pengelolaan keuangan. Oleh karena itu prinsip good governance benar-benar merupakan kebutuhan yang harus diwujudkan.

Good Governace akan tercapai apabila suatu daerah telah memenuhi prinsip-prinsip penerapan Good Governance. Prinsip-prinsip Good Governance terdiri dari, partisipasi masyarakat, penerapan hukum, tranparansi, daya tangkap, berorientasi pada consensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas serta visi strategis (Rosidi, 2010).

Namun, tidak semua desa di daerah Indonesia telah memenuhi prinsip-prinsip Good Governace. Salah satunya adalah desa-desa yang berada di wilayah pemerintahan Kabupaten Langkat. Penerapan prinsip-prinsip Good Governace dilingkungan pemerintahan desa di Kabupaten Langkat masih tergolong lemah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai kendala seperti masih banyaknya praktik penyelenggaraan birokrasi pemerintahan yang diliputi oleh berbagai tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah Desa. Ditambah lagi perilaku para aparatur Pemerintahan Desa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etis (etika pemerintahan) dalam menjalankan tugas dan perannya. Rendahnya prioritas dalam mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi yang terbentur oleh arogansi dan sikap acuh dari kalangan aparatur Desa.

Dalam pelaksanaan pencapaian good governance dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan good governance, yaitu Manusia Pelaksana, Partisipasi Masyarakat, Keuangan Daerah, Peralatan, dan Organisasi dan Manajemen (Yuanida, 2010).

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggung jawabkan. Pertanggung jawaban yang dimaksud diantaranya adalah pertanggung jawaban dalam pelaporan keuangan Desa. Sistem pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk didalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban.

Pelaporan Keuangan menurut (Baridwan, 2013) adalah sebagai “Informasi keuangan suatu organisasi pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan, pelaporan keuangan menyangkut laporan keuangan utama yang terdiri atas neraca, laporan rugi laba, laporan perubahan modal, dan laporan perubahan posisi keuangan”

Menurut (Bastian, Sistem Akuntansi Sektor Publik, 2013) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Pengelolaan keuangan desa menuntut kemampuan untuk selalu beradaptasi dengan tuntutan lingkungan yang selalu berubah. Kondisi lingkungan yang strategis adalah yang berusaha untuk menjawab tuntutan zaman, keterbatasan Sumberdaya manusia menjadi faktor penting untuk menciptakan Good governance dalam pengelolaan keuangan desa. Good governance inilah yang dibingkai melalui goal setting theory yang mencoba memberikan suatu alternatif

pilihan yang pada tujuannya untuk memberikan keselarasan dan harmoni bagi kepentingan stakeholder (pemerintah, masyarakat desa, aparatur desa) secara keseluruhan.

Dalam melakukan pelaporan keuangan, setiap pemerintahan desa diuntut untuk menerapkan ketransparansian sesuai dengan amanat Undang-Undang tentang Transparansi Dana Desa Pemerintah utamanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi publik dan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan pelaporan publikasi laporan keuangan desa dalam bentuk baliho. Hasil pengamatan yang dilakukan peneliti di beberapa Desa di Kabupaten Langkat, penerapan transparansi pada lingkungan pemerintahan desa juga tergolong lemah dilihat masih banyak Desa yang belum menerapkan pelaporan realisasi keuangan Desa dalam bentuk baliho.

Selain itu, hasil informasi laporan keuangan Alokasi Dana Desa, dan realisasi dana desa dimana dalam pencatatan laporan tidak dapat dipahami oleh masyarakat, kemudian netralitas pelaporan tidak ditujukan kepada umum melainkan informasi keuangan hanya disampaikan kepada pihak tertentu saja.

Menurut (Efendi, Darwanis, & Abdullah, 2017) mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas aparatur sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah.

Permasalahan yang paling mendasar dalam penyusunan laporan keuangan adalah SDM (Sumber Daya Manusia). Kenyataannya, di lingkungan Pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat masih terdapat pihak yang bertanggungjawab terhadap pembuatan laporan keuangan bukanlah orang yang berlatar belakang pendidikan akuntansi, dengan katalain pengetahuan dan

keterampilan petugas tidak sesuai dengan karakteristik pekerjaan tersebut. Hal tersebut menjadi kendala dalam menyampaikan laporan keuangan dikarenakan pegawai belum sepenuhnya siap dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sehingga kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga tidak memenuhi kaidah pelaporan keuangan normatif sesuai yang disyaratkan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan).

Selain itu, dalam proses penyusunan laporan keuangan daerah agar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, juga harus didukung oleh teknologi informasi yang memadai. Menurut (Sugijanto., 2002) peningkatan volume transaksi yang semakin besar dan semakin kompleks tentu harus diikuti dengan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan pemerintah.

Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dinyatakan tegas bahwa salah satu Kegiatan Prioritas Bidang Pembangunan Desa adalah pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi berupa Akses internet untuk warga Desa dan Website Desa. Dalam penerapannya, masih terdapat banyak kantor pemerintahan desa yang belum memiliki atau membangun fasilitas internet yang dapat di gunakan oleh masyarakat Desa. Selain itu, penyampaian Informasi Keuangan juga belum sepenuhnya menggunakan sistem komputerisasi.

Selain penggunaan Sumber Daya Manusia dan pemanfaatan teknologi informasi, Sistem pengawasan keuangan juga turut menentukan kualitas pelaporan keuangan. Karena pada akhirnya, diperlukan suatu proses pengawasan keuangan daerah untuk memberikan keyakinan yang memadai mengenai pencapaian tujuan pemerintah daerah yang tercermin dari keandalan laporan keuangan, efisiensi dan



efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan (Yosa, 2010). Namun yang terjadi saat ini Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat tidak belum sepenuhnya mampu menciptakan kualitas pelaporan keuangan.

Ketidak optimalnya penerapan system pengendalian intern di lingkungan pemerintahan desa di kabupaten langkat terjadi akibat penilaian resiko yang diterapkan. Pemerintah Desa tidak memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Pemerintah Desa tidak dikomunikasikan kepadaseluruh petugas pengurus desa dan musyawarah terbuka kepada warga masyarakat Desa.

Kurangnya pengawasan yang dilakukan menyebabkan kelalaian dalam pembuatan pelaporan keuangan, sehingga kurang tertibnya penyusunan dan penerapan kebijakan, kurangnya komitmen terhadap kompetensi, belum optimalnya kegiatan identifikasi risiko, dan analisis risiko, lemahnya pengendalian fisik atas aset serta pencatatan transaksi yang kurang akurat, dan tidak tepat waktu (Trisaputra,2013).

Menurut (Tampubolon & Basid, 2019); (Pranata, 2019) Komitmen Organisasi juga dapat mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan. Komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi (Kreitner & Kinicki, 2017). Selain itu (Robbins & Judge, Organizational Behavior, 2013) juga mendefinisikan bahwa Komitmen Organisasi sebagai suatu keadaan karyawan memihak kepada perusahaan tertentu dan tujuan tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya dalam perusahaan itu.

Komitmen organisasional merupakan keterikatan emosional, identifikasi dan keterlibatan pegawai terhadap satu institusi. Manfaat dari komitmen pegawai yang tinggi akan meningkatkan produktivitas, menurunkan tingkat keluar masuknya pegawai, serta meningkatkan kualitas manajerial. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa petugas pemerintahan desa di Kabupaten Langkat yang kurang peduli akan kepentingan dan tujuan dari organisasi serta melalaikan pekerjaan dengan sengaja tanpa memperdulikan nilai-nilai dan norma yang ada dalam lingkungan organisasi.

Seseorang yang memiliki komitmen terhadap suatu organisasi dapat dilihat dari segi komitmen afektif, yaitu perasaan emosional yang dimilikinya terhadap organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya, Kemudian dari segi komitmen berkelanjutan yang merupakan pemikiran akan manfaat yang diperoleh jika bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Selanjutnya komitmen seseorang terhadap suatu organisasi dapat dilihat dari segi komitmen normatif yang merupakan pemikiran bahwa ia memiliki rasa kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral dan etis (Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2013).

Penelitian mengenai faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dan implikasinya terhadap good governance sudah pernah dilakukan oleh (Sari E. N., 2012) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Medan menunjukkan hasil bahwa Efektifitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik berpengaruh signifikan terhadap Good Governance. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Afiah, 2009) menunjukkan hasil penelitian yang dilakukan pada 7 (tujuh) Pemda di Indonesia tersebut bahwa kualitas pelaporan keuangan memiliki pengaruh

positif yang moderat untuk tata kelola pemerintahan yang baik. (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019), menunjukkan hasil bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan laporan keuangan desa tetapi kualitas SDM sebaliknya. Sementa (Nurillah, 2014), menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Studi lain mengungkapkan bahwa kualitas laporan keuangan dipengaruhi oleh Pengendalian Internal (Wardani & Andriyani, 2017). Teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap laporan keuangan pemerintah. Komitmen organisasi juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelaporan keuangan seperti yang dikemukakan (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019), dan (Mulyaningsih, 2014) menyimpulkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan.

Kualitas pelaporan keuangan desa juga tidak terlepas dari pengaruh tenaga pendamping desa sesuai dengan Peraturan menteri desa, PDT dan Transmigrasi nomor 3 Tahun 2015 seperti penelitian (Kartika, 2015), (Ismail, 2016) dan (Budiarti, 2016), yang dilakukan secara kualitatif menyatakan bahwa lemahnya kualitas pelaporan keuangan desa disebabkan karena belum adanya tenaga pendamping desa yang bisa membantu desa dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian lain juga dilakukan oleh (Wiguna, Yuniarta, & Prayudi, 2017) dengan judul Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng) mengemukakan hasil bahwa bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes,

Pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, Peran pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes.

Kemudian penelitian yang dilakukan oleh (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019) dengan judul *Determinan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa* Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan komitmen organisasi memang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Andriyani, 2017) *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa* mengemukakan hasil Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, Pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, Peran pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes.

Maka dari latar belakang yang telah dipaparkan maka peneliti tertarik untuk mengangkat judul “**Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Dan Implikasinya Terhadap Good Governance (Studi Pada Desa Di Kabupaten Langkat)**”.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka hasil identifikasi terhadap permasalahan kinerja organisasi perangkat daerah yang akan diteliti yaitu:

1. Terhambatnya pencapaian tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*)
2. Kualitas Pelaporan keuangan yang tidak memenuhi standart akuntansi pemerintahan.
3. Keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia dalam melakukan pengelolaan keuangan.
4. Penggunaan Teknologi Informasi yang tidak efektif dan efisien.
5. Rendahnya penerapan Sistem Pengendalian Internal yang dalam melakukan pengelolaan keuangan desa.
6. Rendahnya komitmen yang dimiliki oleh aparatur yang bertanggung jawab atas kegiatan penyusunan pelaporan keuangan.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap *Good Governance*?
2. Apakah terdapat pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap *Good Governace*?
3. Apakah terdapat pengaruh Pengendalian internal terhadap *Good Governace*?
4. Apakah terdapat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap *Good Governace*?

5. Apakah terdapat pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?
6. Apakah terdapat pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?
7. Apakah terdapat pengaruh Pengendalian internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?
8. Apakah terdapat pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?
9. Apakah terdapat pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Good Governance?
10. Apakah Kualitas Pelaporan Keuangan memediasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?
11. Apakah Kualitas Pelaporan Keuangan memediasi pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?
12. Apakah Kualitas Pelaporan Keuangan memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?
13. Apakah Kualitas Pelaporan Keuangan memediasi pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka dapat ditetapkan tujuan dari penelitian ini untuk menguji dan menganalisis:

1. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap *Good Governance*.
2. Pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap *Good Governace*.
3. Pengaruh pengaruh Pengendalian internal terhadap *Good Governace*.



4. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap *Good Governace*.
5. Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia berpengaruh terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
6. Pengaruh Pemanfaatan teknologi informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
7. Pengaruh Pengendalian internal terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
8. Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
9. engaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Good Governance.
10. Kualitas Pelaporan Keuangan dalam memediasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
11. Kualitas Pelaporan Keuangan dalam memediasi pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
12. Kualitas Pelaporan Keuangan dalam memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
13. Kualitas Pelaporan Keuangan dalam memediasi pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut:

### **1. Manfaat Teoritis**

Bagi pihak penulis, sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan serta pemahaman mengenai Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Dan Implikasinya Terhadap Good Governacepada Desa Di Kabupaten Langkat.

### **2. Manfaat praktis**

Sebagai bahan masukan bagi Pemerintah Kabupaten Langkat untuk pengembangan dan pemberdayagunaan sumberdaya sehingga prinsip *Good Governance* dan tujuan Pemerintahan Kabupaten Langkat dapat tercapai.



## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **2.1 Good Governance**

##### **2.1.1 Pengertian Good Governace**

Untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih maka perlu diterapkan konsep Good Government Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) secara nyata. Good Government Governance merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang sudah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia. Menurut Komite Nasional Kebijakan Governance berpendapat bahwa pemerintahan di Indonesia mempunyai tanggung jawab dalam menerapkan standar Good Government Governance (tata kelola pemerintahan yang baik) yang telah diterapkan standar internasional (Sutedi, 2011).

Good Governance menurut (Agus, 2010) “merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan peran pemangku kepentingan. Tata Kelola pemerintahan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan pemerintahan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.”

Defenisi lain menyebutkan governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak faktor lain. Pesan pertama dari terminology governance membantah pemahaman formal tentang berkerjanya institusi-institusi negara. Governance mengakui bahwa

didalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang berkerja pada tingkat yang berbeda (Winarno, 2002).

Menuru (Kooiman, 2003) governance adalah aktifitas interaksi sosial politik antara penguasa dengan masyarakat luas yang berhubungan mengenai berbagai bidang keperluan masyarakat dan menuntut pemerintah atas keperluan-keperluan tersebut. (Ihyaal & Sofyani, 2016) juga mengungkapkan mengungkapkan bahwa good governan cemeliputi seluruh aspek kehidupan berupa hukum, politik, ekonomi dan sosial. Good governancejuga sangat berhubungan erat dengan penyelenggaraan kekuasaan negara, baik eksekutif,legislatif dan yudikatif.

Pemerintahan yang baik secara konseptual, mempunyai pengertian bahwa kata baik atau Good dalam istilah pemerintahan yang baik yang memiliki makna bahwa Good Governancetelah mengandung dua pemahaman : pertama, nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan, berkelanjutan, dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut (Sedarmayanti, 2009).

Selain itu (Sedarmayanti, 2012) juga menjelaskan good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and service disebut governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik). Sejalan dengan hal tersebut governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik.

### 2.1.2 Manfaat Good Governance

Penerapan Good Government Governance memiliki peran yang besar dan manfaat yang dapat membawa perubahan positif baik pemerintahan daerah, pemerintah pusat padamaupun masyarakat umum. Dengan melaksanakan Good Governance menurut (Tunggal, 2012) ada beberapa manfaat yang akan diperoleh, antara lain yaitu :

1. Meminimalkan agency cost

Biaya-biaya yang timbul akibat dari pendelegasian wewenang. Biaya ini bisa berupa kerugian yang timbul karena pemerintah telah menggunakan sumber daya yang ada untuk kepentingan pribadi sehingga dapat menimbulkan kerugian.

2. Meningkatkan kinerja pemerintahan

Suatu pemerintahan yang dikelola dengan baik dan dalam kondisi pemerintahan yang sehat akan menarik simpati masyarakat untuk ikut serta mau ikut berperan aktif dan berpartisipasi dalam kegiatan pemerintahan

3. Memperbaiki citra pemerintahan

Citra pemerintahan merupakan faktor penting yang sangat erat kaitannya dengan kinerja dan keberadaan pemerintah dimata masyarakat dan lingkungannya.

Manfaat dari penerapan good governance tentunya sangat berpengaruh bagi pemerintahan, dimana manfaat good governance ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung kembangnya dalam pemerintahan saat ini. Selain bermanfaat meningkatkan citra pemerintahan di mata masyarakat, hal ini tentunya juga menjadi nilai tambah pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam pemerintah

### 2.1.3 Tujuan Good Governance

Penerapan pelaksanaan prinsip Good Government Governance secara optimal akan mampu meningkatkan kinerja pemerintahan yang ada, dan akan memberikan nilai tambah bagi semua pihak yang terkait. Serta tujuan good government governance adalah penerapan sistem tata kelola pemerintahan yang baik (good government governance) yang diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah bagi semua pihak dalam jangka panjang dan dapat melindungi kesejahteraan masyarakat.

Menurut (Tunggal, 2012) Tujuan dari Good Government Governance adalah, tercapainya sasaran yang telah ditetapkan, Aktiva pemerintahan dijaga dengan baik, Pemerintahan menjalankan tugasnya dengan baik dan sehat, Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan transparan.”

Menurut (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2009) tujuan dari penerapan *good goverment governance* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan Negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif, dan masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri. Untuk mewujudkan itu, maka dalam implementasi tata pemerintahan yang baik diharapkan para pelaku atau pilar-pilarnya membangun kolaborasi, *networking*, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. Implementasi *good goverment governance* dalam penyelenggaraan Negara bukan perkara mudah. Kendala-kendala siap menghadapi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, kendala-kendala itu bersumber pada pelaku-pelakunya sendiri dan sistem yang melingkunginya.

Pendapat lain juga mengemukakan Tujuan Good Governance menurut (Kurniawan, 2005), sebagai berikut “Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisiensi dan efektif dengan menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat”.

#### **2.1.4 Prinsip-Prinsip Good Governace**

Kunci utama memahami good government governance adalah pemahaman atas prinsip-prinsip didalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. Baik buruknya pemerintahan bisa dimulai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good government governance.

Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip –prinsip good governance sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan Menurut (LAN & BPKP, 2003) prinsip – prinsip Good Governance, sebagai berikut :

##### **1. Partisipasi masyarakat**

Partisipasi Masyarakat yaitu masyarakat memiliki hak suara baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang sah dalam pengambilan keputusan.

##### **2. Tegaknya Supremasi Hukum**

Tegaknya Supremasi Hukum menjelaskan bahwa kerangka hukum yang dimiliki oleh suatu Negara harus adil dan tidak ada diskriminasi, tegas serta disiplin sebagai pedoman suatu Negara mengatur jalannya pemerintahan yang baik.



### 3. Transparansi

Transparansi dibangun untuk memberikan informasi secara bebas dan jelas. Seluruh proses yang terjadi di Pemerintahan harus dapat secara mudah diakses oleh masyarakat dan mudah dimengerti.

### 4. Peduli pada Stakeholder

Peduli pada Stakeholder ini yaitu lembaga – lembaga harus melayani semua pihak yang berkepentingan sesuai standar yang berlaku.

### 5. Berorientasi pada Kasus

Berorientasi pada Konsensus yaitu menjadi suatu jembatan untuk kepentingan - kepentingan atau bidang – bidang yang berbeda guna terbangunnya masa depan yang baik untuk se kelompok masyarakat terutama dalam kebijakan dan prosedur.

### 6. Kesenjangan

Kesenjangan yaitu semua masyarakat berhak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki dan mensejahterahkan diri mereka sendiri.

### 7. Efektivitas dan Efisien

Efektifitas dan Efisiensi yaitu suatu proses pemerintahan harus mengelola sumber – sumber daya secara optimal untuk kepentingan masyarakat sesuai kebutuhan yang diperlukan.

### 8. Akuntabilitas

Akuntabilitas yaitu dapat terjadi di semua organisasi yaitu bentuk suatu pertanggungjawaban yang telah dilaksanakan oleh suatu organisasi. Pertanggungjawabannya yaitu bisa dalam bentuk laporan yang dibuat oleh pemerintah setiap tahunnya.

## 9. Visi Strategis

Visi strategis yaitu prinsip ini diutamakan untuk para pemimpin dan masyarakat untuk memikirkan perspektif yang jauh ke depan untuk tata pemerintahan yang baik serta kepekaan untuk mewujudkannya

Sedangkan menurut (Mardiasmo, Akuntansi Sektor Publik, 2009) terdapat prinsip-prinsip good government governance, sebagai berikut:

### 1. Akuntabilitas (Accountability)

Pertanggungjawaban kepada public atas setiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas diperlukan agar setiap lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara melaksanakan tugasnya secara bertanggungjawab. Untuk itu, setiap penyelenggaraan harus melaksanakan tugasnya secara jujur dan strukur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan kebijakan publik yang berlaku serta menghindarkan penyalahgunaan wewenang.

### 2. Transparansi (Transparancy)

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi, informasi yang berkaitan dengan kepentingan public secara langsung dapat diperoleh bagi mereka yang membutuhkan.

### 3. Demokrasi (Democraton)

Demokrasi mengandung tiga unsur pokok yaitu pasrtisipasi, pengakuan adanya perbedaan pendapat dan perwujudan kepentingan umum. Asas demokrasi harus diterapkan baik dalam proses memilih dan dipilih sebagai proses dalam penyelenggaraan Negara.

#### 4. Aturan hukum (Rule Of Law)

Kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu. Aturan hukum harus dibangun agar lembaga Negara dan penyelenggaraan Negara dalam melaksanakan tugasnya selalu didasarkan pada keyakinan untuk berpegang teguh pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Adapun prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance) yang disusun Komite Nasional Kebijakan Governance dalam Subrayaman dkk (2008), yaitu :

##### 1. Transparansi (Transparency)

Keterbukaan/ transparansi adalah prinsip dimana persamaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan, hal ini untuk menjaga obyektivitas dalam suatu pemerintahan.

##### 2. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas adalah prinsip dimana suatu perusahaan / pemerintahan harus dapat mempertanggung jawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Oleh karena itu pemerintah harus dikelola secara benar dan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan

##### 3. Responsibilitas (Responsibility)

Responsibilitas adalah prinsip dimana pemerintahan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat berjalan dengan baik dan pemerintahan dapat dikelola dengan baik dan benar.

#### 4. Independensi (Independency)

Independensi adalah prinsip dimana untuk melancarkan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Government Governance), pemerintah harus dapat dikelola secara independen.

#### 5. Kewajaran dan kesetaraan (Fairness)

Kewajaran atau kesetaraan adalah prinsip dimana dalam melaksanakan kegiatannya, harus senantiasa memperhatikan kepentingan untuk masyarakat dan lingkungannya dan pemangku kepentingan lain harus berdasarkan asa kewajaran dan kesetaraan.

Selanjutnya menurut (Rosidi, 2010) baik buruknya pemerintahan bisa dinilai bila ia telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip good governance diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

##### 1. Partisipasi (Participation)

Setiap warga masyarakat memiliki hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan, baik secara langsung maupun lembaga perwakilan sah sesuai dengan kepentingan dan aspirasi masing-masing. Partisipasi yang luas ini perlu dibangun dalam suatu tatanan kebebasan berserikat dan berpendapat, serta kebebasan untuk berpartisipasi secara konstruktif.

##### 2. Penerapan Hukum (Rule of Law)

Kerangka aturan hukum dan perundangan-undangan haruslah berkeadilan dan dapat ditegakkan serta dipatuhi secara utuh (impartialy), terutama tentang aturan hukum dan menyangkut hak azasi manusia (HAM).

### 3. Transparansi (Transparency)

Transparansi harus dibangun dalam kerangka kebebasan aliran informasi berbagai proses, kelembagaan dan informasi harus dapat di akses secara bebas oleh mereka yang membutuhkannya dan harus dapat disediakan secara memadai dan mudah dimengerti sehingga dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi.

### 4. Daya Tanggap (Responsiveness)

Setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan. Keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat yang diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi publik, maka kinerja organisasi tersebut akan semakin baik.

### 5. Berorientasi Konsensus (Consensus Orientation)

Pemerintahan yang Baik (Good Governance) akan bertindak sebagai penengah (mediator) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, jika mungkin juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.

### 6. Keadilan (Fairness)

Pemerintah yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka untuk meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.

### 7. Efektifitas dan Efisiensi

(Effectiveness and Efficiency) Setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui pemanfaatan yang sebaik-baiknya dari berbagai sumber yang tersedia.

### 8. Akuntabilitas (Accountability)

Para pengambil keputusan (Decision Maker) dalam organisasi sektor pelayanan dan warga Negara madani memiliki pertanggungjawaban (akuntabilitas) kepada publik sebagaimana halnya kepada para pemilik (stakeholder). Pertanggungjawaban tersebut berbeda-beda, bergantung kepada jenis keputusan organisasi itu bersifat internal atau eksternal.

### 9. Visi Strategis (Strategic Vision)

Para pemimpin dan warga Negara memiliki perspektif yang luas dan jangka panjang tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan pembangunan manusia, bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk pembangunan tersebut. Mereka juga memahami aspek aspek historis, kultur dan kompleksitas sosial yang mendasari perspektif mereka.

Penerapan Good Governance kepada pemerintah adalah ibarat masyarakat memastikan mandat, wewenang, hak dan kewajibannya telah dipenuhi dengan sebaik baiknya. Governance menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah, tetapi lebih menekankan pada pelaksanaan fungsi governing secara bersama-sama oleh pemerintah dan institusi-institusi lain, yakni Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perusahaan swasta maupun warga negara. Prinsip-prinsip good

governance tersebut dalam akuntansi sektor publik berpegang pada prinsip pengelolaan keuangan daerah (anggaran) yang baik.

### **2.1.5 Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Good Governance**

Seperti yang dijelaskan oleh (Yuanida, 2010) dalam pelaksanaan tugas (task) pencapaian good governance dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan good governance, yaitu:

#### **1. Faktor Manusia Pelaksana (Man)**

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan good governance sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (local government) yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD. Di samping itu terdapat aparatur atau alat perlengkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri.

#### **2. Faktor Partisipasi Masyarakat (public participation)**

Keberhasilan penyelenggaraan good governance juga tidak terlepas dari adanya partisipasi aktif anggota masyarakat. Masyarakat di daerah baik sebagai system maupun sebagai individu merupakan bagian integral yang sangat penting dalam system pemerintah daerah. Salah satu wujud dari rasa tanggungjawab masyarakat terhadap pencapaian good government governance adalah dengan sikap mendukung terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Adapun wujud partisipasi aktif masyarakat antara lain:

- a. Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan (decision making);
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan (actuation participation);
- c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil (cost benefit evaluation);
- d. Partisipasi dalam evaluasi (evaluation participation).

#### **3. Faktor Keuangan Daerah (funding or budgeting)**

Salah satu kriteria penting untuk mengetahui secara nyata kemampuan daerah dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya adalah kemampuan self supporting dalam bidang keuangan. Dengan kata lain, faktor keuangan merupakan faktor esensial dalam mengukur tingkat pencapaian good governance di daerah / lokal membutuhkan dana/finansial.

#### 4. Faktor Peralatan (tools)

Faktor peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian good governance. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan good government governance.

#### 5. Faktor Organisasi dan Manajemen (Organization and management)

Faktor Organisasi dan Manajemen mempengaruhi pelaksanaan good governance karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen yaitu POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik, agar good government governance dapat terwujud

Selanjutnya (Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha 2017) mengemukakan faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan prinsip Good Governance adalah Partisipasi masyarakat, Sumber, daya manusia Kedisiplinan, Komunikasi, dan Kerjasama.



## **2.2 Kualitas Pelaporan Keuangan**

### **2.2.1 Pengertian Laporan Keuangan**

Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dalam bentuk pertanggungjawaban atas suatu instansi pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk kinerja instansi baik daerah maupun pusat. Laporan keuangan instansi adalah bagian dari proses pelaporan keuangan instansi

Menurut (Fahmi, 2011) laporan keuangan adalah alat yang sangat penting untuk memperoleh informasi sehubungan dengan posisi keuangan dan hasil-hasil yang telah dicapai oleh instansi yang bersangkutan. Sedangkan menurut Harahap (2016: 105) laporan keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan dan hasil usaha suatu perusahaan pada saat tertentu atau jangka waktu tertentu. Adapun jenis laporan keuangan yang dikenal adalah Neraca, Laporan Laba/Rugi, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Modal dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Menurut (IAI, 2012) mengemukakan bahwa:“Pengertian laporan keuangan adalah struktur yang menyajikan posisi keuangan dan kinerja keuangan dalam sebuah entitas. Tujuan umum dari laporan keuangan ini untuk kepentingan umum adalah penyajian informasi mengenai posisi keuangan (financial position), kinerja keuangan (financial performance), dan arus kas (cash flow), dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi para penggunanya”.

Laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan” (Bastian, Sistem Akuntansi Sektor Publik, 2013). Sementara menurut (Mahmudi, 2013) menyatakan bahwa “Laporan keuangan merupakan output dari sistem akuntansi yang bermanfaat untuk pemberian

informasi bagi pihak-pihak yang akan menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai dasar pembuatan keputusan”.

Laporan keuangan pemerintah harus menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik, keputusan ekonomi, sosial, maupun politik. Laporan keuangan pemerintah yang berguna (useful) memiliki makna laporan keuangan tersebut memuat isi informasi (information content). Laporan keuangan akan berguna apabila laporan keuangan tersebut memenuhi standar kualitatif (Adhi & Suhardjo, 2013).

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, juga segala sesuatu, baik berupa uang maupun barang, yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau dikuasai oleh negara atau daerah yang lebih tinggi serta pihak-pihak lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku (Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, 2007).

Menurut PP No 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 24 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, mengemukakan bahwa: “Laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama periode pelaporan. Laporan keuangan digunakan untuk mengetahui sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintah, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisien suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.”

Pendapat lain juga mengemukakan bahwa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah Laporan Keuangan Konsolidasi dari Laporan Keuangan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan Laporan Keuangan PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah). Proses pembuatan Laporan Keuangan Pemda ini dilakukan dengan cara menggabungkan Laporan Keuangan OPD dan Laporan Keuangan PPKD (Efrianti, 2014).

Dalam PP Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 17 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, dinyatakan bahwa terdapat beberapa kelompok utama penggunaan laporan keuangan pemerintah yaitu, (1) Masyarakat, (2) Para wakil rakyat, Lembaga pengawas, Lembaga pemeriksa, (3) Pihak yang memberi atau berperan dalam proses donasi, investasi, dan pinjaman; (4).Pemerintah.

Berdasarkan beberapa pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kualitas laporan keuangan merupakan bentuk pertanggung jawaban atas kepengurusan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas. Laporan keuangan yang diterbitkan harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku agar laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dibandingkan dengan laporan keuangan entitas lain.

### **2.2.2 Komponen Laporan Keuangan**

Menurut PP No 71 Tahun 2010 pasal 1 ayat 28 komponen laporan keuangan pokok terdiri dari; (1) Laporan realisasi anggaran (LRA); (2) Laporan perubahan saldo anggaran lebih (Laporan perubahan SAL); (3).Neraca; (4) Laporan operasional (LO); (5) Laporan perubahan ekuitas (LPE); (6) Catatan atas laporan keuangan (CaLK).

Pendapat serupa juga dikemukakan oleh Abdul Hafiz Tanjung (2014:12) komponen laporan keuangan adalah sebagai berikut (1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA); (2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL); (3) Neraca; (4) Laporan Operasional (LO); (5) Laporan Arus Kas (LAK); (6) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

### **2.2.3 Kualitas Pelaporan Keuangan**

Kualitas memiliki banyak makna bagi setiap orang sehingga pengertian kualitas dapat berbeda, hal tersebut disebabkan karena kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat tergantung pada konteksnya. Kualitas laporan keuangan dapat dikatakan baik adalah apabila informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan, sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Emilda, 2014).

Menurut (Defitri, 2018) kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Menurut (Harahap, 2013) bahwa “Kualitas Pelaporan keuangan merupakan criteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Menurut (Rasdianto, 2013) “kualitas pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Kemudian menurut (Bastian, Sistem Akuntansi Sektor Publik, 2013) kualitas pelaporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 pasal 32 ayat 2 kualitas pelaporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai laporan posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan dan dipertanggung jawabkan oleh suatu entitas pelaporan.

#### **2.2.4. Tujuan Pelaporan keuangan**

Tujuan umum laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya (Siti dan Aida 2012). Sedangkan menurut (Halim, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, 2007) menyatakan tujuan pelaporan keuangan

daerah adalah menyajikan laporan tentang Posisi keuangan, Realisasi anggaran, Arus kas, Kinerja pelaporan keuangan.

Menurut PP Nomor 71 tahun 2010 pasal 1 ayat 26 tentang Standar Akuntansi Pemerintah tujuan laporan keuangan menyajikan informasi yang berguna dan bermanfaat bagi pemakainya guna untuk pengambilan keputusan. Berikut tujuan laporan keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah.
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
5. Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhannya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan.
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam menandai aktivitasnya.

### **2.2.5 Indikator Kualitas Pelaporan Keuangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu:

### 1. Relevan

Laporan keuangan bisa dikatakan relevan, apabila informasi yang termuat didalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu.

### 2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan yang material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat di verifikal.

### 3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jikadapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal.

### 4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna untuk mempelajari informasi yang dimasuk.

Financial Accounting Standard Board (FASB, 2001) , mengemukakan kriteria utama informasi akuntansi adalah harus berguna untuk pengambilan keputusan. Agar dapat berguna, informasi itu harus mempunyai dua sifat utama, yaitu relevan dan dapat dipercaya(reliability). Agar informasi itu relevan, ada tiga

sifat yang harus dipenuhi yaitu mempunyai nilai prediksi, mempunyai nilai umpan balik (feedback value), dan tepat waktu. Informasi yang dapat dipercaya mempunyai tiga sifat yaitu dapat diperiksa, netral, dan menyajikan yang seharusnya. Disamping dua sifat utama, relevan dan dapat dipercaya, informasi akuntansi juga mempunyai dua sifat sekunder dan interaktif yaitu dapat dibandingkan dan konsisten.

Pendapat serupa dikemukakan oleh (Munawir, 2014) Indikator Kualitas Laporan Keuangan yaitu:

1. Relevan

Dikatakan relevan ketika informasi yang termuat di dalamnya dapat memengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan serta menegaskan/mengoreksi hasil evaluasi di masa lalu.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Penyajian laporan keuangan secara jujur.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang ada dapat dibandingkan dengan laporan periode sebelumnya.

4. Dapat dipahami

Informasi yang tersedia dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna



Sedangkan menurut (Putra, 2013) karakteristik merupakan ciri khas yang memberikan informasi laporan keuangan berguna bagi pemakai. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu perusahaan harus memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan itu, ada beberapa standar kualitas yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Dapat dipahami

Laporan keuangan disajikan dengan cara yang mudah dipahami, dengan anggapan bahwa pemakainya telah memiliki pengetahuan yang memadai dengan aktivitas ekonomi dan bisnis.

2. Relevan

Maksudnya adalah bahwa informasi keuangan yang diberikan dapat memenuhi kebutuhan pemakai dan dapat membantu pemakai dan mengevaluasi peristiwa masa lalu serta masa yang akan datang.

3. Keandalan/Reliabilitas

Informasi keuangan yang dihasilkan suatu perusahaan harus diuji kebenarannya oleh seorang pengukur yang independen dengan metode pengukuran yang tepat.

4. Dapat dibandingkan

Penyajian laporan keuangan dapat membandingkan laporan keuangan antar periode, sehingga dapat mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan.

5. Netral

Informasi keuangan harus ditujukan kepada tujuan umum pengguna, bukan ditujukan kepada pihak tertentu saja. Laporan keuangan tidak boleh berpihak pada salah satu pengguna laporan keuangan tersebut.

#### 6. Tepat waktu

Laporan keuangan harus dapat disajikan sedini mungkin, agar dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan perusahaan sesuai dengan waktu dibutuhkannya informasi tersebut.

#### 7. Lengkap

Informasi keuangan harus menyajikan semua fakta keuangan yang penting, sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak akan menyesatkan pembaca.”

Menurut Chabib dan Rohcmansjah (2010:10), prinsip-prinsip pelaporan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

##### 1. Akuntabilitas

Akuntabilitas mensyaratkan bahwa pengambil keputusan berperilaku sesuai dengan mandat atau amanah yang diterimanya. Untuk itu, baik dalam proses perumusan kebijakan, cara untuk mencapai keberhasilan atas kebijakan yang telah dirumuskan berikut hasil kebijakan tersebut harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal kepada masyarakat, yang mencakup kerugian daerah.

##### 2. Value for Money

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan,

pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daera

### 3. Kejujuran dalam Mengelola Keuangan Publik (Probity)

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup potensi keuangan daerah.

### 4. Transparansi

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah daerah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan horizontal accountability antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel dan responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi.

### 5. Pengendalian

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians (selisih) terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat sesegera mungkindicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan, yang mencakup Kekurangan penerimaan

### **2.2.6 Faktor – Faktor Kualitas Pelaporan Keuangan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan intansi menurut (Setyowati, 2016), yaitu :

#### **1. Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah**

Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan daerah (SIKDA) menyebutkan bahwa sistem informasi keuangan daerah adalah suatu sistem mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pengelolaan keuangan daerah dan data terkait lainnya menjadi informasi yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan pertanggungjawaban pemerintah daerah. Sedangkan informasi keuangan daerah adalah segala informasi yang berkaitan dengan keuangan daerah yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah.

#### **2. Kompetensi sumber daya manusia**

Kompetensi adalah karakteristik dasar dari seseorang yang memungkinkan mereka mengeluarkan kinerja superior dalam pekerjaannya. Makna kompetensi mengandung bagian kepribadian yang mendalam dan melekat pada seseorang dalam perilaku yang dapat diprediksi pada berbagai keadaan dan tugas pekerjaan. Prediksi siapa yang berkinerja baik dan kurang baik dapat diukur dari kriteria atau standar yang digunakan.

#### **3. Peran Internal**

Internal auditing merupakan suatu aktivitas independen, keyakinan objektif dan konsultasi yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan mengingatkan operasi organisasi. Dengan demikian internal auditing membantu organisasi dalam

mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi.

Selanjutnya (Efendi, Darwanis, & Abdullah, 2017) dalam penelitiannya mengemukakan faktor –faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas aparatur sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah

Pendapat lain mengemukakan bahwa Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan organisasi karena faktor-faktor tersebut tidak dapat diukur dengan satuan uang. (Munawir, 2014). Kualitas Informasi laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Munawir, 2014).

## **2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

### **2.3.1 Pengertian Kompetensi Sumberdaya Manusia**

Menurut Sedarmayanti (2014:286), Kompetensi adalah karakteristik yang mendasari individu yang secara kausal terkait dengan kriteria yang direferensikan secara efektif dan atau kinerja yang unggul dalam pekerjaan atau situasi. Pendapat serupa dikemukakan oleh Moehariono (2014:5) bahwa Kompetensi sebagai karakteristik yang mendasari seseorang yang berkaitan dengan efektivitas kinerja individual dalam pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebab akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif atau berkinerja prima atau superior ditempat kerja atau pada situasi tertentu.

Pendapat lain dikemukakan oleh Ruky (2013:106) mendefinisikan kompetensi sebagai kombinasi dari keterampilan (skill), pengetahuan (knowledge), dan perilaku yang dapat diamati dan diterapkan secara kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi pribadi karyawan terhadap organisasinya. Sedangkan menurut International Federation of Accountants (2014) kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu peran kerja dengan standar yang ditetapkan dengan mengacu pada lingkungan kerja. Untuk menunjukkan kompetensi dalam suatu peran, seorang akuntan profesional harus memiliki, pengetahuan profesional, keterampilan profesional, dan nilai-nilai profesional, etika, dan sikap.

Kemudian menurut Wirawan (2015:9) mendefinisikan Kompetensi sumber daya manusia adalah melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif.” Hutapea dan Thoha (2008:28) juga menjelaskan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut :“Kemampuan dan kemauandalam melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan.”Sedangkan pengertian kompetensi menurut Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan mendefinisikan kompetensi sebagai berikut :“Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.”

adi dapat disimpulkan bahwa Kompetensi adalah seperangkat perilaku kinerja individu yang dapat diamati, terukur dan sangat penting untuk keberhasilan kinerja pada individu itu sendiri maupun pada perusahaannya. Perilaku kinerja

individu tersebut meliputi pengetahuan, keterampilan, kemampuan dan karakteristik yang terkait dengan aspek kinerja praktik profesi.

### **2.3.2 Jenis-Jenis Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Jenis kompetensi yang berbeda dikaitkan dengan aspek perilaku manusia dengan kemampuannya mendemonstrasikan kemampuan perilaku tersebut, dan beberapa tipe kompetensi tersebut menurut Wibowo (2013:97) adalah sebagai berikut :

1. Planning Competency,

Merupakan tindakan tertentu seperti menetapkan tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.

2. Influence Competency,

Merupakan tindakan seperti mempunyai dampak pada orang lain, memaksa melakukan tindakan tertentu atau membuat keputusan tertentu, dan memberi inspirasi untuk bekerja menuju tujuan organisasional.

3. Communication Competency,

Merupakan bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.

4. Interpersonal Competency,

Merupakan empati, pembangunan konsensus, networking, persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan menjadi team player.

Thingking Competency, Berkenaan dengan berpikir strategis, berpikir analisis, berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif, mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.

5. Organizational Competency,

Meliputi kemampuan merencanakan pekerjaan, mengorganisasi sumber daya, mendapatkan pekerjaan, mengukur kemajuan dan mengambil resiko yang diperhitungkan.

6. Human Resources Management Competency,

Merupakan kemampuan dalam bidang team building, mendorong partiipasi, mengembangkan bakat, mengusahakan umpan balik kinerja, dan menghargai keberagaman.

7. Leadership Competency

Merupakan kompetensi yang meliputi kecakapan dalam memposisikan diri, mengembangkan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis, membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan memelopori kesehatan tempat kerja.

8. Client Service Competency,

Merupakan kompetensi yang berupa pengidentifikasian dan penganalisaan pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, membangun partnership dan berkomitmen terhadap kualitas.

9. Business Competency,

Merupakan kompetensi yang meliputi manajemen finansial, keterampilan pengambilan keputusan bisnis, bekerja dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan membangkitkan pendapatan



#### 10. Self Management Competency,

Kompetensi yang berkaitan dengan menjadi motivasi diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri, mendemonstrasikan fleksibilitas, dan berinisiatif.

#### 11. Technical/Operasional Competency,

Kompetensi yang berkaitan dengan: mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologi komputer, menggunakan peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian teknis dan profesional dan membiasakan bekerja dengan data dan angka.

Menurut Michael Zwell memberikan lima kategori kompetensi (2013:330), yang terdiri dari

##### 1. Task achievement

Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan kinerja baik. Kompetensi yang berkaitan dengan task achievement ditunjukkan oleh: orientasi pada hasil, mengelola kinerja, memengaruhi, inisiatif, efisiensi produksi, fleksibilitas, inovasi, peduli pada kualitas, perbaikan berkelanjutan, dan keahlian teknis.

##### 2. Relationship

Merupakan kategori kompetensi yang berhubungan dengan komunikasi dan bekerja baik dengan orang lain dan memuaskan kebutuhannya. Kompetensi berhubungan dengan relationship meliputi: kerja sama, orientasi pada pelayanan, kepedulian antarpribadi, kecerdasan organisasional, membangun hubungan, penyelesaian konflik, perhatian pada komunikasi dan sensitivitas lintas budaya.

### 3. Personal attribute

Merupakan kompetensi intrinsik individu dan menghubungkan bagaimana orang berpikir, merasa, belajar, dan berkembang. Personal attribute merupakan kompetensi yang meliputi: integritas dan kejujuran, pengembangan diri, ketegasan, kualitas keputusan, manajemen stress, berpikir analitis, dan berpikir konseptual.

### 4. Managerial

Merupakan kompetensi yang secara spesifik berkaitan dengan pengelolaan, pengawasan dan mengembangkan orang. Kompetensi managerial berupa: memotivasi, memberdayakan, dan mengembangkan orang lain.

### 5. Leadership

Merupakan kompetensi yang berhubungan dengan memimpin organisasi dan orang untuk mencapai maksud, visi, dan tujuan organisasi. Kompetensi berkenaan dengan leadership meliputi: kepemimpinan visioner, berpikir strategis, orientasi kewirausahaan, manajemen perubahan, membangun komitmen organisasional, membangun fokus dan maksud, dasar-dasar, dan nilai-nilai.

## **2.3.3 Manfaat Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut Ruky (2013:107) mengatakan bahwa terdapat berbagai alasan dan manfaat kompetensi Sumber Daya Manusia adalah sebagai berikut:

#### 1. Memperjelas standar kerja dan arahan yang ingin dicapai

Keterampilan, pengetahuan dan karakteristik apa saja yang dibutuhkan dalam pekerjaan. Dan perilaku apa saja yang berpengaruh terhadap kepuasan kerja yang pada akhirnya berpengaruh terhadap kinerja.

## 2. Alat seleksi karyawan

Penggunaan kompetensi sebagai alat seleksi karyawan dalam organisasi untuk memilih calon karyawan terbaik yaitu diharapkan adanya kejelasan perilaku dari karyawan, sasaran yang efektif, memperkecil biaya rekrutmen.

## 3. Memaksimalkan produktivitas

Mencapai karyawan bila dikembangkan untuk menutupi kesenjangan dalam keterampilan sehingga mampu maksimal dalam bekerja.

## 4. Dasar pengembangan sistem remunerasi

Untuk mengembangkan sistem remunerasi akan terarah dan transparan dengan mengaitkan sebanyak mungkin keputusan dengan suatu perilaku yang diharapkan dan yang ditampilkan dari seorang karyawan.

## 5. Memudahkan adaptasi terhadap perubahan

Untuk menetapkan keterampilan apa saja yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan yang selalu berubah.

## 6. Menyelesaikan perilaku kerja dengan nilai-nilai organisasi

Untuk mengkomunikasikan nilai-nilai dan hal-hal apa saja yang harus menjadi fokus dalam unjuk kerja karyawan.

### **2.3.4 Indikator Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia yang berkualitas tentunya adalah tolak ukur yang dapat dijadikan patokan atau perbandingan agar bisa mengetahui sumber daya yang berkualitas. Dengan adanya batasan atau tolak ukur ini, dapat dijadikan landasan dalam menentukan kualitas pribadi sumber daya manusia.

Menurut Sedarmayanti (2014:286) menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari :

1. Pengetahuan (knowledge),

Mencakup pengetahuan standar akuntansi pemerintahan, pengetahuan mengenai kegiatan instansi yang berhubungan dengan keuangan dan pengetahuan perkembangan teknologi informasi dalam akuntansi.

2. Keterampilan (skill),

Mencakup keterampilan mengenai fungsi akuntansi untuk setiap transaksi, keterampilan berorganisasi, dan keterampilan komunikasi yang efektif.

3. Sikap (attitude),

Memiliki komitmen untuk kepentingan publik dan sensitivitas terhadap tanggung jawab sosial, pengembangan diri dan belajar serta terus menerus, dapat diandalkan, bertanggungjawab, tepat waktu dan saling menghargai, menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

Pendapat serupa dikemukakan oleh Hutapea dan Nurianna 2008, bahwa kompetensi sumber daya manusia dapat diukur dengan menggunakan indikator berikut:

1. Pengetahuan
2. Keterampilan
3. Sikap kerja yaitu berkeaktifan dalam bekerja.

Beberapa aspek yang terkandung dalam konsep kompetensi menurut Sutrisno (2011:204) dapat diukur dengan menggunakan indikator berikut:

1. Pengetahuan(knowledge)

Kesadaran dalam bidang kognitif. Misalnya seorang karyawan mengetahui cara melakukan identifikasi belajar dan bagaimana melakukan pembelajaran yang baik sesuai dengan kebutuhan yang ada dengan efektif dan efisien di perusahaan.

2. Pemahaman (understanding)

Kedalam kognitif dan afektif yang dimiliki individu. Misalnya seorang karyawan dalam melaksanakan pembelajaran harus mempunyai pemahaman yang baik tentang karakteristik dan kondisi secara efektif dan efisien

3. Kemampuan/Keterampilan (skill)

Sesuatu yang dimiliki oleh individu yang melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Misalnya, kemampuan karyawan dalam memilih metode kerja yang dianggap lebih efektif dan efisien.

4. Nilai (value)

Suatu standar perilaku yang telah ditakini dan secara psikologis telah menyatu dalam diri seseorang. Misalnya, standar perilaku para karyawan dalam melaksanakan tugas (kejujuran, keterbukaan, demokratis dan lain-lain).

5. Sikap (attitude)

Perasaan (senang-tidak senang, suka-tidak suka) atau reaksi terhadap suatu rangsangan yang datang dari luar. Misalnya, reaksi terhadap krisis ekonomi, perasaan terhadap kenaikan gaji dan sebagainya.

6. Minat (interest)

Kecenderungan seseorang untuk melakukan suatu perbuatan. Misalnya, melakukan sesuatu aktivitas tugas

Sumber daya manusia dapat tetap bertahan karena mereka memiliki kompetensi manajerial, yaitu kemampuan untuk merumuskan visi dan strategi perusahaan serta kemampuan untuk memperoleh dan mengarahkan sumber daya lain dalam rangka mewujudkan visi dan menerapkan strategi perusahaan (Sutrisno, 2011:205).

## **2.4 Teknologi Informasi**

### **2.4.1 Definisi Teknologi Informasi**

Teknologi informasi adalah suatu studi, perancangan, pengembangan, implementasi, dukungan atau manajemen sistem informasi berbasis komputer, khususnya aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer. Sutarman (2012:13)

Sutabri (2012:3) menyatakan bahwa “Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan.

Mulyadi (2014: 21) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi.”

Definisi teknologi informasi menurut Kadir dan Triwahyuni (2013: 10) adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar”.

Beberapa definisi dari para ahli dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berbasis komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas sehingga berguna untuk pengambilan keputusan.

#### **2.4.2 Tujuan dan Fungsi Teknologi Informasi**

Sutarman (2012:17), mengemukakan tujuan dari teknologi informasi adalah, untuk memecahkan masalah, untuk membuka kreativitas dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan.

Teknologi informasi menurut Sutarmn (2012:18) memiliki fungsi untuk menyatakan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi, pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data ke bentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.

Menurut Kadir (2014:12), juga mengemukakan bahwa fungsi teknologi informasi adalah:

1. Untuk menggantikan peran manusia. dalam hal ini, teknologi informasi melakukan otomatis terhadap suatu tugas atau proses.
2. Teknologi memperkuat peran manusia, yakni dengan menyajikan informasi terhadap suatu tugas atau proses.
3. Teknologi informasi berperan dalam restrukturisasi terhadap peran manusia. Dalam hal ini, teknologi berperan dalam melakukan perubahan-perubahan terhadap sekumpulan tugas atau proses

### 2.4.3 Indikator Teknologi informasi

Nur Maflikhah (2010) memberikan beberapa dimensi tentang kemanfaatan teknologi informasi. Kemanfaatan dengan estimasi dua faktor dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu kemanfaatan dan efektivitas, dengan dimensi-dimensi masing-masing yang dikelompokkan sebagai berikut :

#### 1. Kemanfaatan

- a. Menjadi pekerjaan lebih mudah (makes job easier)
- b. Bermanfaat (usefull)c
- c. Menambah produktifitas (increas productivity).

#### 2. Efektivitas

- a. Mempertinggi efektifitas (enchance effectiveness)
- b. Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve the job performance)”.

Kemanfaatan dari penggunaan teknologi informasi itu sendiri dapat diketahui dari kepercayaan pengguna teknologi informasi dalam memutuskan penerimaan teknologi informasi dengan satu kepercayaan bahwa pengguna teknologi informasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi penggunanya.

Adapun alat ukur dari Teknologi Informasi dapat diukur melalui komponen teknologi informasi menurut M. Suyanto 2005:11 yaitu:

#### 1. Perangkat Keras Komputer Hardware

Perangkat keras bagi sesuatu system informasi terdiri atas masukan dan keluran. Sebagai unit meyimpan file dan sebagainya, peralatan, penyiapan data dan terminal masukan dan keluaran.



## 2. Perangkat Lunak Komputer Software

Seperti system perangkat lunak yang dikembangkan guna mendukung pendistribusian data dan informasi seperti system pengoprasian. Dikembangkan juga beberapa metode dan aplikasi dan sistem yang berbasis computer untuk memenuhi kebutuhan pengguna Contohnya: e-commerce, DSS Decision Support System, e- banking, SAP, dan sebagainya.

## 3. Jaringan dan Komunikasi

Jaringan dan komunikasi merupakan sebuah sistem yang mampu menghubungkan dan menggabungkan beberapa titik komunikasi menjadi satu kesatuan yang mampu berinteraksi antara satu dengan yang lainnya. Berbagai macam cara digunakan untuk memepermudah dan menjaga kualitas kualitas hubungan melalui internet. Sejak saat itulah perkembangan alat-alat yang menyokong kemampuan jaringan untuk saling berhubungan berjalan dengan pesat.

## 4. Database

wadah atau file yang berisikan program dan data dibuktikan dengan adanya media penyimpanan fisik dari proses penggunaan sistem.

## 5. Personalia Teknologi Informasi

Adanya operator computer, analis system, pembuat program, personalia penyiapan data, pemimpin system informasi.

Kemudian William Sawyer 2007:4-5 menyatakan bahwa Teknologi Informasi terdiri dari dua komponen yaitu

### 1. Teknologi Komputer

Meesin yang bisa diprogram dan memiliki beragam fungsi untuk menerima data, baik data mentah maupun angka, lalu memproses dan mengubahnya ke dalam bentuk informasi yang bisa kita manfaatkan.

## 2. Teknologi Komunikasi

Terdiri dari sistem dan peralatan elektromagnetik untuk berkomunikasi jarak jauh yang terhubung melalui sumber informasi melalui jaringan. Jaringan itu adalah sistem komunikasi yang menghubungkan dua komputer atau lebih.

Dari penjelasan diatas, maka dapat dikatakan bahwa alat ukur dari Teknologi Informasi dapat diukur melalui komponen teknologi informasi menurut M. Suyanto 2005:11 yaitu, Perangkat Keras computer Hardware, Perangkat Lunak Komputer Software, Jaringan dan Komunikasi, Database, Personalia Teknologi Informasi

## **2.5 Sistem Pengendalian Intern**

### **2.5.1 Pengertian Sistem Pengendalian Intern**

Undang-undang di bidang keuangan negara membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Hal ini baru dapat dicapai jika seluruh tingkat pimpinan menyelenggarakan kegiatan pengendalian atas keseluruhan kegiatan di instansi masing-masing.

Dengan demikian maka penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efisien dan efektif.

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem ini dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern yang dalam penerapannya harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah tersebut.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah. Sistem Pengendalian Intern dalam Peraturan Pemerintah ini dilandasi pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20).

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang

efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Mayangsari & Wandanarum (2013:59) :“Pengendalian internal adalah penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai.”

Berdasarkan beberapa definisi yang telah dikemukakan diatas, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal merupakan suatu proses yang terstruktur serta kumpulan berbagai komponen pengendalian dan aktivitas operasional organisasi/perusahaan yang terintegrasi dan digunakan oleh sebuah organisasi untuk mencapai sasaran dan tujuan organisasi yang dapat dilihat dari terciptanya keandalan laporan keuangan, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan organisasi, keamanan kekayaan organisasi serta dipatuhinya peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal yang efektif merupakan komponen kritis yang digunakan manajemen dan dasar bagi kegiatan operasional yang aman dan sehat dalam sebuah organisasi/perusahaan.

### **2.5.2 Tujuan Sistem Pengendalian Intern**

Tujuan penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern adalah untuk menentukan apakah pengendalian telah berjalan seperti yang dirancang dan apakah orang yang melaksanakan memiliki kewenangan serta kualifikasi yang

diperlukan untuk melaksanakan pengendalian secara efektif, sedangkan tujuan dibangunnya sistem pengendalian intern menurut Mahmudi (2010:20) adalah :

1. Untuk melindungi aset (termasuk data) Negara
2. Untuk memelihara catatan secara rinci dan akurat
3. Untuk menghasilkan informasi keuangan yang akurat, relevan, dan andal
4. Untuk menjamin bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku (Standar Akuntansi Pemerintah/SAP)
5. Untuk efisiensi dan efektifitas operasi
6. Untuk menjamin ditaatinya kebijakan manajemen dan peraturan perundangan yang berlaku

Pendapat lain juga menyatakan, Arens (2008:316), tujuan pengendalian intern adalah :

1. Keandalan Laporan Keuangan.

Manajemen memiliki tanggung jawab hukum maupun profesional untuk meyakinkan bahwa informasi disajikan dengan wajar sesuai dengan ketentuan dalam pelaporan seperti General Accepted Accounting Prinsiple (GAAP).

2. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasi.P

pengendalian dalam suatu perusahaan akan mendorong penggunaan sumber adya perusahaan secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran yang dituju perusahaan.

3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan.

Perusahaan publik, perusahaan non publik, maupun organisasi nirlaba diharuskan untuk mematuhi beragam ketentuan hukum dan peraturan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah menjelaskan bahwa “Pengendalian internal bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.”

Sedangkan menurut Menurut Mulyadi (2010:163)“Tujuan Sistem Pengendalian Internal” adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, Mendorong efesiens, dan Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

### **2.5.3 Indikator Sitem Pengendalian Intern**

Dalam hal pencapaian keberhasilan dalam penerapan pengendalian internalmaka harus diperhatikan juga unsur-unsur pengendalian internal. Adapun beberapa unsur pengendalian internalmenurut PP Nomor 60 Tahun 2008 adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan Sistem Pengendalian Intern dalam lingkungan kerjanya, melalui
  - a. Penegakanintegritas dan nilai etika
  - b. Komitmen terhadap kompetensi
  - c. Kepemimpinan yang kondusif
  - d. Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan
  - e. Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab yang tepat

- f. Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
  - g. Perwujudan peran aparat pengawasan intern pemerintah yang efektif
  - h. Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait
2. Penilaian Risiko Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko. Penilaian risiko terdiri atas identifikasi risiko dan analisis risiko. Dalam rangka penilaian risiko pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan:
- a. Tujuan Instansi Pemerintah Tujuan Instansi Pemerintah memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu. Tujuan Instansi Pemerintah wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai. Untuk mencapai tujuan Instansi Pemerintah pimpinan Instansi Pemerintah menetapkan strategi operasional yang konsisten dan strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.
  - b. Tujuan pada tingkatan kegiatan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Penetapan tujuan pada tingkatan kegiatan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
    - 1) Berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Instansi Pemerintah
    - 2) Saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan satu dengan lainnya
    - 3) Relevan dengan seluruh kegiatan utama Instansi Pemerintah

- 4) Mengandung unsur kriteria pengukuran
  - 5) Didukung sumber daya Instansi Pemerintah yang cukup
  - 6) Melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.
3. Kegiatan Pengendalian Pimpinan Instansi Pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan. Kegiatan pengendalian terdiri atas:
- a. Reviu atas kinerja Instansi Pemerintah yang bersangkutan
  - b. Pembinaan sumber daya manusia
  - c. Pengendalian atas pengelolaan sistem informasi
  - d. Pengendalian fisik atas asset
  - e. Penetapan dan reviu atas indikator dan ukuran kinerja
  - f. Pemisahan fungsi
  - g. Otorisasi atas transaksi dan kejadian yang penting
  - h. Pencatatan yang akurat dan tepat waktu atas transaksi dan kejadian.
  - i. Pembatasan akses atas sumber daya dan pencatatannya
  - j. Akuntabilitas terhadap sumber daya dan pencatatannya; dan
  - k. Dokumentasi yang baik atas Sistem Pengendalian Intern serta transaksi dan kejadian penting.
4. Informasi dan Komunikasi Pimpinan Instansi Pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat, dan mengkomunikasikan informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Komunikasi atas informasi tersebut wajib diselenggarakan secara efektif. Untuk menyelenggarakan komunikasi yang



efektif, pimpinan Instansi Pemerintah harus menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi serta mengelola, mengembangkan, dan memperbarui sistem informasi secara terus menerus.

5. Pemantauan Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan pemantauan Sistem Pengendalian Intern. Pemantauan Sistem Pengendalian Intern dilaksanakan melalui :

- a. Pemantauan Berkelanjutan

Pemantauan berkelanjutan diselenggarakan melalui kegiatan pengelolaan rutin, supervisi, pembandingan, rekonsiliasi, dan tindakan lain yang terkait dalam pelaksanaan tugas.

- b. Evaluasi Terpisah

Evaluasi terpisah diselenggarakan melalui penilaian sendiri, reviu, dan pengujian efektivitas Sistem Pengendalian Intern. Evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau pihak eksternal pemerintah. Evaluasi terpisah dapat dilakukan dengan menggunakan daftar uji pengendalian intern yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

- c. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Audit Dan Reviu Lainnya

Tindak lanjut rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya harus segera diselesaikan dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme penyelesaian rekomendasi hasil audit dan reviu lainnya yang ditetapkan.

Sedangkan Menurut Mulyadi (2010:427-428)“Unsur-unsur Pengendalian Internal kas” adalah, struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya, praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit dan organisasi, dan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Menurut Indra Bastian (2011) bahwa unsur sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini mengacupada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

## **2.6 Komitmen Organisasi**

### **2.4.1 Pengertian Komitmen Organisasi**

Komitmen organisasi merupakan rasa untuk tetap mempertahankan keanggotaannya di dalam organisasi dan tetap berusaha dengan segala kemampuannya demi tercapainya tujuan dan kepentingan organisasi.

Menurut Indra Kharis (2010) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Kemudian Moorhead dan Griffin (2015,p.134) mengemukakan, komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi.

Selain itu Kreitner dan Kinicki (2017) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi.

Robbins dan Judge (2011) mendefinisikan Komitmen Organisasi sebagai suatu keadaan karyawan memihak kepada perusahaan tertentu dan tujuan tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya dalam perusahaan itu. Dengan kata lain, komitmen organisasional berkaitan dengan keinginan karyawan yang tinggi untuk berbagi dan berkorban bagi perusahaan.

Komitmen organisasi adalah hal yang berharga untuk seluruh organisasi, dan bukan hanya untuk pekerjaan, maupun kelompok kerja. Komitmen karyawan sendiri bersifat relatif dari individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi itu sendiri Lambert et al, dalam Wibawa (2015).

Dari pendapat-pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa komitmen organisasi adalah keadaan psikologis seorang pemimpin organisasi dalam memberikan keyakinan, kepercayaan dan kepatuhan dengan sikap profesional guna mencapai tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk mempengaruhi demi organisasi dan tingkat sampai sejauh mana ia mampu memotivasi setiap anggota organisasi.

#### **2.4.2 Dimensi Komitmen Organisasi**

Menurut Wilson Bangun (2014,p.312) menyatakan bahwa ada tiga dimensi komitmen organisasi adalah:

1. Komitmen Afektif

Komitmen Afektif adalah perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin memiliki komitmen aktif untuk perusahaannya Karena keterlibatannya dengan hewan-hewan.

## 2. Komitmen Berkelanjutan

Komitmen Berkelanjutan adalah nilai ekonomis yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena ia dibayar tinggi dan mereka bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keluarga.

## 3. Komitmen Normatif

Komitmen Normatif adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral dan etis. Sebagai contoh seorang karyawan yang memelopori sebuah inisiatif baru mungkin bertahan dengan seorang pemberi kerja karena ia merasa meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sulit bila ia pergi.

Robbins (2008; 101) mengelompokan komitmen organisasi dengan tiga indikator yang terpisah, yaitu :

### 1. Komitmen Afektif (*Affective Commitment*)

Komitmen afektif merupakan perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan di dalam nilai-nilainya. Seseorang yang memiliki komitmen afektif yang kuat akan terus bekerja dalam suatu organisasi karena mereka memang ingin melakukan hal tersebut.

## 2. Komitmen Berkelanjutan (*Continuance Commitment*)

Komitmen berkelanjutan merupakan nilai ekonomi yang dirasakan dari bertahan dalam suatu organisasi dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Seorang karyawan mungkin bertahan dan berkomitmen dengan organisasi dan pemberi kerja karena diberi imbalan yang cukup tinggi. Komitmen ini menyebabkan seorang karyawan bertahan pada suatu organisasi karena mereka membutuhkannya.

## 3. Komitmen Normatif (*Normative Commitment*)

Komitmen normatif merupakan kewajiban seseorang untuk bertahan di dalam suatu organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Komitmen ini menyebabkan seorang karyawan bertahan pada suatu pekerjaan karena mereka merasa wajib untuk melakukannya. Dengan kata lain, komitmen normatif ini berkaitan dengan perasaan wajib untuk tetap bekerja dalam sebuah organisasi.

Komitmen afektif (*Affective Commitment*), komitmen berkelanjutan (*Continuance Commitment*), dan komitmen normatif (*Normative Commitment*), dapat digunakan dalam menguji komitmen organisasi pada pemerintah daerah. Seorang aparatur pemerintah daerah yang berkerja dalam suatu organisasi harus memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya.

### **2.4.4 Indikator Komitmen Organisasi**

Cut Zurnali (2010) mendefinisikan masing-masing indikator komitmen organisasional tersebut sebagai berikut:

#### 1. Komitmen afektif (*affective commitment*)

Komitmen afektif adalah perasaan cinta pada suatu organisasi yang memunculkan kemauan untuk tetap tinggal dan membina hubungan sosial serta menghargai nilai hubungan dengan organisasi dikarenakan telah menjadi anggota organisasi.

2. Komitmen kontiniu (*continuance commitment*)

Komitmen kontiniu adalah perasaan berat untuk meninggalkan organisasi dikarenakan kebutuhan untuk bertahan dengan pertimbangan biaya apabila meninggalkan organisasi dan penghargaan yang berkenaan dengan partisipasi di dalam organisasi.

3. Komitmen normatif (*normative commitment*)

Komitmen normatif adalah perasaan yang mengharuskan untuk bertahan dalam organisasi dikarenakan kewajiban dan tanggung jawab terhadap organisasi yang didasari atas pertimbangan norma, nilai dan keyakinan karyawan.

Menurut Wilson Bangun (2014,p.312) menyatakan bahwa ada tiga indikator komitmen organisasi adalah:

1. Komitmen Afektif

Komitmen Afektif adalah perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin memiliki komitmen aktif untuk perusahaannya Karena keterlibatannya dengan hewan-hewan.

2. Komitmen Berkelanjutan

Komitmen Berkelanjutan adalah nilai ekonomis yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan

meninggalkan organisasi tersebut. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena ia dibayar tinggi dan mereka bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keluarga.

### 3. Komitmen Normatif

Komitmen Normatif adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral dan etis.

Mowday (2000) mendefinisikan tiga indikator mengenai komitmen karyawan dalam organisasi adalah sebagai berikut:

#### 1. *Affective Commitment*

Komitmen yang berkaitan dengan adanya keinginan untuk terikat pada organisasi. Seseorang ingin berada dalam suatu organisasi karena keinginan yang timbul dari diri sendiri.

#### 2. *Continuance Commitment*

Komitmen yang timbul karena adanya kebutuhan rasional. Komitmen ini muncul atas dasar untung rugi, dipertimbangkan hal apa yang harus dikorbankan bila akan menetap didalam suatu organisasi, dengan dimensi pilihan lain, benefit, biaya.

#### 3. *Normative Commitment*

Komitmen yang bersumber pada norma yang ada dalam diri individu, yang berisi keyakinan individu akan tanggung jawab terhadap organisasi, dirinyamerasa harus bertahan karena alasan loyalitas

Menurut Robbins (2008) menyatakan bahwa terdapat 3 macam indikator komitmen organisasional yaitu : Komitmen Afektif , Komitmen Normatif, dan Komitmen Berkelanjutan.

1. Komitmen Afektif yaitu Perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya.
2. Komitmen Normatif yaitu perasaan wajib untuk tetap berada dalam organisasi karena memang harus begitu , tindakan tersebut merupakan hal benar yang harus dilakukan.
3. Komitmen berkelanjutan yaitu nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut.

Indikator komitmen organisasi menurut Indra Kharis (2010) indikator yaitu:

1. Kemauan.

Kemauan adalah rasa peduli atau bersedianya seorang karyawan dalam memegang komitmen dalam sebuah organisasi. Kemauan itu timbul bisa dilatar belakangi seperti rasa cinta mereka terhadap organisasi, teman sepekerjaan ataupun faktor lain yang mendukung karyawan tersebut untuk berkomitmen dalam organisasi.

2. Kesetiaan.

Kesetiaan karyawan terhadap tempat mereka bekerja merupakan suatu hal yang sangat diinginkan oleh pihak perusahaan, dikarenakan dengan memiliki rasa setia pada setiap diri para karyawannya akan menimbulkan sikap loyalitas dan pastinya akan terus memegang



komitmen dalam organisasi tersebut sekalipun mereka telah ditawarkan di perusahaan lain.

3. Kebanggaan pada organisasi. Rasa bangga pada suatu organisasi merupakan tujuan dalam berorganisasi karena rasa bangga yang timbul berawal dari rasa cinta dan setia kepada organisasi serta didukung dengan sikap tanggung jawab terhadap apa yang dikerjakan dan perlahan-lahan proses itu mencapai suatu keberhasilan dan rasa bangga akan timbul dalam organisasi tersebut.

## 2.7 Penelitian terdahulu

Pada penelitian ini terdapat beberapa penelitian terdahulu yang digunakan penulis sebagai bahan acuan dalam penyusunan penelitian ini.

**Tabel 2.1**

### **Penelitian Terdahulu**

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
(Astini, Fauzi, & Widowati, 2019)	Determinan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa. Sedangkan komitmen organisasi memang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

Lanjutan Tabel 2.1

## Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
(Wiguna, Yuniarta, & Prayudi, 2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, Pendidikan dan pelatihan berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes, Peran pendamping desa berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes.
(Wardani & Andriyani, 2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa	Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa. Sementara itu, pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa
(Haura, Junita, & Meutia, 2019)	Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap <i>Good Governance</i> Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderasi	Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Good Governance</i> . Pengelolaan Keuangan Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Good Governance</i> . Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Good Governance</i> . Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>Good Governance</i> . Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP), Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Kinerja Aparatur Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>Good Governance</i> dengan Komitmen Organisasi sebagai variabel Moderasi.

**Lanjutan Tabel 2.1**

**Penelitian Terdahulu**

<b>Peneliti</b>	<b>Judul Penelitian</b>	<b>Hasil</b>
(Tua & Taufik, 2015)	Pengaruh Good Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Hasil pengujian hipotesis pertama menemukan bahwa variabel good governance dan kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan
(SURYANDARI, 2015)	Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Total Quality management Terhadap Penerapan Good Governance di Lembaga Amil Zakat	Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa magang mengendalikan pelaksanaan., Yang memanfaatkan teknologi informasi, dan manajemen kualitas total memberikan efek positif dan signifikan pada aplikasi tata pemerintahan yang baik dengan nilai 51,6% dan sisanya adalah dari luar variabel penelitian ini. Yang paling berpengaruh variabel pada application tata pemerintahan yang baik adalah memanfaatkan teknologi informasi
(Wirakusuma, Julianto, & Prayudi, 2017)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Good Governance, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Empiris Pada Sekolah-Sekolah Di Kota Denpasar)	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa variabel sistem pengendalian intern (X1), good governance (X2), dan budaya organisasi (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan dana BOS baik secara parsial ataupun secara simultan.

**Lanjutan Tabel 2.1**

### Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul Penelitian	Hasil
(Ristanti, Sinarwati, & Sujana, 2014)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan daerah dan Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Penerapan Good Governance.
(Prabawa, Karamoy, & Mawikere, 2015)	Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Terhadap Good Governance (Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa)	Penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan good governance Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan good governance
(Pituringsih, Asmony, & Basuki, 2020)	Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Usaha Kecil Menengah dan	Hasil penelitian menunjukkan komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan. Teknologi informasi dan

	Implikasinya terhadap Good Governance	kompetensi SDM berpengaruh secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan serta pengelolaan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap good governance.
--	---------------------------------------	---

## 2.7 Kerangka Konsep

Kerangka konseptual merupakan penjelasan tentang bagaimana teoriberhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalahyang penting. Dalam memberikan gambaran dalam kerangka konseptual padabagian ini dapat dikembangkan sebagai berikut:

### 2.7.1 Keterkaitan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Good Governance

Sebagai mana yang dikemukakan oleh (Sedarmayanti 2012) *Good Governance* merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan dalam melaksanakan penyediaan publik *goods and service* disebut *governance* (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut *Good Governance* (kepemerintahan yang baik). Sejalan dengan hal tersebut *governance* sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik.

Berhasil atau tidaknya pelaksanaan good governance sebagian besar tergantung pada pemerintah daerah (local government) yang terdiri dari unsur pimpinan daerah, DPRD. Di samping itu terdapat aparatur atau alat perle ngkapan daerah lainnya yaitu para pegawai daerah itu sendiri (Yuanida 2010). Oleh sebab

itu penggunaan Sumber Daya Manusia yang berkompeten merupakan faktor penting dalam menunjang tercapainya *Good Governance*. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Ardiyanti & Supriadi, 2016); (Pituringasih, Asmony, & Basuki, 2020) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh yang positif terhadap implementasi *Good Governance*.

### **2.7.2 Keterkaitan Teknologi Informasi Terhadap Good Governance**

Menurut (Yuanida 2010) peralatan juga tergolong penting dalam pelaksanaan dan pencapaian good governance. Dalam pengertian ini peralatan adalah setiap alat atau benda yang dipergunakan untuk memperlancar dan mempermudah pekerjaan gerak dan aktivitas pemerintah dalam upaya pencapaian dan perwujudan good government governance.

Menurut (Sutabri 2012) menyatakan bahwa “Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambil keputusan.

Dari penjelasan diatas dapat diperoleh pemahaman bahwa untuk mencapai prinsip-prinsip *Good Governance* tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi. Penelitian yang dilakukan oleh (SURYANDARI, 2015) mengungkapkan bahwa teknologi informasi memberikan efek positif dan signifikan pada tata pemerintahan yang baik (*Good Governace*). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Pituringasih, Asmony, & Basuki, 2020)

mengemukakan bahwa Teknologi informasi secara signifikan terhadap terhadap good governance.

### **2.7.3 Keterkaitan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Good Governance**

Penerapan *good government governance* adalah untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembentukan Negara (pemerintah) yang kuat, pasar yang kompetitif, dan masyarakat sipil (*civil society*) yang mandiri (Mardiasmo, 2009). Untuk mewujudkan itu, maka dalam implementasi tata pemerintahan yang baik diharapkan para pelaku atau pilar-pilarnya membangun kolaborasi, *networking*, dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan Negara. Implementasi *good government governance* dalam penyelenggaraan Negara bukan perkara mudah. Kendala-kendala siap menghadapi pelaksanaan tata pemerintahan yang baik, kendala-kendala itu bersumber pada pelaku-pelakunya sendiri dan sistem yang melingkunginya.

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh (Ristanti, Sinarwati, & Sujana, 2014) bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Penerapan Good Governance. Hasil serupa dikemukakan oleh (Prabawa, Karamoy, & Mawikere, 2015) bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan good governance.

#### **2.7.4 Keterkaitan Komitmen Organisasi Terhadap Good Governance**

Robbins dan Judge (2011) mendefinisikan Komitmen Organisasi sebagai suatu keadaan karyawan memihak kepada perusahaan tertentu dan tujuan tujuannya, serta berniat memelihara keanggotaannya dalam perusahaan itu. Dengan kata lain, komitmen organisasional berkaitan dengan keinginan karyawan yang tinggi untuk berbagi dan berkorban bagi perusahaan. Selain itu Kreitner dan Kinicki (2017) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi.

Menurut (yuanida 2010) Organisasi dan Manajemen mempengaruhi pelaksanaan good governance karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen yaitu POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Diperlukan adanya organisasi dan manajemen yang baik, agar good government governance dapat terwujud.

Penelitian yang dilakukan oleh (Ristanti, Sinarwati, & Sujana, 2014) menunjukkan hasil bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Good Governance. Hasil serupa juga di kemukakan oleh (Haura, Junita, & Meutia, 2019) Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance.

#### **2.7.5 Keterkaitan Kualitas Pelaporan Keuangan Terhadap Good Governance**

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Kualitas laporan keuangan merupakan kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan,



bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Selain itu, (Harahap 2013), bahwa :“Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Menurut Yuanida (2010) dalam pelaksanaan tugas pencapaian good governance dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan good governnce, yaitu, faktor Manusia Pelaksana, faktor Partisipasi Masyarakat (public participation), Faktor Keuangan Daerah (funding or budgeting), Faktor Peralatan (tools), Faktor Organisasi dan Manajemen (Organization and management)

Selanjutnya (Weny A. Dunga, Abdul Hamid Tome, Apriyanto Moha 2017) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan prinsip Good Governance adalah Partisipasi masyarakat, Sumber, daya manusia Kedisiplinan, Komunikasi, dan Kerjasama.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Haura, Junita, & Meutia, 2019), diperoleh hasil bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mempengaruhi penerapan Good Governance.

### **2.7.6 Keterkaitan Kompetensi Sumber Daya Manusia dengan Kualitas Pelaporan Keuangan**

Menurut Harahap (2013:146), mengemukakan bahwa :“Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Kemudian Rasdianto (2013:21), juga mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Setyowati (2014) mengemukakan, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan intansi, yaitu, pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah, Kompetensi sumber daya manusia, dan Peran Internal.

Selanjudnya (Loli Efendi, Darwanis, Syukriy Abdullah 2017) dalam penelitiannya mengemukakan faktor –faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas aparatur sumber daya mausia, pemanfaatan teknologi informasi, dan pengawasan keuangan daerah

Pendapat lain juga mengemukakan bahwa Laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang dapat mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan organisasi karena faktor-faktor tersebut tidak dapat diukur dengan satuan uang. Kualitas Informasi laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif

yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (Munawir, 2014:9).

Penelitian yang dilakukan oleh (Wiguna, Yuniarta, & Prayudi, 2017), menunjukkan hasil bahwa Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Andriyani, 2017) menunjukkan hasil bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa.

Berbeda dengan penelitian yang dilakukan (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019), dimana dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa kualitas sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan desa.

### **2.7.7 Keterkaitan Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan**

Rasdianto (2013:21), bahwa :“ kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Kualitas Pelaporan Keuangan dapat dipengaruhi beberapa faktor, (Loli Efendi, Darwanis, Syukriy Abdullah 2017) dalam penelitiannya mengemukakan

salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah adalah, pemanfaatan teknologi informasi.

Mulyadi (2014: 21) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi.”

Definisi teknologi informasi menurut Kadir dan Triwahyuni (2013: 10) adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar”.

Keterkaitan teknologi informasi dapat kita lihat dari segi tujuan dari suatu teknologi informasi. Sutarman (2012:17), mengemukakan tujuan dari teknologi informasi adalah, untuk memecahkan masalah, untuk membuka kreativitas dan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Bastian (2010:9) bahwa kualitas laporan keuangan adalah hasil akhir dari proses akuntansi yang menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan.”

Terdapat banyak penelitian yang telah mengkaji keterkaitan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Pituringih, Asmony, & Basuki, 2020) menyatakan Teknologi informasi secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan serta pengelolaan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap good governance.

### **2.7.8 Keterkaitan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20).

Tujuan Sistem Pengendalian Internal” adalah untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen Mulyadi (2010:163).

Menurut Setyowati (2014), Mengemukakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengendalian internal, atau faktor internal. Sistem Pengendalian Intern membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi Setyowati (2014).

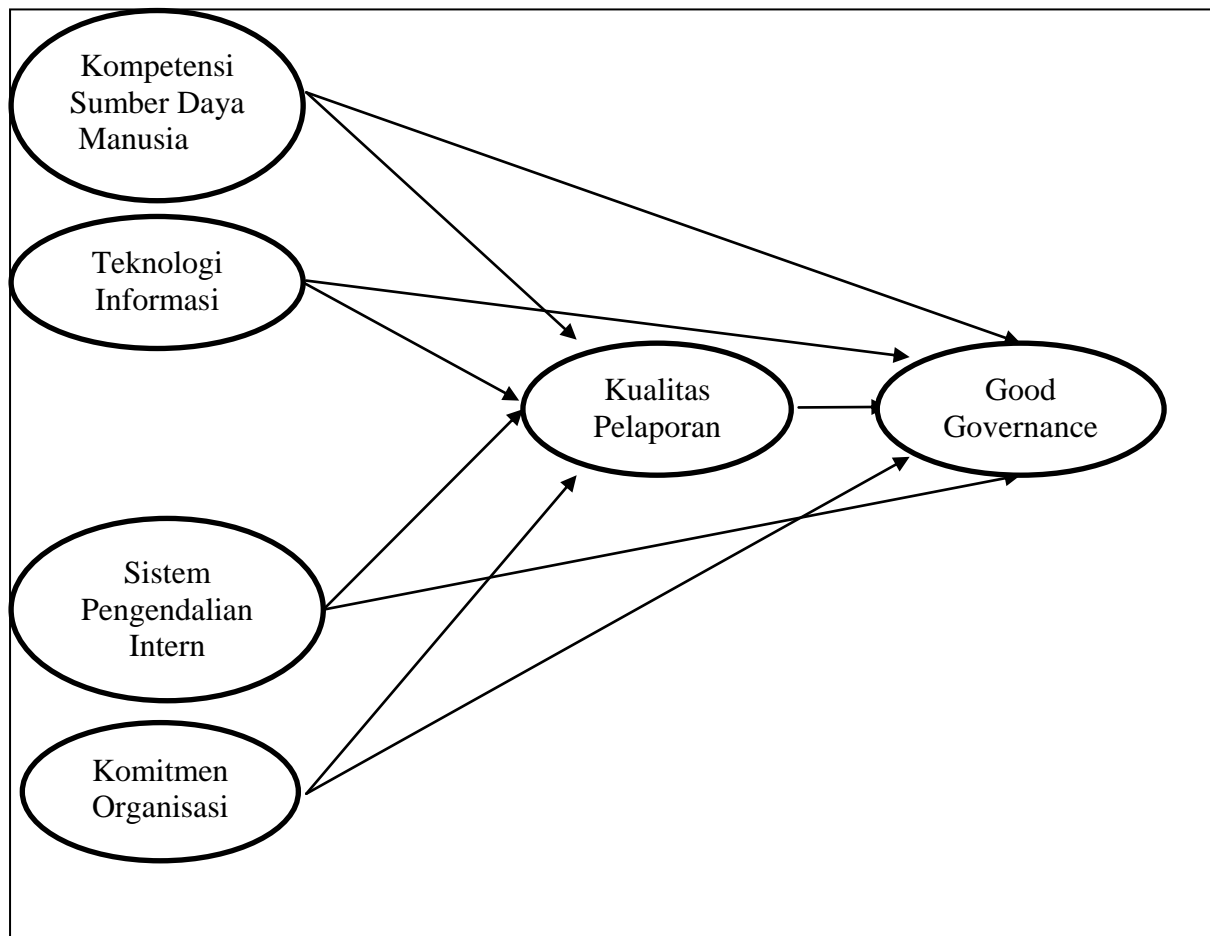
Terdapat beberapa penelitian yang telah mengkaji keterkaitan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Andriyani, 2017) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan.

### **2.7.9 Keterkaitan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan**

Moorhead dan Griffin (2015,p.134) mengemukakan, komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi.Selain itu Kreitner dan Kinicki (2017) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi.

Keterkaitan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dapat kita lihat dari karakteristik komitmen organisasi. menurut Indra Kharis (2010) salah satu karakteristik seseorang telah memiliki komitmen organisasi yang baik adalah adanya kemauan.

Kemauan merupakan rasa peduli atau bersedianya seorang karyawan dalam memegang komitmen dalam sebuah organisasi. Kemauan itu timbul bisa dilatar belakangi seperti rasa cinta mereka terhadap organisasi, teman sepekerjaan ataupun faktor lain yang mendukung karyawan tersebut untuk berkomitmen dalam pencapaian tujuan organisasi (Indra Kharis 2010). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019) komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan.



**Gambar 2.1 Kerangka Berpikir Penelitian**

## 2.8 Hipotesis

Berdasarkan tinjauan pustaka dan kerangka konseptual teoritis di atas, maka hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat mempengaruhi *Good Governace*
2. Teknologi Informasi dapat mempengaruhi *Good Governace*
3. Sistem Pengendalian intern dapat mempengaruhi *Good Governace*
4. Komitmen Organisasi dapat mempengaruhi *Good Governace*
5. Kualitas Pelaporan Keuangan dapat mempengaruhi *Good Governace*
6. Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan

7. Teknologi Informasi dapat mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan
8. Sistem Pengendalian Intern dapat mempengaruhi Kualitas Peaporan Keuangan
9. Komitmen Organisasi Dapat mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan
10. Kualitas Pelaporan Keuangan dapat memediasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
11. Kualitas Pelaporan Keuangan dapat memediasi pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
12. Kualitas Pelaporan Keuangan dapat memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.
13. Kualitas Pelaporan Keuangan dapat memediasi pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Pendekatan Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif yaitu metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2012).

Penelitian ini juga termasuk penelitian kuantitatif yang bersifat korelasional. Metode korelasi adalah metode pertautan atau metode penelitian yang berusaha menghubungkan-hubungkan antara satu unsur/elemen dengan unsur/elemen lain untuk menciptakan bentuk dan wujud baru yang berbeda dengan sebelumnya (Sugiyono, 2014).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Metode asosiatif. Menurut (Juliandi, Irfan, & Manurung, 2014) pendekatan assosiatif adalah pendekatan korelasional dengan menggunakan dua atau lebih variabel guna mengetahui hubungan atau pengaruh antara variabel satu dengan variabel lainnya. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif dan di bantu dengan program Statistik.

### **3.2 Definisi Operasional**

Dalam menjelaskan variabel-variabel yang sudah diidentifikasi, maka dibuatlah definisi operasional dari masing-masing variabel sebagai upaya pemahaman dalam penelitian.

Penelitian ini terdiri atas dua model, pada model pertama yang menjadi variabel endogen adalah Kualitas Pelaporan Keuangan (Y1), dengan variabel eksogen terdiri atas Kompetensi Sumber Daya Manusia (X1), Teknologi Informasi (X2), Sitem Pengendalian Intern (X3) dan Komitmen Organisasi (X4).

Sedangkan pada model yang kedua, yang menjadi variabel endogen adalah Good Governance (Y2) dengan variabel eksogen Kualitas Pelaporan Keuangan (Y1).

#### **3.2.1 Good Governance**

Sedarmayanti (2012) menjelaskan good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and service disebut governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance (pemerintahan yang baik). Sejalan dengan hal tersebut governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik.

Indikator dari Good Governance menurut (Rosidi, 2010) adalah partisipasi setiap warga masyarakat, penerapan hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, kuntabilitas, dan visi misi strategis.

### **3.2.2 Kualitas Pelaporan Keuangan**

Menurut Defitri (2016) kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan dikatakan berkualitas apabila informasi yang dihasilkan dapat mendukung pengambilan keputusan dan mudah dipahami oleh para pemakai.

Indikator pengukuran kualitas laporan keuangan menurut (Rahman Pura 2013) adalah, dapat dipahami, relevan, handal, dapat dibandingkan, netral, tepat waktu dan lengkap.

### **3.2.3 Kompetensi Sumber Daya Manusia**

Menurut International Federation of Accountants (2014) kompetensi diartikan sebagai kemampuan untuk melaksanakan suatu peran kerja dengan standar yang ditetapkan dengan mengacu pada lingkungan kerja. Untuk menunjukkan kompetensi dalam suatu peran, seorang akuntan profesional harus memiliki, pengetahuan profesional, keterampilan profesional, dan nilai-nilai profesional, etika, dan sikap. Kemudian menurut Wirawan (2015:9) mendefinisikan Kompetensi sumber daya manusia adalah melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif.”

Hutapea dan Thoha (2008:28) juga menjelaskan bahwa kompetensi adalah sebagai berikut :“Kemampuan dan kemauandalam melakukan sebuah tugas dengan kinerja yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Indikator pengukuran kompetensi sumber daya manusia menurut sutrisno (2011) adalah pengetahuan, pemahaman, kemampuan, nilai, sikap dan minat.

#### **3.2.4 Teknologi Informasi**

Mulyadi (2014) menyatakan bahwa teknologi informasi adalah mencakup komputer (baik perangkat keras dan perangkat lunak), berbagai peralatan kantor elektronik, perlengkapan pabrik dan telekomunikasi.”

Pendapat lain mengemukakan teknologi informasi adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar” (Kadir dan Triwahyuni 2013: 10).

Beberapa definisi dari para ahli dapat disimpulkan bahwa teknologi informasi adalah suatu teknologi berbasis komputer untuk mengolah data menjadi informasi yang berkualitas sehingga berguna untuk pengambilan keputusan.

Menurut (Nur Maflikhah 2010) beberapa dimensi tentang kemanfaatan teknologi informasi. Kemanfaatan dengan estimasi dua faktor dibagi menjadi dua kategori lagi yaitu kemanfaatan dan efektivitas, dengan dimensi-dimensi masing-masing yang dikelompokkan sebagai berikut :

##### **1. Kemanfaatan**

- d. Menjadi pekerjaan lebih mudah (makes job easier)
- e. Bermanfaat (usefull)c
- f. Menambah produktifitas (increas productivity).

## 2. Efektivitas

- c. Mempertinggi efektifitas (enchance effectiveness)
- d. Mengembangkan kinerja pekerjaan (improve the jobperformance)".

Kemanfaatan dari penggunaan teknologi informasi itu sendiri dapat diketahui dari kepercayaan pengguna teknologi informasi dalam memutuskan penerimaan teknologi informasi dengan satu kepercayaan bahwa pengguna teknologi informasi tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi penggunaannya.

### **3.2.5 Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20).

Menurut PP No. 60 tahun 2008 dijelaskan bahwa Sistem Pengendalian Internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Sedangkan menurut Mayangsari & Wandanarum (2013:59) :“Pengendalian internal adalah penggunaan semua sumber daya perusahaan untuk meningkatkan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi berbagai aktivitas dengan tujuan untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai.”

Menurut (Indra Bastian 2011) unsure - unsur sistem pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini mengacupada unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikan di lingkungan pemerintah di berbagai negara, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

### **3.2.6 Komitmen Organisasi**

Menurut Indra Kharis (2010) komitmen organisasi adalah suatu keadaan dimana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginan untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut.

Kemudian Moorhead dan Griffin (2015,p.134) mengemukakan, komitmen organisasi adalah sikap yang mencerminkan sejauh mana seseorang individu mengenali dan terikat pada organisasinya. Seseorang individu yang memiliki komitmen tinggi kemungkinan akan melihat dirinya sebagai anggota sejati organisasi. Selain itu Kreitner dan Kinicki (2017) mengungkapkan bahwa komitmen organisasi adalah kesepakatan untuk melakukan sesuatu untuk diri sendiri, individu lain, kelompok atau organisasi.

Menurut (Bangun, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2013) menyatakan bahwa ada tiga indikator komitmen organisasi adalah:

### 1. Komitmen Afektif

Komitmen Afektif adalah perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin memiliki komitmen aktif untuk perusahaannya karena keterlibatannya dengan hewan-hewan.

### 2. Komitmen Berkelanjutan

Komitmen Berkelanjutan adalah nilai ekonomis yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Sebagai contoh, seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena ia dibayar tinggi dan mereka bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keluarga.

### 3. Komitmen Normatif

Komitmen Normatif adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral dan etis. Sebagai contoh seorang karyawan yang mempelopori sebuah inisiatif baru mungkin bertahan dengan seorang pemberi kerja karena ia merasa meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sulit bila ia pergi.

Tabel 3.1

## Definisi Operasional

No	Variabel	Divenisi	Indikator	Skala
1	Good Governance	Good Governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and service disebut governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance (kepemerintahan yang baik) (Sedarmayanti, Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja, 2009).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. partisipasi masyarakat,</li> <li>2. penerapan hukum,</li> <li>3. transparansi,</li> <li>4. daya tanggap,</li> <li>5. berorientasi konsensus,</li> <li>6. keadilan,</li> <li>7. efektifitas dan efisiensi,</li> <li>8. akuntabilitas,</li> <li>9. visi misi strategis.</li> </ol>	Ordinal
2	Kualitas Pelaporan keuangan	Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yaitu kemampuan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami, dan memenuhi kebutuhan pemakainya dalam pengambilan keputusan, bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material serta dapat diandalkan sehingga laporan keuangan tersebut dapat dibandingkan dengan periode-periode sebelumnya (Defitri, 2018).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. dapat dipahami,</li> <li>2. relevan,</li> <li>3. handal,</li> <li>4. dapat dibandingkan</li> <li>5. netral,</li> <li>6. tepat waktu</li> <li>7. lengkap</li> </ol>	Ordinal
3	Kompetensi Sumber Daya Manusia	Kompetensi sumber daya manusia adalah melukiskan karakteristik pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan pengalaman yang dimiliki manusia untuk melakukan suatu pekerjaan atau peran tertentu secara efektif (Wirawan, Manajemen Sumber Daya Manusia, 2015).	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengetahuan dan pemahaman,</li> <li>2. kemampuan</li> <li>3. nilai dan sikap</li> <li>4. minat</li> </ol>	Ordinal
4	Teknologi Informasi	Teknologi informasi adalah studi penggunaan peralatan elektronika, terutama komputer, untuk menyimpan, menganalisis, dan mendistribusikan informasi apa saja, termasuk kata-kata, bilangan, dan gambar (Kadir & Triwahyuni, 2013)."	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempermudah Pekerjaan</li> <li>2. Bermanfaat</li> <li>3. Menambah Produktifitas</li> <li>4. Meningkatkan Efektifitas</li> <li>5. Mengembangkan kinerja</li> </ol>	Ordinal
5	Sistem Pengendalian intern	Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. lingkungan pengendalian,</li> <li>2. penilaian resiko</li> </ol>	Ordinal





### **3.4 Populasi dan Sampel**

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2015). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Pemerintahan Desa Kabupaten Langkat dengan Jumlah 240 Pemerintahan Desa yang terbagi dalam 23 Kecamatan.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi (Sugiyono, 2015). Dalam penelitian ini penulis mempersempit populasi dengan menghitung ukuran sampel yang dilakukan dengan menggunakan teknik random sampling. Random sampling adalah teknik pengambilan sampel dimana semua individu dalam populasi baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama diberi kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai anggota sampel (Subagyo, 2011). Pada penelitian ini, penulis memilih langsung populasi secara acak di beberapa Kecamatan di Kabupaten Langkat yang terbagi dalam 50 Desa pada 10 Kecamatan di Kabupaten Langkat. Setiap desa yang dipilih akan diambil dua (2) aparatur desa sebagai sampel penelitian.

Berikut ini merupakan Desa-desa di wilayah Kabupaten Langkat yang dijadikan sebagai sampel pada penelitian ini.

**Tabel 3.3**  
**Daftar Kelurahan/Desa Di Kabupaten Langkat**  
**Sebagai Sampel Penelitian**

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa
1.	Pangkalan Susu	1. Sungai Siur 2. Beras Basah 3. Alur Cempedak 4. Tanjung Pasir 5. Sei Meran
2.	Sei Lengan	1. Alur Dua 2. Alur Dua Baru 3. Sei Bilah Barat 4. Sei Bilah Timur 5. Puraka I Pertamina
3.	Babalan	1. Brandan Barat 2. Brandan Timur 3. Brandan Timur Baru 4. Pelawi Pelawi Utara 5. Securai Selatan 6. Securai Utara 7. Teluk Meku
4.	Besitang	1. Bukit Mas 2. Halaban 3. Kampung Lama 4. Bukit Kubu 5. Bukit Selamat
5.	Brandan Barat	1. Klantan 2. Lubuk Kasih 3. Lubuk Kertang 4. Pangkalan Batu 5. Perlis 6. Sei/Sungai Tualang 7. Tangkahan Durian
6.	Bahorok	1. Perkebunan Bukit Lawang 2. Pekan Bahorok
7.	Gebang	1. Air Hitam 2. Bukit Mengkirai 3. Dogang 4. Kwala Gebang 5. Paya Bengkuang

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa
8.	Hinai	1. Baru Pasar VIII (8) 2. Batu Melenggang 3. Cempa 4. Tanjung Mulia 5. Hinai Kanan
9.	Binjai	1. Kwala Begunit 2. Perdamaina (Perdamean) 3. Sabi/Sambi Rejo 4. Sendang Rejo
10.	Tanjung Pura	1. Pekan Tanjung Pura 2. Lalang 3. Paya Perupuk 4. Pematang Cengal 5. Pematang Serai
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, jenis sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah sumber data primer dan sekunder. Data primer diperoleh langsung dari sumber (tidak melalui sumber perantara) dan data dikumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data sekunder diperoleh secara tidak langsung melalui perantara, yang berarti diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah:

1. Kuesioner (daftar pertanyaan ) merupakan alat komunikasi antara peneliti dengan yang diteliti ( responden ) yang dibagikan oleh peneliti untuk diisi oleh responden. Skala pengukuran yang digunakan adalah skala likert. (Sudaryono, 2017).

**Tabel 3.4**  
**Skala Likert**

<b>No.</b>	<b>Kategori Jawaban Pertanyaan/Pernyataan</b>	<b>Skor</b>
1	Tidak memadai/Tidak Baik/Tidak Setuju	1
2	Kurang Memadai / Kurang Baik / Kurang Setuju	2
3	Cukup Memadai / Cukup Baik / Cukup Setuju	3
4	Memadai / Baik / Setuju	4
5	Sangat Memadai / SAngat Baik / Sangat Setuju	5

Sumber : (Sugiyono, 2010)

### 3.6 Instrumen Penelitian

Sebelum dilakukannya penyebaran kuisioner penelitian, terlebih dahulu peneliti melakukan uji instrument penelitian. Uji Instrumen penelitian dilakukan pada empat kecamatan yang terbagi dalam 20 Desa di kabupaten Langkat yang dijelaskan pada table berikut:

**Tabel 3.5**  
**Daftar Kelurahan/Desa Di Kabupaten Langkat**  
**Sebagai Sampel Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Nama Kecamatan</b>	<b>Nama Kelurahan/Desa</b>
1.	Pangkalan Susu	1. Sungai Siur 2. Beras Basah 3. Sei Meran
2.	Sei Lapan	1. Alur Dua 2. Alur Dua Baru 3. Sei Bilah Barat 4. Sei Bilah Timur 5. Puraka I Pertamina

No.	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa
3.	Babalan	1. Brandan Barat 2. Brandan Timur 3. Brandan Timur Baru 4. Pelawi Pelawi Utara 5. Securai Selatan 6. Securai Utara 7. Teluk Meku
4.	Besitang	1. Bukit Mas 2. Halaban 3. Kampung Lama 4. Bukit Kubu 5. Bukit Selamat

### 3.6.1 Validitas Diskriminan

*Diskriminant Validity* (validitas diskriminan) adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). Untuk mengukur validitas diskriminan dapat dilihat dari, *Fornell-Larcker Cirteiron*, *Cross Loadings*, *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTMT).

Namun demikian, dalam *website SmartPLS*, pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat nilai *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTM). Jika nilai HTMT < 0,90 maka suatu konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik (Jorg Henseler Christian, M. Ringle, & Marko Sarsted 2015).

**Tabel 3.6**

#### **Heroit-Monotrait Ratio (HTMT)**

	X1	X2	X3	X4	Y	Z
X1						
X2	0.583					
X3	0.551	0.062				
X4	0.600	0.058	0.079			
Y	0.621	0.351	0.377	0.270		
Z	0.415	0.204	0.178	0.394	0.544	

Berdasarkan gambar pada tabel 3.6 diatas diperoleh hasil bahwa nilai *Heroit-Monotrait Ratio* (HTMT). Jika nilai *Heroit-Monotrait Ratio* (HTMT) darisuatu variabel konstruk  $< 0,90$  maka suatu variabel konstruk adalah valid. Dari hasil pegujian validitas diskriminan, seluruh variabel konstruk memiliki nilai *Heroit-Monotrait Ratio* (HTMT) lebih kecil dari 0,90. Maka seluruh variabel konstruk pada penelitian ini adalah valid.

### 3.6.2 Construct Validity and Reliability

*Construct reliability* dan *validity* adalah pengujian untuk mengukur kehandalan suatu konstruk. Kehandalan skor konstruk harus cukup tinggi. Kriteria *reliability* dan *validity* dapat dilihat dari *Cronbach Alpha*  $> 0,7$ (Nunnaly, Bernstein, Trinchera, & Amato dalam Juliandi, 2018), *Rho\_A*  $> 0,7$  (Vinzi, Trinchera & Amato dalam Juliandi, 2018), *Composite Reliability*  $> 0,6$  (Bagozzi, Yi, Chin & Dibbern dalam Juliandi 2018), *Average Variance Extracted* (AVE)  $> 0,5$  (Fornell & Larcker dalam Juliandi 2018).

**Tabel 3.7**

#### *Construct Validity and Reliability*

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
X1	0,986	0,988	0,988	0,910
X2	0,984	0,994	0,986	0,923
X3	0,988	0,993	0,990	0,925
X4	0,986	0,989	0,988	0,933
Y	0,938	0,974	0,949	0,698
Z	0,974	0,975	0,978	0,848

Berdasarkan data *Construct Validity and Reliability* pada tabel 3.7 diperoleh hasil bahwa seluruh variabel X1, X2, Z, dan Y memiliki nilai (*Cronbach Alpha dan Rho\_A* > 0.7), nilai (*Composite Reliability* > 0,6) dan nilai (*Average Variance Extracted / AVE* > 0,5). Dengan demikian *Validity and Reliability* dari seluruh variabel adalah baik.

### **3.7 Teknik Analisis Data**

#### **3.7.1 Analisis model pengukuran (*Outer Model*)**

Analisis model pengukuran (*outer model*) bertujuan untuk mengevaluasi variabel konstruk yang diteliti, validitas (ketepatan), dan rentabilitas (kehandalan) dari suatu variabel.

##### **1. Analisis Konsistensi Internal**

Analisis konsistensi internal adalah bentuk reliabilitas yang digunakan untuk menilai konsistensi hasil lintas item pada suatu tes yang sama. Pengujian konsistensi internal menggunakan nilai Reliabilitas Komposit dengan criteria suatu variabel dikatakan reliable jika nilai Reliabilitas Komposit > 0.60 (Lathan dan Ghozali, 2012).

##### **2. Validitas Konvergen**

Validitas *konvergen* adalah untuk melihat sejauh mana sebuah pengukuran berkorelasi secara positif dengan pengukuran alternative dari konstruk yang sama. Untuk melihat suatu indikator dari suatu variabel konstruk adalah valid atau tidak valid dilihat dari nilai outer loading. Jika nilai dari outer loading lebih besar dari (0.4) maka suatu indikator adalah valid (Lathan dan Ghozali, 2012).



Pendapat lain dikemukakan oleh (Abdillah dan Hartono 2015) Analisis model pengukuran (*Outer Model*) dapat dilakukan dengan membandingkan nilai hasil pengujian dengan ketentuan berikut ini:

1. *Construct Reliability dan Validity*

*Construct reliability* dan *validity* adalah pengujian untuk mengukur kehandalan suatu konstruk. Kehandalan skor konstruk harus cukup tinggi. Kriteria *reliability* dan *validity* dapat dilihat dari *Cronbach Alpha* > 0,7, *Rho\_A* > 0.7, *Composite Reliability* > 0,6, *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,5.

2. *Diskriminant Validity*

*Diskriminant Validity* (validitas diskriminan) adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). Untuk mengukur validitas diskriminan dapat dilihat dari, *Fornell-Larcker*, *Cirteiron*, *Cross Loadings*, *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTMT). Namun demikian, dalam website SmartPLS, pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat nilai *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTM). Jika nilai HTMT < 0,90 maka suatu konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik.

### 3.6.2 Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis model struktural atau (*inner model*) bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Bagian yang perlu dianalisis dalam model struktural yakni, koefisien determinasi (R-Square) dan pengujian hipotesis.

Koefisien determinasi (*R-Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu model. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur.

Jika nilai  $R^2 = 0,75$  maka model adalah subsatansial (kuat), jika  $R^2 = 0.50$  maka model adalah moderate (sedang), jika  $R^2 = 0,25$  maka model adalah lemah (Juliandi, 2018)

#### 1. Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Analisis *direct effect* berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen). Kriteria pengukuran pengaruh langsung dapat menggunakan nilai dari koefisien jalur (*Path Coefficient*). Jika nilai koefisien jalur adalah positive maka nilai dari suatu variabel terhadap variabel lainnya adalah searah sehingga jika nilai suatu variabel eksogen meningkat, maka nilai dari variabel endogen akan meningkat. Jika nilai koefisien jalur adalah negative maka pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya adalah berlawanan arah, sehingga jika nilai variabel eksogen meningkat maka nilai variabel endogen akan menurun. (Juliandi, 2018).

#### 2. Pengaruh Tidak langsung (*Indirect Effect*)

Analisis *Indirect Effect* berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap suatu variabel yang dipengaruhi (endogen) yang dimediasi oleh suatu variabel intervening (mediator).

Kriteria pengukuran pengaruh langsung dapat dilihat melalui nilai P-value. Jika nilai P-value  $< 0,05$  maka signifikan, artinya variabel mediator memediasi pengaruh suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen dengan kata lain pengaruhnya tidak langsung.

Jika nilai P-value  $> 0.05$  maka tidak signifikan, artinya variabel mediator tidak dapat memediasi pengaruh antara variabel eksogen terhadap variabel endogen, dengan kata lain pengaruhnya adalah langsung (Juliandi, 2018).

### 3. Total effect

Total effect merupakan total dari Direct Effect dengan Indirect Effect. (Juliandi, 2018). pengaruh total (Total Effect) dari pengaruh langsung (direct effect) dengan pengaruh tidak langsung (indirect effect) dapat dilihat dari nilai terbesar pengaruh variabel bebas (x) dan nilai terbesar dari P-value

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Hasil**

##### **4.1.1 Gambaran Umum Penelitian**

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pemerolehan data melalui penyebaran kuisisioner kepada beberapa aparatur Desa di wilayah Kabupaten Langkat yang terbagi dalam 23 kecamatan dimana setiap kecamatan akan diambil dua Desa sebagai sampel penelitian.

Dalam pengisian kuisisioner, masing-masing responden diminta untuk mengisi identitas diri sesuai dengan yang terdapat dalam kuisisioner. Setiap responden diminta untuk memberikan tanggapan yang terbagi dalam lima kategori penilaian yaitu, Sangat Baik, Baik, Cukup Baik, Tidak Baik, dan Sangat Tidak Baik atas pernyataan-pernyataan yang diajukan peneliti dalam kuisisioner. Kuisisioner penelitian yang disebarakan peneliti berjumlah 92 buah dengan tingkat pengembalian sebesar 93,47% atau sebanyak 86 buah.

##### **4.1.2 Deskripsi Data**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan pada beberapa Desa di Kabupaten Langkat diperoleh deskripsi data yang tertera pada tabel berikut:

###### **1. Karakteristik Responden**

Pengujian deskriptif yang dilakukan peneliti terhadap identitas responden yang terbagi dalam empat karakteristik penilaian yaitu: Usia, Jenis kelamin Pendidikan Terakhir, dan Masa Kerja diperoleh hasil sebagai berikut:

**Tabel 4.1**  
**Karakteristik Responden**

USIA			
	Frequency	Percent	Valid Percent
KURANG DARI 21 TAHUN	8	9.30	9.30
21 TAHUN S/D 30 TAHUN	78	90.70	90.70
Total	86	100.00	100
JENIS KELAMIN			
	Frequency	Percent	Valid Percent
LAKI-LAKI	50	58.14	58.14
PEREMPUAN	36	41.86	41.86
Total	86	100	100
PENDIDIKAN TERAHIR			
	Frequency	Percent	Valid Percent
SLTA SEDERAJAT	30	34.88	34.88
S-1	56	65.12	65.12
Total	86	100	100
MASA KERJA			
	Frequency	Percent	Valid Percent
KURANG DARI LIMA TAHUN	68	79.07	79.07
6 TAHUN S/D 10 TAHUN	18	20.93	20.93
Total	86	100	100

Hasil penelitian pada tabel 4.1 diatas dapat diketahui usia rata-rata responden pada beberapa Desa diKabupaten Langkat. Responden dengan rentang usia kurang dari 21 tahun berjumlah 8 orang, dengan tingkat presentase sebesar 9,30% . Selanjutnya responden dengan rentang usia 21 sampai dengan 30 tahun sebanyak 78 orang dengan tingkat persentase 90,70%. Hal ini menunjukkan rata-rata responden pada penelitian ini berusia 21 tahun sampai dengan 30 tahun.

Hasil pengujian deskriptif pada table 4.1 juga menunjukkan bahwa jumlah responden laki-laki lebih banyak yaitu 50 orang dibandingkan dengan responden perempuan dengan jumlah 36 orang dengan tingkat persentase 58,14% dan 41,86% Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Langkat.

Kemudian, berdasarkan tabel 4.1 diatas juga diketahui rentang tingkat pendidikan rata-rata responden pada Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Langkat yaitu pada tingkat SLTA Sederajat dengan jumlah 30 orang dan S-1 sebanyak 56 orang. Tidak terdapat pegawai yang dijadikan responden Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Langkat dengan tingkat pendidikan lain.

Berdasarkan tabel 4.1 diatas diketahui rentang masa kerja responden Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Langkat. Responden dengan rentang masa kerja kurang dari 5 tahun berjumlah 68 orang dengan tingkat pesentase 79,07%, dan responden dengan rentang masa kerja enam sampai dengan 10 tahun berjumlah 18 orang dengan tingkat persentase 20,93%.

## 2. Karakteristik Kriteria Jawaban Responden

Deskripsi hasil penelitian merupakan tanggapan responden yang mengisi kuesioner mengenai Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Good Governance (Study kasus pada Desa Di Kabupaten Langkat). Akan dilihat mengenai kecenderungan jawaban responden atas masing-masing variabel penelitian. Kecenderungan jawaban responden ini dapat dilihat dari bentuk statistik deskriptif dari masing-masing variabel.

Analisis deskriptif tersebut dijabarkan kedalam Rentang Skala sebagai berikut:  $RS = \frac{m-n}{b}$  (Sugiyono, 2012).

keterangan :

rs = rentang skala

m = jumlah skor tertinggi pada skala

n = jumlah skor terendah pada skala

b = jumlah kelas atau kategori yang dibuat

Perhitungan tersebut adalah:  $RS = \frac{5-1}{5} = 0,80$

Dengan demikian kategori skala dapat ditentukan sebagai berikut :

**Tabel 4.2**  
**Skala**

Interval Kuisioner	Kategori
1,00 - 1,80	Sangat Tidak Baik/Sangat rendah
1,81 - 2,60	Tidak Baik/Rendah
2,61 - 3,40	Cukup Baik/Sedang
3,41 - 4,20	Baik/Tinggi
4,21 - 5,00	Sangat Baik/Sangat Tinggi

#### 1. Kualitas Sumber Daya Manusia

Pengujian yang dilakukan terhadap variabel Kualitas Sumber Daya Manusia diperoleh hasil deskriptif data yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4.3**

#### **Kualitas Sumber Daya Manusia**

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Rata-rata Skor	Kategori	
			F	TS	KS	CS	S			SS
Pengetahuan dan pemahaman	1	Pemerintahan desa telah menggunakan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam aspek-aspek kegiatan pemerintahan desa	F	12	10	15	30	19	3.40	Cukup Baik
			%	13.95	11.63	17.44	34.88	22.09		
			Skor	12	20	45	120	95		
	2	Adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa	F	13	9	14	32	18	3.38	Cukup Baik
			%	15.12	10.47	16.28	37.21	20.93		
			Skor	13	18	42	128	90		

Lanjutan Tabel 4.3

## Kualitas Sumber Daya Manusia

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Rata-rata Skor	Kategori	
			F	TS	KS	CS	S			SS
Pengetahuan dan pemahaman	3	Sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki	F	14	9	15	31	17	3.33	Cukup Baik
			%	16.28	10.47	17.44	36.05	19.77		
			Skor	14	18	45	124	85		
	4	Adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia	F	13	12	13	29	19	3.34	Cukup Baik
			%	15.12	13.95	15.12	33.72	22.09		
			Skor	13	24	39	116	95		
Pengetahuan dan pemahaman	5	Sumber daya manusia memiliki nilai dan sikap yang baik di lingkungan pemerintahan	F	10	15	14	25	22	3.40	Cukup Baik
			%	11.63	17.44	16.28	29.07	25.58		
			Skor	10	30	42	100	110		
	6	Adanya sanksi sosial yang diterima apabila melanggar nilai dan melakukan sikap yang tidak etis di lingkungan pemerintahan	F	14	10	13	25	24	3.41	Baik
			%	16.28	11.63	15.12	29.07	27.91		
			Skor	14	20	39	100	120		
Pengetahuan dan pemahaman	7	Sumber daya manusia yang digunakan pemerintahan desa memiliki minas sesuai dengan kebutuhan pemerintahan	F	10	13	15	22	26	3.48	Baik
			%	11.63	15.12	17.44	25.58	30.23		
			Skor	10	26	45	88	130		
	8	Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan tidak dilakukan secara unsur keterpaksaan	F	10	13	11	30	22	3.48	Baik
			%	11.63	15.12	12.79	34.88	25.58		
			Skor	10	26	33	120	110		
TOTAL							27.20	Baik		
RATA-RATA							3.40			

Berdasarkan data pada tabel 4.3 diketahui rata-rata karakteristik jawaban maupun tanggapan dari responden terhadap variabel Kualitas Sumber Daya Manusia yang diukur dengan menggunakan beberapa indikator pengukuran.



Hasil pengujian deskriptif yang dilakukan menunjukkan hasil perolehan nilai sebesar 3,40, dengan demikian berdasarkan skala pengukuran perolehan nilai tersebut termaksud dalam kategori Baik

## 2. Teknologi Informasi

Pengujian yang dilakukan terhadap variabel Teknologi Informasi diperoleh hasil deskriptif data yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**

### Teknologi Informasi

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Rata-rata Skor	Kategori	
				TS	KS	CS	S			SS
Bermanfaat	1	Pemerintahan desa menggunakan teknologi informasi yang bermanfaat	F	15	10	12	33	16	3.29	Cukup Baik
			%	17.44	11.63	13.95	38.37	18.60		
			Skor	15	20	36	132	80		
	2	Teknologi informasi yang digunakan pemerintahan desa memberikan dampak yang baik	F	16	9	10	31	20	3.35	Cukup Baik
			%	18.60	10.47	11.63	36.05	23.26		
			Skor	16	18	30	124	100		
Produktifitas	3	Teknologi informasi yang digunakan mampu memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan	F	17	8	13	29	19	3.29	Cukup Baik
			%	19.77	9.30	15.12	33.72	22.09		
			Skor	17	16	39	116	95		
	4	Dengan penggunaan teknologi informasi, kegiatan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien	F	16	9	10	31	20	3.35	Cukup Baik
			%	18.60	10.47	11.63	36.05	23.26		
			Skor	16	18	30	124	100		
Pengembangan	5	Penggunaan teknologi informasi mendukung dalam melakukan pengembangan kegiatan	F	17	9	9	32	19	3.31	Cukup Baik
			%	19.77	10.47	10.47	37.21	22.09		
			Skor	17	18	27	128	95		
	6	Teknologi informasi membantu penyelesaian permasalahan pemerintahan desa	F	16	9	16	27	18	3.26	Cukup Baik
			%	18.60	10.47	18.60	31.40	20.93		
			Skor	16	18	48	108	90		
TOTAL							19.85	Cukup Baik		
RATA-RATA							3.31			

Berdasarkan pada tabel 4.4 diketahui hasil perolehan pengujian deskripsi yang telah dilakukan terhadap variabel Teknologi Informasi. Dari pengujian tersebut diperoleh nilai deskriptif variabel Teknologi Informasi sebesar 3.46. Berdasarkan tetapan dalam skala pengukuran perolehan nilai tersebut termaksud dalam kategori Baik.

### 3. Sistem Pengendalian Intern

Pengujian yang dilakukan terhadap variabel Sistem Pengendalian Intern diperoleh hasil deskriptif data yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4.5**

#### **Sistem Pengendalian Intern**

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Rata-rata Skor	Kategori	
				TS	KS	CS	S			SS
Lingkungan Pengendalian	1	Pemerintah Desa telah memiliki kode etik yang komprehensif	F	13	13	7	27	26	3.47	Baik
			%	15.12	15.12	8.14	31.40	30.23		
			Skor	13	26	21	108	130		
	2	Pemerintah Daerah memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas mengenai suatu pekerjaan tertentu	F	11	15	8	26	26	3.48	Baik
			%	12.79	17.44	9.30	30.23	30.23		
			Skor	11	30	24	104	130		
Penilaian Resiko	3	Identifikasi risiko sudah ditetapkan dalam bentuk dokumen	F	14	12	8	24	28	3.47	Baik
			%	16.28	13.95	9.30	27.91	32.56		
			Skor	14	24	24	96	140		
	4	Kinerja ditetapkan berbasis manajemen risiko	F	12	14	7	36	17	3.37	Baik
			%	13.95	16.28	8.14	41.86	19.77		
			Skor	12	28	21	144	85		

**Lanjutan Tabel 4.5**  
**Sistem Pengendalian Intern**

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Rata-rata Skor	Kategori	
			F	TS	KS	CS	S			SS
Kegiatan pengendalian	5	Ada mekanisme untuk mereview kinerja	F	14	12	4	31	25	3.48	Baik
			%	16.28	13.95	4.65	36.05	29.07		
			Skor	14	24	12	124	125		
	6	Pencatatan dan dokumetasi dilakukan secara lengkap dan akurat dan memungkinkan dilakukannya penelusuran	F	19	17	4	25	21	3.14	Baik
			%	22.09	19.77	4.65	29.07	24.42		
			Skor	19	34	12	100	105		
Informasi dan Kunikasi	7	Terdapat mekanisme penyediaan informasi yang memadai	F	18	8	3	22	35	3.56	Baik
			%	20.93	9.30	3.49	25.58	40.70		
			Skor	18	16	9	88	175		
Pemantauan	10	Terdapat bukti telah dilakukannya fungsi pengendalian seperti review penyerapan anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan	F	18	8	3	23	34	3.55	Baik
			%	20.93	9.30	3.49	26.74	39.53		
			Skor	18	16	9	92	170		
TOTAL							27.50	Baik		
RATA-RATA							3.44			

Pada tabel 4.5 telah dilakukan pengujian deskriptif terhadap variabel Sistem Pengendalian Intern. Dari pengujian tersebut diperoleh nilai rata-rata penerapan sistem pengendalian intern sebesar 3.60, dimana berdasarkan skala pengukuran perolehan tersebut termaksud dalam kategori Baik.

#### 4. Komitmen Organisasi

Pengujian yang dilakukan terhadap variabel Komitmen Organisasi diperoleh hasil deskriptif data yang dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 4.6

## Komitemn Organisasi

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Rata-rata Skor	Kategori	
			F	TS	KS	CS	S			SS
Komitmen Afektif	1	Keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi	F	14	12	11	26	23	3.37	Cukup Baik
			%	16.28	13.95	12.79	30.23	26.74		
			Skor	14	24	33	104	115		
	2	Merasa memiliki keterlibatan dalam mencapai tujuan perusahaan	F	17	9	10	27	23	3.35	Cukup Baik
			%	19.77	10.47	11.63	31.40	26.74		
			Skor	17	18	30	108	115		
Komitmen kontiniew	3	Ada perasaan bersalah meninggalkan perusahaan	F	18	8	13	22	25	3.33	Cukup Baik
			%	20.93	9.30	15.12	25.58	29.07		
			Skor	18	16	39	88	125		
	4	Tetap bertahan merupakan kewajiban	F	20	6	18	19	23	3.22	Cukup Baik
			%	23.26	6.98	20.93	22.09	26.74		
			Skor	20	12	54	76	115		
Komitmen Normatif	5	Mendapatkan keuntungan apabila bertahan	F	20	6	14	25	21	3.24	Cukup Baik
			%	23.26	6.98	16.28	29.07	24.42		
			Skor	20	12	42	100	105		
	6	Bertahan dalam perusahaan merupakan kebutuhan	F	19	7	15	21	24	3.28	Cukup Baik
			%	22.09	8.14	17.44	24.42	27.91		
			Skor	19	14	45	84	120		
TOTAL							19.79	Cukup Baik		
RATA-RATA							3.30			

Dari tabel 4.6 telah dijelaskan hasil pengukuran secara deskriptif atas variabel komitmen organisasi. Hasil pengujian tersebut diperoleh nilai sebesar 3,63. Yang artinya berdasarkan skala penilaian yang digunakan, perolehan nilai tersebut termasuk dalam kategori Baik.

#### 5. Kualitas laporan Keuangan

Pengujian yang dilakukan terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan diperoleh hasil deskriptif data yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4.7**  
**Kualitas Laporan Keuangan**

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Rata-rata Skor	Kategori	
			F	TS	KS	CS	S			SS
Relevan	1	Laporan keuangan memberikan informasi secara lengkap yang berguna untuk pengambilan keputusan	F	5	6	0	35	40	4.15	Baik
			%	5.81	6.98	0.00	40.70	46.51		
			Skor	5	12	0	140	200		
	2	Hasil laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya	F	6	5	0	35	40	4.14	Baik
			%	6.98	5.81	0.00	40.70	46.51		
			Skor	6	10	0	140	200		
Andal	3	Laporan keuangan menyajikan informasi keuangan dengan tepat	F	7	4	0	38	37	4.09	Baik
			%	8.14	4.65	0.00	44.19	43.02		
			Skor	7	8	0	152	185		
	4	Pencatatan transaksi keuangan disertai bukti transaksi yang dapat diverifikasi	F	9	2	0	33	42	4.13	Baik
			%	10.47	2.33	0.00	38.37	48.84		
			Skor	9	4	0	132	210		
Lengkap	5	Laporan keuangan yang dihasilkan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan	F	7	4	0	35	40	4.13	Baik
			%	8.14	4.65	0.00	40.70	46.51		
			Skor	7	8	0	140	200		
	6	laporan keuangan yang dihasilkan tidak menghilangkan aspek-aspek penting	F	8	3	0	31	44	4.16	Baik
			%	9.30	3.49	0.00	36.05	51.16		
			Skor	8	6	0	124	220		
Dapat Dipahami	7	Hasil Laporan keuangan dapat dipelajari	F	7	4	0	38	37	4.09	Baik
			%	8.14	4.65	0.00	44.19	43.02		
			Skor	7	8	0	152	185		
Dapat Diakses	10	Pengguna informasi keuangan memiliki privasi tersendiri terhadap sistem informasi	F	7	4	0	39	36	4.08	Baik
			%	8.14	4.65	0.00	45.35	41.86		
			Skor	7	8	0	156	180		
TOTAL							32.98	Baik		
RATA-RATA							4.12			

Berdasarkan hasil pada tabel 4.7 diketahui perolehan nilai dari hasil pengujian deskriptif terhadap variabel Kualitas Laporan Keuangan sebesar 4.12. Berdasarkan skala pengukuran perolehan nilai tersebut termaksud dalam kategori baik.

#### 6. Good Governance

Pengujian yang dilakukan terhadap variabel Good Governace diperoleh hasil deskriptif data yang dijelaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4.8**  
**Good Governance**

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Rata-rata Skor	Kategori	
			F	TS	KS	CS	S			SS
Partisipasi Masyarakat	1	Masyarakat telah terlibat dalam penerapan Good Governance di lingkungan Pemerintahan Desa	F	6	5	12	34	29	3.87	Baik
			%	6.98	5.81	13.95	39.53	33.72		
			Skor	6	10	36	136	145		
Penerapan Hukum	3	Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan dan Undang-Undang	F	7	4	13	35	27	3.83	Baik
			%	8.14	4.65	15.12	40.70	31.40		
			Skor	7	8	39	140	135		
Transparansi	5	Masyarakat luas dapat mengetahui dan mengakses kegiatan-kegiatan pemerintah Desa	F	10	3	12	35	26	3.74	Baik
			%	11.63	3.49	13.95	40.70	30.23		
			Skor	10	6	36	140	130		
Daya Tanggap	7	pemerintahan Desa dapat menyelesaikan permasalahan di lingkungan Desa	F	6	8	9	33	30	3.85	Baik
			%	6.98	9.30	10.47	38.37	34.88		
			Skor	6	16	27	132	150		

Lanjutan Tabel 4.8

## Good Governace

Indikator	No	Pernyataan	Tanggapan					Rata-rata Skor	Kategori	
			F	TS	KS	CS	S			SS
Berorientasi Konsensus	9	Setiap kegiatan yang dilakukan didasari dengan musyawarah	F	5	8	9	29	35	3.94	Baik
			%	5.81	9.30	10.47	33.72	40.70		
			Skor	5	16	27	116	175		
Keadilan	11	Mayarakat desa memiliki hak dan kewajiban yang sama atas segala bentuk kegiatan pemerintahan	F	6	7	9	33	31	3.88	Baik
			%	6.98	8.14	10.47	38.37	36.05		
			Skor	6	14	27	132	155		
Efektifitas dan efisiensi	13	Pelaksanaan dan penyelesaian dilakukan tepat waktu dan penggunaan sumber daya yang baik	F	6	6	9	33	32	3.92	Baik
			%	6.98	6.98	10.47	38.37	37.21		
			Skor	6	12	27	132	160		
Visi-Misi Strategis	15	Kegiatan pemerintahan didasari dengan penetapan visi dan misi yang baik	F	6	7	9	31	33	3.91	Baik
			%	6.98	8.14	10.47	36.05	38.37		
			Skor	6	14	27	124	165		
TOTAL							30.94	Baik		
RATA-RATA							3.87			

Berdasarkan pengujian deskriptif yang dilakukan pada tabel 4.8 atas variabel Good Governance diperoleh hasil deskriptif data sebesar 3.87. Berdasarkan pengukuran dengan skala perolehan nilai tersebut termaksud dalam kategori Baik.

#### 4.1.2 Hasil Analisis Data

##### 1. Analisis Model Pengukuran (Outer Model)

Analisis model pengukuran (*Outer Model*) bertujuan untuk mengevaluasi variabel konstruk yang diteliti, validitas (ketepatan), dan reliabilitas (kehandalan) dari suatu variabel.

a. *Construct Validity and Reliability*

*Construct reliability* dan *validity* adalah pengujian untuk mengukur kehandalan suatu konstruk. Kehandalan skor konstruk harus cukup tinggi. Kriteria *reliability* dan *validity* dapat dilihat dari *Cronbach Alpha* > 0,7 (Nunnaly, Bernstein, Trinchera, & Amato dalam Juliandi, 2018), *Rho\_A* > 0,7 (Vinzi, Trinchera & Amato dalam Juliandi, 2018), *Composite Reliability* > 0,6 (Bagozzi, Yi, Chin & Dibbern dalam Juliandi 2018), *Average Variance Extracted (AVE)* > 0,5 (Fornell & Larcker dalam Juliandi 2018).

**Tabel 4.9**

***Construct Validity and Reliability***

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
X1	0,982	0,982	0,984	0,885
X2	0,979	0,981	0,983	0,905
X3	0,986	0,986	0,988	0,911
X4	0,982	0,983	0,985	0,718
Y	0,976	0,976	0,979	0,855
Z	0,974	0,974	0,978	0,847

Berdasarkan data *Construct Validity and Reliability* pada tabel 4.9 diperoleh hasil bahwa seluruh variabel X1, X2, Z, dan Y memiliki nilai (*Cronbach Alpha* dan *Rho\_A* > 0,7), nilai (*Composite Reliability* > 0,6) dan nilai (*Average Variance Extracted / AVE* > 0,5). Dengan demikian *Validity and Reliability* dari seluruh variabel adalah baik.



b. Diskriminant Validity (Validitas Diskriminan)

*Diskriminant Validity* (validitas diskriminan) adalah sejauh mana suatu konstruk benar-benar berbeda dari konstruksi lain (konstruk adalah unik). Untuk mengukur validitas diskriminan dapat dilihat dari, *Fornell-Larcker* *Cirteiron*, *Cross Loadings*, *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTMT).

Namun demikian, dalam *website* SmartPLS, pengukuran terbaru yang terbaik adalah melihat nilai *Heretroit-Monotrait Ratio* (HTM). Jika nilai HTMT < 0,90 maka suatu konstruk memiliki validitas diskriminan yang baik (Jorg Henseler Christian, M. Ringle, & Marko Sarsted 2015).

**Tabel 4.10**

**Heroit-Monotrait Ratio (HTMT)**

	X1	X2	X3	X4	Y	Z
X1						
X2	0.199					
X3	0.289	0.374				
X4	0.506	0.280	0.325			
Y	0.670	0.620	0.663	0.671		
Z	0.588	0.512	0.520	0.518	0.839	

Berdasarkan gambar pada tabel 4.10 diatas diperoleh hasil bahwa nilai *Heroit-Monotrait Ratio* (HTMT). Jika nilai *Heroit-Monotrait Ratio* (HTMT) darisuatu variabel konstruk < 0,90 maka suatu variabel konstruk adalah valid. Dari hasil pegujian validitas diskriminan, seluruh variabel konstruk memiliki nilai *Heroit-Monotrait Ratio* (HTMT) lebih kecil dari 0,90. Maka seluruh variabel konstruk pada penelitian ini adalah valid.

Pengukuran validitas suatu konstruk dalam membentuk suatu variabel laten juga dapat dilakukan dengan membandingkan nilai loading faktor (*Outer loading*). Jika nilai dari outer loading lebih besar dari (0.7) maka suatu indikator adalah valid (Lathan dan Ghozali, 2012).

**Tabel 4.11**

**Outer Loading (Loading Faktor)**

	X1	X2	X3	X4	Z	Y
X1.1	0.940					
X1.2	0.941					
X1.3	0.935					
X1.4	0.948					
X1.5	0.928					
X1.6	0.949					
X1.7	0.940					
X1.8	0.946					
X2.1		0.942				
X2.2		0.950				
X2.3		0.965				
X2.4		0.956				
X2.5		0.948				
X2.6		0.948				
X3.1			0.945			
X3.2			0.951			
X3.3			0.943			
X3.4			0.947			
X3.5			0.946			
X3.6			0.969			
X3.7			0.967			
X3.8			0.966			
X4.1				0.957		
X4.2				0.960		
X4.3				0.958		
X4.4				0.968		
X4.5				0.952		
X4.6				0.953		
Z.1					0.920	

	X1	X2	X3	X4	Z	Y
Z.2					0.925	
Z.3					0.921	
Z.4					0.924	
Z.5					0.918	
Z.6					0.920	
Z.7					0.917	
Z.8					0.918	
Y.1						0.920
Y.2						0.921
Y.3						0.939
Y.4						0.915
Y.5						0.918
Y.6						0.920
Y.7						0.934
Y.8						0.930

Berdasarkan tabel 4.9 diatas diketahui nilai loading faktor (*Outer Loading*) dari seluruh variabel konstruk lebih besar dari (0,7). Dengan demikian seluruh variabel konstruk yang di gunakan dalam memprediksi variabel laten adalah valid.

## 2. Analisis Model Struktural (*Inner Model*)

Analisis model structural atau (*inner model*) bertujuan untuk menguji hipotesis penelitian. Bagian yang perlu dianalisis dalam model struktural yakni, koefisien determinasi (R-Square) dan pengujian hipotesis.

### a. R-Square

Koefisien determinasi (*R-Square*) bertujuan untuk mengevaluasi keakuratan prediksi suatu model. Dengan kata lain untuk mengevaluasi bagaimana variasi nilai variabel terikat dipengaruhi oleh variasi nilai variabel bebas pada sebuah model jalur. Jika nilai  $R^2 = 0,75$  maka model adalah substansial (kuat), jika  $R^2 = 0.50$  maka model adalah moderate (sedang), jika  $R^2 = 0,25$  maka model adalah lemah (Juliandi, 2018).

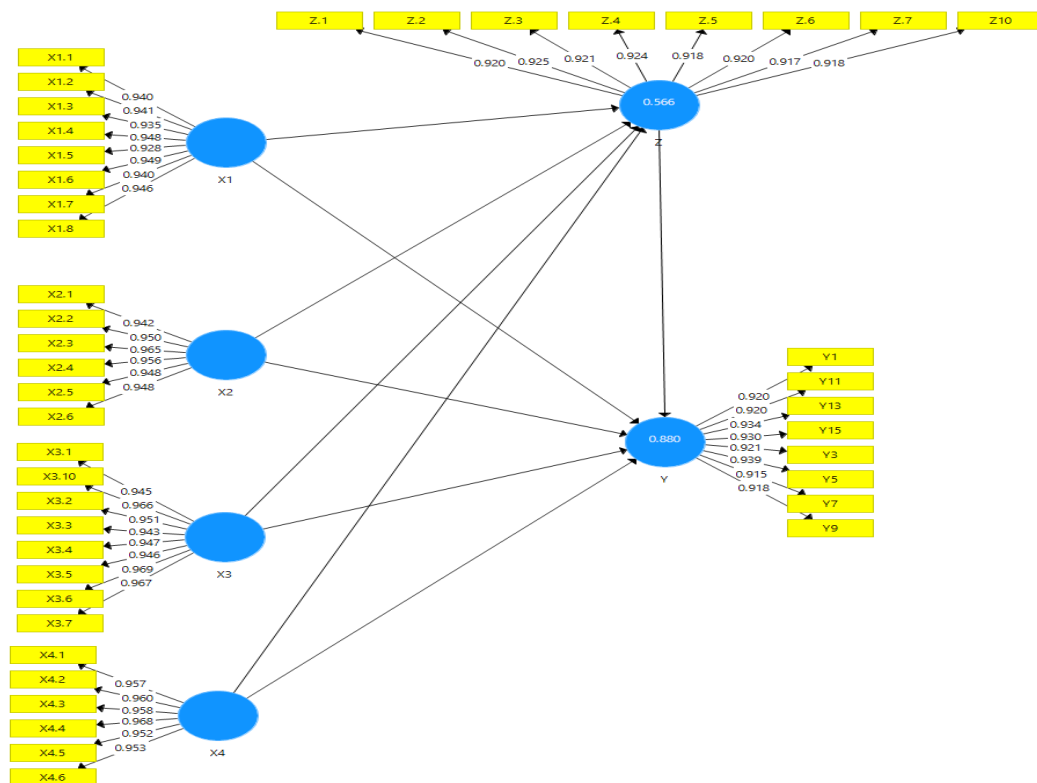
**Tabel 4.12**

**Koefisien Determinasi (*R-Square*)**

	R-Square	Adjust R-Square
Y	0.880	0.872
Z	0,566	0,545

Sumber : Diolah tahun 2021

Berdasarkan tabel 4.11 diperoleh hasil R-Square sebesar 0,880 dari variabel Y. Hal ini mengindikasikan keakuratan variabel X1, X2, X3, X4 dan Z dalam menjelaskan variabel Y adalah sebesar 88,%. Kemudian diperoleh R-square sebesar 0,566 pada variabel Z. Hal ini mengindikasikan keakuratan variabel X1, X2, dan X3 dalam menjelaskan variabel Z adalah sebesar 56,6%. Kemampuan variabel X1, X2, dan Z dalam menjelaskan variabel Y juga dapat dilihat pada gambar berikut:



### Gambar 4.1 R- Square

#### b. $f^2$ ( $f^2$ -Square)

F-Square adalah ukuran yang digunakan untuk menilai dampak relatif dari suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen).

Perubahan nilai F-Square saat variabel eksogen tertentu dihilangkan dari model dapat digunakan untuk mengevaluasi apakah variabel yang dihilangkan memiliki dampak yang substantif pada konstruk endogen. Kriterianya jika  $f^2 = 0.02$  mengindikasikan efek yang kecil dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, jika  $f^2 = 0,15$  mengindikasikan efek yang sedang dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, jika  $f^2 = 0,35$  mengindikasikan efek yang besar dari variabel eksogen terhadap variabel endogen (Cohen dalam Juliandi 2018).

**Tabel 4.13**

#### F-Square

	X1	X2	X3	X4	Y	Z
X1					0.294	0.227
X2	.				0.363	0.166
X3					0.405	0.109
X4					0.296	0.044
Y						
Z					0.334	

Sumber : SmartPLS

Berdasarkan tabel 4.12 diatas dapat dilihat pengaruh f-square variabel eksogen X1 terhadap Y adalah sebesar 0,294. Hal ini mengartikan kemampuan dari variabel X1 dalam menjelaskan variabel Y adalah sebesar 29.4%. Maka hal ini

mengindikasikan kemampuan dari variabel X1 dalam memprediksi variabel Y adalah sedang.

Kemudian pengaruh f-square variabel eksogen X1 terhadap Z adalah sebesar 0,227. Hal ini mengartikan kemampuan dari variabel X1 dalam menjelaskan variabel Z adalah sebesar 22.7%. Maka hal ini mengindikasikan kemampuan dari variabel X1 dalam memprediksi variabel Z adalah sedang.

Perolehan nilai f-square variabel eksogen X2 terhadap Y adalah sebesar 0,363. Hal ini mengartikan kemampuan dari variabel X2 dalam menjelaskan variabel Y adalah sebesar 36.3%. Maka hal ini mengindikasikan kemampuan dari variabel X1 dalam memprediksi variabel Y adalah tinggi.

Kemudian pengaruh f-square variabel eksogen X2 terhadap Z adalah sebesar 0,166. Hal ini mengartikan kemampuan dari variabel X2 dalam menjelaskan variabel Z adalah sebesar 16.6%. Maka hal ini mengindikasikan kemampuan dari variabel X2 dalam memprediksi variabel Z adalah sedang.

Perolehan nilai f-square variabel eksogen X3 terhadap Y adalah sebesar 0,405. Hal ini mengartikan kemampuan dari variabel X3 dalam menjelaskan variabel Y adalah sebesar 40.5%. Maka hal ini mengindikasikan kemampuan dari variabel X3 dalam memprediksi variabel Y adalah tinggi.

Kemudian pengaruh f-square variabel eksogen X3 terhadap Z adalah sebesar 0,109. Hal ini mengartikan kemampuan dari variabel X3 dalam menjelaskan variabel Z adalah sebesar 10.9%. Maka hal ini mengindikasikan kemampuan dari variabel X3 dalam memprediksi variabel Z adalah sedang.

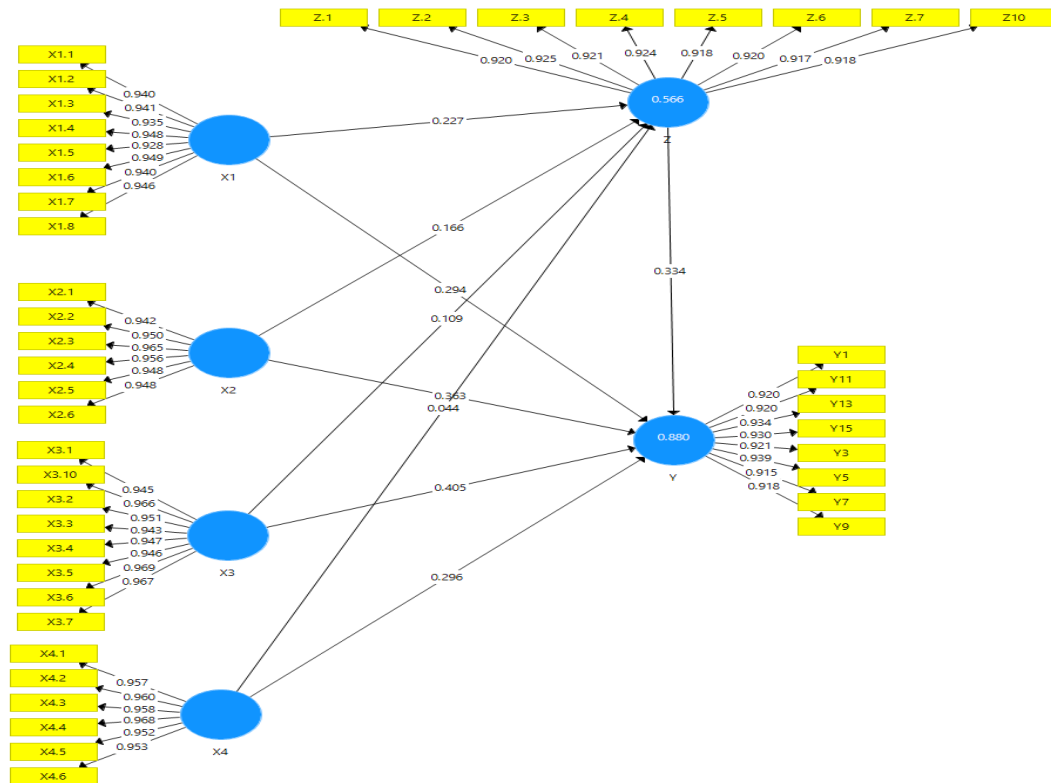
Perolehan nilai f-square variabel eksogen X4 terhadap Y adalah sebesar 0,296. Hal ini mengartikan kemampuan dari variabel X4 dalam menjelaskan variabel Y

adalah sebesar 29.6%. Maka hal ini mengindikasikan kemampuan dari variabel X4 dalam memprediksi variabel Y adalah tinggi.

Kemudian pengaruh f-square variabel eksogen X4 terhadap Z adalah sebesar 0,044. Hal ini mengartikan kemampuan dari variabel X4 dalam menjelaskan variabel Z adalah sebesar 4.4%. Maka hal ini mengindikasikan kemampuan dari variabel X4 dalam memprediksi variabel Z adalah sedang.

Perolehan nilai f-square variabel eksogen Z terhadap Y adalah sebesar 0,334. Hal ini mengartikan kemampuan dari variabel Z dalam menjelaskan variabel Y adalah sebesar 33.4%. Maka hal ini mengindikasikan kemampuan dari variabel Z dalam memprediksi variabel Y adalah sedang.

Kemampuan dari masing masing variabel eksogen dalam menjelaskan variabel endogen juga dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 4.2 F-Square**

### 3. Pengujian Hipotesis

Pada penelitian ini terdapat dua pengujian hipotesis yang dilakukan. Yaitu pengujian hipotesis pengaruh langsung dan pengujian hipotesis pengaruh tidak langsung

#### a. Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Analisis *direct effect* berguna untuk menguji hipotesis pengaruh langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen).

Kriteria pengukuran pengaruh langsung dapat menggunakan nilai dari koefisien jalur (*Path Coefficient*). Jika nilai koefisien jalur adalah positif maka nilai dari suatu variabel terhadap variabel lainnya adalah searah sehingga jika nilai suatu variabel eksogen meningkat, maka nilai dari variabel endogen akan



meningkat. Jika nilai koefisien jalur adalah negatif maka pengaruh dari suatu variabel terhadap variabel lainnya adalah berlawanan arah, sehingga jika nilai variabel eksogen meningkat maka nilai variabel endogen akan menurun. (Juliandi, 2018).

**Tabel 4.14**

**Pengaruh Langsung**

	<i>Ordinal Sampel</i>	<i>Sampel Mean</i>	<i>Standart Deviasi</i>	<i>T Statistik</i>	<i>P Values</i>
X1 → Y	0,234	0.242	0.051	4,818	0.000
X1 → Z	0,366	0.371	0.050	7,379	0,000
X2 → Y	0,247	0.245	0.040	6,125	0.000
X2 → Z	0,294	0,296	0,050	5.825	0,000
X3 → Y	0,261	0,262	0,042	6.241	0,000
X3 → Z	0,244	0,242	0,060	4.066	0,000
X4 → Y	0,230	0,231	0,040	5.691	0,000
X4 → Z	0,165	0,159	0,070	2.352	0,019
Z → Y	0,304	0,302	0,050	6.089	0,000

Sumber :SmartPLS

Berdasarkan tabel 4.11 diatas diperoleh hasil pengujian pengaruh langsung X1 terhadap Y mempunyai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.234 (positif), maka peningkatan nilai variabel X1 akan diikuti oleh peningkatan nilai y sebesar 23,4%. Pengaruh variabel X1 terhadap y mempunyai nilai *P-Values* (0.000) <  $\alpha$  (0.05), sehingga variabel X1 dapat mempengaruhi variabel Y.

Hasil pengujian pengaruh langsung dari variabel X1 terhadap variabel Z diperoleh nilai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.366 (positif), maka peningkatan nilai variabel X1 akan diikuti oleh peningkatan nilai variabel Z sebesar 36,6%. Pengaruh variabel X1 terhadap variabel Z mempunyai nilai *P-Values* (0.000) <  $\alpha$  (0.05), sehingga variabel X1 dapat mempengaruhi variabel Z.

Hasil pengujian pengaruh langsung dari variabel X2 terhadap variabel Y diperoleh nilai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.247 (positif), maka peningkatan nilai variabel X2 akan diikuti oleh peningkatan nilai variabel Y sebesar 24,7%. Pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y mempunyai nilai P-Values ( $0.000 < \alpha (0.05)$ ), sehingga variabel X2 dapat mempengaruhi variabel Y.

Hasil pengujian pengaruh langsung dari variabel X2 terhadap variabel Z diperoleh nilai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.294 (positif), maka peningkatan nilai variabel X2 akan diikuti oleh peningkatan nilai variabel Z sebesar 29,4%. Pengaruh variabel X2 terhadap variabel Z mempunyai nilai P-Values ( $0.000 < \alpha (0.05)$ ), sehingga variabel X2 dapat mempengaruhi variabel Z.

Hasil pengujian pengaruh langsung dari variabel X3 terhadap variabel Y diperoleh nilai koefisien jalur sebesar (*Ordinal Sampel*) 0.261 (positif), maka peningkatan nilai variabel X3 akan diikuti oleh peningkatan nilai variabel Y sebesar 26,1%. Pengaruh variabel X3 terhadap variabel Y mempunyai nilai P-Values ( $0.000 < \alpha (0.05)$ ), sehingga variabel X3 dapat mempengaruhi variabel Y.

Hasil pengujian pengaruh langsung dari variabel X3 terhadap variabel Z diperoleh nilai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.244 (positif), maka peningkatan nilai variabel X3 akan diikuti oleh peningkatan nilai variabel Z sebesar 24,4%. Pengaruh variabel X3 terhadap variabel Z mempunyai nilai P-Values ( $0.000 < \alpha (0.05)$ ), sehingga variabel X3 dapat mempengaruhi variabel Z.

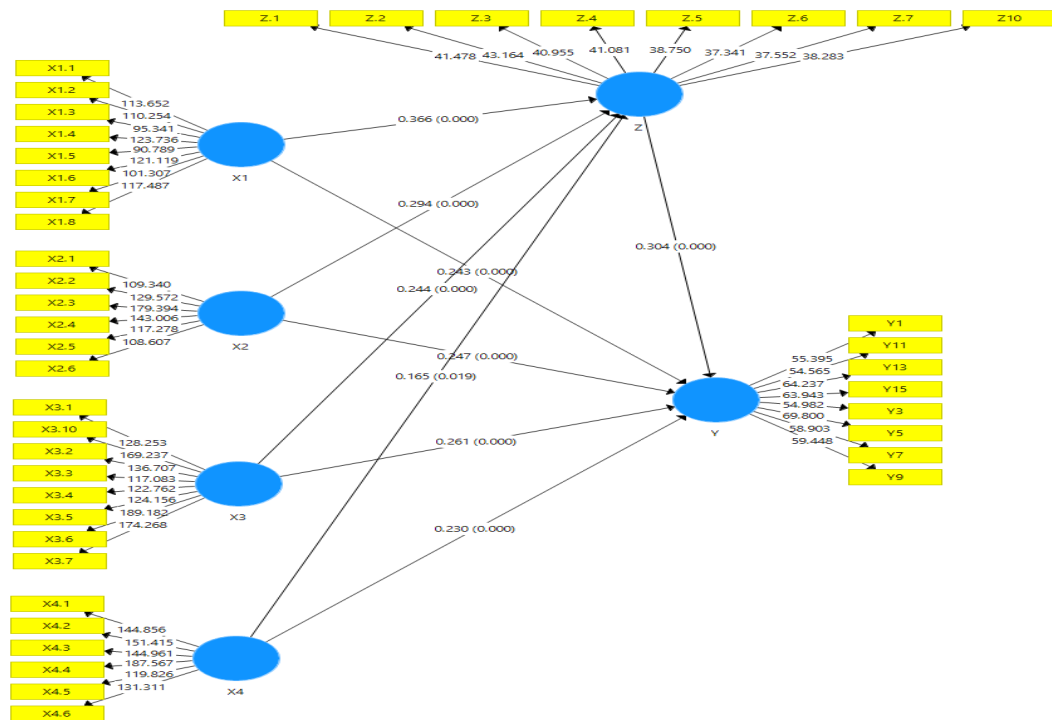
Hasil pengujian pengaruh langsung dari variabel X4 terhadap variabel Y diperoleh nilai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.230 (positif), maka peningkatan nilai variabel X4 akan diikuti oleh peningkatan nilai variabel Y

sebesar 23,%. Pengaruh variabel X4 terhadap variabel Y mempunyai nilai P-Values (0.000)  $< \alpha$  (0.05), sehingga variabel X4 dapat mempengaruhi variabel Y.

Hasil pengujian pengaruh langsung dari variabel X4 terhadap variabel Z diperoleh nilai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.165 (positif), maka peningkatan nilai variabel X4 akan diikuti oleh peningkatan nilai variabel Z sebesar 16,5%. Pengaruh variabel X4 terhadap variabel Z mempunyai nilai P-Values (0.019)  $< \alpha$  (0.05), sehingga variabel X4 dapat mempengaruhi variabel Z.

Hasil pengujian pengaruh langsung dari variabel Z terhadap variabel Y diperoleh nilai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.304 (positif), maka peningkatan nilai variabel Z akan diikuti oleh peningkatan nilai variabel Y sebesar 30,4%. Pengaruh variabel Z terhadap variabel Y mempunyai nilai P-Values (0.000)  $< \alpha$  (0.05), sehingga variabel Z dapat mempengaruhi variabel Y.

Hasil pengujian pengaruh langsung dari variabel bebas X1, X2, X3, X4 dan Z terhadap variabel terikat Y juga dapat dilihat pada gambar berikut ini:



**Gambar 4.3 Pengaruh Langsung**

c. Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Analisis indirect effect berguna untuk menguji hipotesis pengaruh tidak langsung suatu variabel yang mempengaruhi (eksogen) terhadap variabel yang dipengaruhi (endogen) yang diantarai/dimediasi oleh suatu variabel intervening (variabel mediator). Jika nilai P-Values <0,05, maka signifikan, artinya variabel memediasi, memediasi pengaruh suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen. Dengan kata lain, pengaruhnya adalah tidak langsung. Jika nilai P-Values >0,05, maka tidak signifikan, artinya variabel mediasi tidak memediasi pengaruh suatu variabel eksogen terhadap suatu variabel endogen. Dengan kata lain, pengaruhnya adalah langsung

**Tabel 4.15**

**Pengaruh Tidak Langsung**

	<i>Ordinal Sampel</i>	<i>Sampel Mean</i>	<i>Standart Deviasi</i>	<i>T Statistik</i>	<i>P Values</i>
X1 → Z → Y	0,111	0.112	0.022	5,172	0.000
X2 → Z → Y	0,089	0.090	0.025	3,638	0,000
X3 → Z → Y	0,074	0.074	0.026	2,845	0.004
X4 → Z → Y	0,050	0.049	0.025	2,033	0,042

Sumber :SmartPLS

Berdasarkan tabel 4.14 diatas diperoleh pengaruh tidak langsung X1 terhadap Y yang di mediasi variabel Z mempunyai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.111 (positif), maka variabel Z dapat memperantarai pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y sebesar 11,1%.. Pengaruh variabel X1 terhadap Y yang dimediasi variabel Z mempunyai nilai P-Values (0.000) <  $\alpha$  (0.05), sehingga variabel Z dapat memediasi pengaruh variabel X1 terhadap variabel Y.

Pengaruh tidak langsung X2 terhadap Y yang di mediasi variabel Z mempunyai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.089 (positif), maka variabel Z dapat memperantarai pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y sebesar 8,9%.. Pengaruh variabel X2 terhadap Y yang dimediasi variabel Z mempunyai nilai P-values (0.000) <  $\alpha$  (0.05), sehingga variabel Z dapat memediasi pengaruh variabel X2 terhadap variabel Y.

Pengaruh tidak langsung X3 terhadap Y yang di mediasi variabel Z mempunyai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.074 (positif), maka peningkatan nilai variabel X3 akan diikuti oleh peningkatan nilai Y sebesar 7,4% dengan dimediasi variabel Z. Pengaruh variabel X3 terhadap Y yang dimediasi variabel Z mempunyai nilai P-values (0.004) <  $\alpha$  (0.05), sehingga variabel Z dapat memediasi pengaruh Variabel X3 terhadap Variabel Y.

Pengaruh tidak langsung X4 terhadap Y yang di mediasi variabel Z mempunyai koefisien jalur (*Ordinal Sampel*) sebesar 0.050 (positif), maka

peningkatan nilai variabel X4 akan diikuti oleh peningkatan nilai Y sebesar 5,% dengan dimediasi variabel Z. Pengaruh variabel X4 terhadap Y yang dimediasi variabel Z mempunyai nilai P-values ( $0.042 < \alpha (0.05)$ ), sehingga variabel Z dapat memediasi pengaruh Variabel X4 terhadap Variabel Y

d. Pengaruh Total (*Total Effect*)

*Total effect* merupakan total dari *Direct Effect* dengan *Indirect Effect*. (Juliandi, 2018). Pengaruh total (*Total Effect*) dari pengaruh langsung (*direct effect*) dengan pengaruh tidak langsung (*indirect effect*) dapat di lihat dari nilai terbesar pengaruh variabel bebas (x) dan nilai terbesar dari P-value. Pengaruh total (*Total Effect*) akan dijlaskan pada tabel berikut:

**Tabel 4.16**

**Pengaruh total (*Total Effect*)**

	<i>Ordinal Sampel</i>	<i>Sampel Mean</i>	<i>Standart Deviasi</i>	<i>T Statistik</i>	<i>P Values</i>
X1 → Y	0,355	0.354	0.047	7,614	0.000
X1 → Z	0,366	0.371	0.050	7,379	0.000
X2 → Y	0,336	0.335	0.040	8,361	0.000
X2 → Z	0,294	0.296	0.050	5,825	0.000
X3 → Y	0,335	0.336	0.041	8,188	0.000
X3 → Z	0,244	0.242	0.060	4,066	0.000
X4 → Y	0,281	0.280	0.039	7,275	0.000
X4 → Z	0,165	0.159	0.070	2,352	0.019
Z → Y	0,305	0.302	0.050	6,089	0.000

Pada tabel 4.15 telah dijelaskan pengaruh total atau total efek dari variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,355. Pengaruh total atau total efek dari variabel X1 terhadap variabel Z adalah sebesar 0,366.

Pengaruh total atau total efek dari variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,336. Pengaruh total atau total efek dari variabel X2 terhadap variabel Z adalah sebesar 0,294.

Pengaruh total atau total efek dari variabel X3 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,335. Pengaruh total atau total efek dari variabel X3 terhadap variabel Z adalah sebesar 0,244.

Pengaruh total atau total efek dari variabel X4 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,281. Pengaruh total atau total efek dari variabel X2 terhadap variabel Z adalah sebesar 0,165. Kemudian Pengaruh total atau total efek dari variabel Z terhadap variabel Y adalah sebesar 0,305.

## **5.2 Pembahasan**

Governance adalah mekanisme pengelolaan sumber daya ekonomi dan social yang melibatkan pengaruh sector negara dan sector non-pemerintah dalam suatu usaha kolektif. Defenisi ini mengasumsikan banyak aktor yang terlibat dimana tidak ada yang sangat dominan yang menentukan gerak faktor lain.

Selain itu (Sedarmayanti, 2012) juga menjelaskan good governance merupakan proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan publik goods and service disebut governance (pemerintah atau pemerintahan), sedangkan praktek terbaiknya disebut good governance (pemerintahan yang baik).

Manfaat dari penerapan good governance tentunya sangat berpengaruh bagi pemerintahan, dimana manfaat good governance ini bukan hanya untuk saat ini tetapi juga dalam jangka panjang dapat menjadi pendukung kembangnya dalam pemerintahan saat ini. Selain bermanfaat meningkatkan citra pemerintahan

di mata masyarakat, hal ini tentunya juga menjadi nilai tambah pemerintah dalam meningkatkan kinerja pemerintahan untuk menghadapi permasalahan yang ada dalam pemerintah.

Untuk terwujudnya tata pemerintahan yang baik maka diperlukan prinsip –prinsip good governance sebagai tolak ukur kinerja suatu pemerintahan. menurut (Rosidi, 2010) baik buruknya pemerintahan bisa dinilai dengan semua unsur prinsip-prinsip good governance. Prinsip-prinsip good governance yaitu, Partisipasi masyarakat (Participation), Penerapan Hukum, Transparansi, Daya Tanggap, Berorientasi Konsensus, Keadilan, Efektifitas dan Efisiensi , Akuntabilitas, dan Visi Strategis.

Pada penelitian ini telah dilakukan pengukuran atas penerapan Good Governance Di Wilayah Desa Pada Kabupaten Langkat dimana pengukuran tersebut dilakukan atas pencapaian pelaksanaan prinsip-prinsip dari Good Governance.

Hasil pengujian deskriptif menunjukkan penerapan Good Governance di desa-desa dalam wilayah Kabupaten Langkat telah terlaksana dengan baik. Namun capaian tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Hal ini terlihat dari hasil pengujian deskriptif terhadap prinsip-prinsip dalam penerapan Good Governance, dari keseluruhan prinsip-prinsip pelaksanaan Good Governanse diperoleh nilai deskriptif data sebesar 3,87. Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan, perolehan tersebut termaksud dalam kategori baik. Namun hasil tersebut belum menunjukkan nilai yang optimal. Dengan demikian masih terdapat hambatan hamatan dalam penerapan dan pelaksanaan good governance di wilayah pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat.



. Terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap penerapan dan pelaksanaan Good Governance dalam suatu wilayah. Seperti yang dijelaskan oleh (Yuanida, 2010) dalam pelaksanaan tugas (task) pencapaian good governance dengan baik, ada beberapa faktor dan syarat yang mempengaruhi penerapan good governance, yaitu, Faktor Manusia Pelaksana, Faktor Partisipasi Masyarakat, Faktor Keuangan Daerah, Faktor Peralatan, Faktor Organisasi dan Manajemen.

### **5.2.1 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Good Governance**

Hasil analisis data tentang Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Good Governance diperoleh nilai P-Values (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi Good Governance.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Good Governance memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,243 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat mempengaruhi pelaksanaan Good Governance sebesar 24,3%.

Selain itu hasil analisis data yang dilakukan juga menunjukkan dominan terbesar dari kompetensi sumber daya manusia dalam mempengaruhi good governance yaitu pada indikator nilai dan sikap dimana diperoleh nilai loading factor sebesar 0,949. Kemudian dominan terkecil dari kompetensi sumber daya manusia dalam mempengaruhi good governance terdapat pada indikator kemampuan dengan perolehan nilai loading factor sebesar 0,935.

Dengan demikian dari hasil analisis data yang dilakukan diketahui bahwa dalam pelaksanaan dan pencapaian good governace dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dimana peningkatan tersebut lebih utamanya dengan memperbaiki nilai dan sikap sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa di Kabupaten Langkat.

Kemudian pada penelitian ini dilakukan juga pengujian deskriptif terhadap Kompetensi sumber daya manusia. Sumber Daya Manusia dapat dikatakan berkompeten apabila telah terpenuhinya unsure-unsur maupun prinsip-prinsip dalam pembentukan kualitas sumber daya manusia yang baik. Menurut Sutrisno (2011:204) prinsip-prinsip sumber daya manusia yang berkualitas adalah, Pengetahuan, Pemahaman, Kemampuan dan Keterampilan, Nilai, Sikap, dan Minat.

Dari hasil pengujian deskriptif yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa Sumber Daya Manusia di wilayah Pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat belum sepenuhnya berkompeten. Hal ini terlihat dari hasil pengujian deskriptif yang di dasari atas prinsip-prinsip Kompetensi Sumber Daya Manusia diperoleh nilai deskriptif data sebesar 3,40. Berdasarkan skala pengukuran yang digunakan perolehan nilai tersebut termaksud dalam kategori sedang.

Ketidak tercapaian Sumber Daya Manusia yang berkompeten tersebut terjadi akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan dari sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa di kabupaten langkat dalam menjalankan keajiban atau tugas tugas yang dibebankan. Perolehan nilai deskripti terhadap pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan dari Sumber Daya Manusia adalah sebesar 3,40 dan 3,33. Kemudian kemampuan dari sumber

daya manusia di lingkungan pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat juga menunjukkan hasil pengujian deskriptif sebesar 3,34 dan 3,33 terkait adanya pelaksanaan pelatihan dan penugasan sesuai dengan kemampuan sumber daya manusia dimana berdasarkan skala perolehan tersebut termaksud dalam kategori sedang. Dengan demikian atas kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan dari sumber daya manusia mengakibatkan tidak terciptanya Kompetensi Sumber Daya Manusia yang optimal di wilayah Pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh oleh (Ardiyanti & Supriadi, 2016); (Pituringih, Asmony, & Basuki, 2020) menunjukkan hasil bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh yang positif terhadap implementasi *Good Governance*.

### **5.2.2 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Good Governance**

Hasil analisis data tentang Teknologi Informasi terhadap Good Governance diperoleh nilai P-Values (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi mempengaruhi Good Governance. Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Good Governance memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,247 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dapat mempengaruhi pelaksanaan Good Governance sebesar 24,7%.

Hasil analisis data yang dilakukan juga menunjukkan dominan terbesar dari Teknologi Informasi dalam mempengaruhi good governance yaitu pada indikator produktifitas dimana diperoleh nilai loading factor sebesar 0,965. Kemudian dominan terkecil dari kompetensi sumber daya manusia dalam

mempengaruhi good governace terdapat pada indicator manfaat dengan perolehan nilai loading factor sebesar 0,942.

Dari hasil pengujian dan perolehan nilai tersebut diketahui dalam pelaksanaan pencapaian good governace di lingkungan Pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat dapat dilakukan dengan meningkatkan produktifitas teknologi informasi. Penggunaan Teknologi informasi yang poduktif akan memberikan hasil dimana kegiatan pemerintah akan berjalan dengan efektif dan efisien.

Kemudian hasi pengujian deskriptif yang dilakukan pada variabel Teknologi Informasi menunjukkan hasil perolehan nilai sebesar 3,31. Dari hasil pengujian deskriptif ditemukan bahwa ketidak optimalnya penggunaan Teknologi Informasi disebabkan rendahnya pemamanfaatan, produktifitas dan pengembangan pada pengaplikasian teknologi informasi tersebut. Dari hasil pegujian deskriptif, di temukan bahwa pemamfaatan dan penyesuaian dengan kebutuhan, teknologi informasi diperoleh nilai deskripti sebesar 3,29 yang termaksud dalam kategori sedang. Dengan demikian masih terdapat hambatan dalam penggaan Teknologi Informasi pada Pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat.

Suatu teknologi informasi berguna untuk menyatakan catatan rinci dari aktivitas, misalnya menerima input dari keyboard, scanner, mic, dan sebagainya. Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi, pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubahan data kebentuk lain), analisis (analisis kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi. Sutarman (2012:18).

Menurut (Sutabri 2012) menyatakan bahwa “Suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambil keputusan. Dari penjelasan diatas dapat diperoleh pemahaman bahwa untuk mencapai prinsip-prinsip *Good Governance* tidak terlepas dari penggunaan teknologi informasi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan dilakukan oleh (Haura, Junita, & Meutia, 2019), diperoleh hasil bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mempengaruhi penerapan *Good Governance*.

Kemudian dikuatkan oleh Penelitian yang dilakukan Oleh (SURYANDARI, 2015) mengungkapkan bahwa teknologi informasi memberikan efek positif dan signifikan pada tata pemerintahan yang baik (*Good Governace*). Selain itu penelitian yang dilakukan oleh (Pituringih, Asmony, & Basuki, 2020) mengemukakan bahwa Teknologi informasi secara signifikan terhadap terhadap *good governance*.

### **5.2.3 Pengaruh Sistem Pengendalian intern Terhadap Good Governance**

Hasil analisis data tentang Sistem Pengendalian Intern terhadap *Good Governance* diperoleh nilai P-Values (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi mempengaruhi *Good Governance*.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Good Governance memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,366 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern dapat mempengaruhi pelaksanaan Good Governance sebesar 26,1%.

Has Hasil analisis data yang dilakukan juga menunjukkan nilai loading factor terbesar dari system pengendalian intern dalam mempengaruhi good governace yaitu sebesar 0.969 pada indicator kegiatan pengendalian. Kemudian nilai loading factor terkecil terdapat pada indicator penilaian resiko. Dengan demikian pelaksanaan pencapaian good governance di lingkungan pemerintahan desa di wilayah Kabupaten Langkat dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperbaiki kegiatan pengendalian pada system pengendalian intern pemerintahan Desa.

Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016).

Berjalan atau tidaknya suatu sistem pengendalian intern yang diterapkan suatu organisasi dapat dilihat dari pelaksanaan prinsip-prinsip sistem pengendalian intern. Sistem pengendalian intern yang optimal Menurut Indra Bastian (2011) pengendalian intern dalam peraturan pemerintah ini mencakup unsur sistem pengendalian intern yang telah dipraktikkan di lingkungan pemerintah di berbagai

negara, yang meliputi lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan.

Dari hasil pengujian deskriptif yang dilakukan, penerapan dan pelaksanaan unsure-unsur sistem pengendalian intern belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Hal ini terlihat dari perolehan nilai deskriptif data terkait unsur-unsur pelaksanaan system pengendalian intern menunjukkan perolehan nilai sebesar 3,31 yang termaksud dalam kategori rendah. Perolehan terendah terdapat pada unsur kegiatan pengendalian dengan perolehan nilai deskriptif sebesar 3,14 terkait pencatatan dan kokumen tasi data.

Hasil penelitian ini dikuatkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Ristanti, Sinarwati, & Sujana, 2014) bahwa Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap Penerapan Good Governance. Hasil serupa dikemukakan oleh (Prabawa, Karamoy, & Mawikere, 2015) bahwa penerapan sistem pengendalian intern berpengaruh positif dan signifikan terhadap upaya mewujudkan good governance.

#### **5.2.4 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Good Governance**

Hasil analisis data tentang Komitmen Organisasi terhadap Good Governance diperoleh nilai P-Values (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Komitmen Organisasi mempengaruhi Good Governance.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Good Governance memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,230 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern dapat mempengaruhi pelaksanaan Good Governance sebesar 23,%.

Analisis data yang dilakukan juga menunjukkan hasil nilai loading factor yang paling dominan dari komitmen organisasi dalam mempengaruhi good governance yaitu pada indikator komitmen afektif dengan perolehan nilai loading factor sebesar 0.960. Kemudian nilai loading factor terkecil dari komitmen organisasi dalam mempengaruhi good governance terdapat pada indikator normative dengan perolehan nilai loading factor sebesar 0.952. Berdasarkan perolehan tersebut dapat diketahui dengan adanya rasa keterlibatan dalam diri para aparatur desa dalam melaksanakan pencapaian tujuan akan memberikan dampak yang baik dalam pencapaian good governance.

Komitmen organisasi adalah keadaan psikologis seorang dalam memberikan keyakinan, kepercayaan dan kepatuhan dengan sikap profesional guna mencapai tujuan dan nilai-nilai organisasi, kemauan yang kuat untuk mempengaruhi demi organisasi dan tingkat sampai sejauh mana ia mampu memotivasi setiap anggota organisasi.

Dalam suatu lingkungan organisasi, seorang karyawan ataupun pegawai dapat dikatakan memiliki komitmen yang baik apabila dalam diri seseorang tersebut telah terdapat prinsip-prinsip komitmen organisasi. Prinsip-prinsip komitmen organisasi yang baik yaitu, Komitmen afektif (*Affective Commitment*), komitmen berkelanjutan (*Continuance Commitment*), dan komitmen normatif (*Normative Commitment*). Prinsip-prinsip komitmen organisasi tersebut dapat digunakan sebagai alat pengukuran atas komitmen dari seorang pegawai. Seorang aparatur pemerintah daerah yang berkerja dalam suatu organisasi harus memiliki komitmen dalam menjalankan tugasnya.



Dari hasil pengujian deskriptif yang dilakukan, diperoleh nilai rata-rata deskriptif data atas komitmen organisasi dari aparatur Desa di Kabupaten Langkat sebesar 3,30. Perlehan tersebut termaksud dalam kategori sedang. Rendahnya komitmen organisasi dari aparatur Desa juga dapat dilihat dari hasil deskriptif data atas prinsip komitmen kontinew dimana keinginan untuk tetap bertahan pada organisasi diperoleh nilai deskriptif sebesar 3,22 yang termaksud dalam kategori sedang. Selain itu pada komitmen normative juga diperoleh deskriptif data sebesar 3,24 yang termaksud dalam kategori sedang. Dengan demikian atas ketidak terpenuhinya prinsip-prinsip tersebut komitmen organisasi aparatur Desa tidak terbentuk. Hal ini berdampak pada penerapan dan pelaksanaan Good Governance dimana pencapaian visi-misi pemerintahan tidak dapat dilaksanakan dengan optimal.

Menurut (yuanida 2010) Organisasi dan Manajemen mempengaruhi pelaksanaan good governance karena organisasi dan manajemen meliputi fungsi manajemen yaitu POAC (Planning, Organizing, Actuating, and Controlling). Diperlukan adanya komitmen organisasi dan manajemen yang baik, agar good government governance dapat terwujud.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ristanti, Sinarwati, & Sujana, 2014) menunjukkan hasil bahwa Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Penerapan Good Governance. Hasil serupa juga di kemukakan oleh (Haura, Junita, & Meutia, 2019) Komitmen Organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Good Governance.

### **5.2.5 Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan Terhadap Good Governance**

Hasil analisis data tentang Kualitas laporan Keuangan terhadap Good Governance diperoleh nilai P-Values (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kualitas laporan Keuangan mempengaruhi Good Governance.

Pengaruh Kualitas laporan Keuangan terhadap Good Governance memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,304 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas laporan Keuangan dapat mempengaruhi pelaksanaan Good Governance sebesar 30,4%.

Dari hasil analisis data yang telah dilakukan diperoleh hasil diperoleh nilai loading factor paling dominan dari kualitas laporan keuangan dalam mempengaruhi good governance sebesar 0.925 pada indikator relevansi dimana hasil pelaporan keuangan dapat memberikan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya. Kemudian hasil analisis data dengan nilai loading factor terkecil terdapat pada indikator aksesibilitas laporan keuangan dengan perolehan nilai sebesar 0.917. Dengan demikian diketahui dalam pencapaian pelaksanaan good governace bergantung erat pada tercapaian penerapan pelaporan keuangan yang relevan.

Kemudian hasil pengujian deskriptif yang dilakukan terhadap kualitas laporan keuangan diperoleh rata-rata nilai deskriptif data sebesar 4,12. Berdasarkan skala pengukuran perolehan nilai tersebut termaksud dalam kategori Baik. Dengan demikian Kualitas laporan keuangan yang ada pada Desa-Desa di wilayah kabupaten langkat telah memadai, namun hasil tersebut belum tercapai secara optimal. Ketidak optimalan tersebut disebabkan oleh kelengkapan

dokumen pelaporan keuangan. Hasil pengujian deskriptif menunjukkan kelengkapan dokumen pelaporan keuangan adalah sebesar 3.14 yang termasuk dalam kategori sedang. kelengkapan dokumen pelaporan keuangan yang tidak terpenuhi berdampak pada pencapaian penerapan transparansi pemerintahan dalam membentuk tatakelola pemerintahan yang baik (*Good Governace*).

Menurut (Chabib dan Rohcmansjah 2010), salah satu prinsip pelaporan keuangan adalah transparansi. Dimana prinsip tersebut juga terdapat pada penerapan dan pelaksanaan Good Governance. Transparansi dibangun untuk memberikan informasi secara bebas dan jelas. Seluruh proses yang terjadi di Pemerintahan harus dapat secara mudah diakses oleh masyarakat dan mudah dimengerti.

Menurut (Harahap 2013), bahwa :“Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Haura, Junita, & Meutia, 2019), diperoleh hasil bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dapat mempengaruhi penerapan Good Governance.

#### **5.2.6 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis data tentang Kompetensi Sumber Daya manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan diperoleh nilai P-Values (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi Kualitas laporan Keuangan.

Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,366 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa Kompetensi Sumber Daya Manusia dapat mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan sebesar 33,6%.

Dari hasil analisis dating yang dilakukan diperoleh hasil paling dominan terbesar dari kompetensi sumber daya manusia dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan dengan nilai loading factor sebesar 0,948 pada indikator kemampuan dimana dalam mencapai kualitas pelaporan keuangan bergantung pada adanya pemberian dan pelaksanaan tugas yang didasari dengan kesesuaian kemampuan dari Sumber Daya Manusia. Kemudian nilai loading factor terkecil terdapat pada indikator kemampuan dengan perolehan nilai sebesar 0.928 dimana dengan adanya pelatihan kepada sumber daya manusia. Dengan demikian pemberian pelatihan dan tugas sesuai dengan keahlian dari sumber daya manusia berdampak erat pada tercapainya kualitas pelaporan keuangan.

Menurut Harahap (2013:146), mengemukakan bahwa :“Kualitas laporan keuangan merupakan kriteria persyaratan laporan akuntansi keuangan yang dianggap dapat memenuhi keinginan para pemakai atau pembaca laporan keuangan. Kemudian Rasdianto (2013:21), juga mengemukakan bahwa kualitas laporan keuangan pemerintah daerah adalah suatu hasil dari proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dari transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas akuntansi yang ada dalam suatu pemerintah daerah yang dijadikan sebagai informasi dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan keuangan entitas akuntansi dan pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak yang memerlukannya.

Menurut (Setyowati 2014) salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan adalah Kompetensi sumber daya manusia. Pendapat ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Loli Efendi, Darwanis, Syukriy Abdullah 2017) dalam penelitiannya mengemukakan faktor –faktor yang mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan pemerintah adalah kualitas aparatur sumber daya mausia.

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Sumber daya manusia yang berkualitas dapat dilihat dari pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki dari sumber daya tersebut, kemudian kemampuan, sikap dan minat. Hasil pengujian deskriptif yang dilakukan sebelumnya menunjukkan prinsip-prinsip tersebut belum sepenuhnya dimiliki aparatur Desa di Kabupaten Langkat. Hal ini terlihat dari pengetahuan dan pemahaman dari sumber daya manusia dimana hasil pengujian deskriptif diperoleh nilai sebesar 3,38 yang termaksud dalam kategori sedang. Selain itu, kemapuan dari sumber daya manusia juga diperoleh nilai deskriptif sebesar 3,33 yang termaksud dalam kategori sedang atas pelaksanaan tugas yang sesuai dengan kemampuan.

Rendahnya kompetensi sumber daya manusia yang terjadi akan berdampak pada relevansi dan keandalan dari laporan keuangan yang dihasilkan. Dimana akibat kurangnya pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan sumber daya manusia ketepatan pelaporan keuangan tidak tercapai.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh dilakukan oleh (Wiguna, Yuniarta, & Prayudi, 2017), menunjukkan hasil bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas penggunaan siskeudes. Selain itu penelitian yang dilakukan oleh

(Wardani & Andriyani, 2017) juga menunjukkan hasil bahwa Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa.

### **5.2.7 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis data tentang Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan diperoleh nilai P-Values (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Teknologi Informasi mempengaruhi Kualitas laporan Keuangan.

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,294 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa Teknologi Informasi dapat mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan sebesar 29,4%.

Hasil analisis data dari pengaruh teknologi informasi terhadap kualitas pelaporan keuangan diperoleh nilai loading faktor paling dominan sebesar 0.965 pada indikator produktifitas. Kemudian nilai loading factor terkecil terdapat pada indikator manfaat sebesar 0.942. Dengan demikian kualitas pelaporan keuangan yang baik bergantung pada produktifitas teknologi Informasi yang efektif dan efisien.

Dalam penyusunan pelaporan keuangan yang berkualitas, laporan keuangan tersebut harus memenuhi prinsip prinsip pelaporan berupa relevan, andal, lengkap, dapat dipahami dan dibandingkan serta aksesibilitas yang baik (Putra, 2013). Prinsip prinsip tersebut akan dapat tercapai dengan adanya dukungan dari penggunaan teknologi informasi yang baik. Namun di wilayah Desa di Kabupaten

Langkat, Penggunaan teknologi informasi yang optimal belum terlaksana sepenuhnya.

Terkait penggunaan dari Teknologi Informasi atas pelaksanaan pelaporan keuangan dapat dilihat dari pencapaian produktifitas dari teknologi informasi tersebut. Hasil pengujian deskriptif yang telah dilakukan diperoleh nilai deskriptif sebesar 3,29 terkaid produktifitas dari teknologi informasi. Berdasarkan skala pengukuran perolehan nilai tersebut termaksud dalam kategori baik. ,namun hasil tersebut belum sepenuhnya terlaksana dengan optimal. Dengan demikian kurangnya produktifitas Teknologi informasi yang digunakan relevansi dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan tidak tercapai.

Dengan demikian hal tersebut mempengaruhi pelaksanaan pelaporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Pituringsih, Asmony, & Basuki, 2020) menyatakan Teknologi informasi secara signifikan terhadap pengelolaan keuangan serta pengelolaan keuangan berpengaruh secara signifikan terhadap good governance.

### **5.2.8 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis data tentang Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan diperoleh nilai P-Values (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi Kualitas laporan Keuangan.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,244 (positif). Hal ini

menunjukkan bahwa Sistem Pengendalian Intern dapat mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan sebesar 24,4%.

Hasil analisis data yang dilakukan juga menunjukkan hasil paling dominan dari system pengendalian intern terhadap kualitas pelaporan keuangan dengan perolehan nilai loading factor terbesar pada indikator kegiatan pengendalian sebesar 0.969. Kemudian nilai loading factor terkecil terdapat pada indikator penilaian resiko dengan perolehan nilai loading factor sebesar 0.943. Dari hasil analisis tersebut diketahui factor paling dominan dari system pengendalian internal dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan terdapat pada indikator kegiatan pengendalian dimana dengan adanya pencatatan dokumen yang lengkap dan akurat.

Didalam pelaporan keuangan, diperlukan adanya suatu pengawasan agar prinsip-prinsip pelaksanaan pelaporan keuangan dapat tercapai dan terciptanya kualitas laporan keuangan yang baik. Sistem pengendalian intern merupakan proses (eksekutif) dan jajarannya untuk memberikan jaminan atau keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (Mahmudi, 2016: 20).

Namun dari hasil pengujian yang dilakukan pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern pada pemerintahan Desa di Kabupaten Langkat belum optimal. Ketidak optimalan system pengendalian intern tersebut dapat terlihat pada unsur kegiatan pengendalian dengan perolehan nilai deskriptif sebesar 3,14 yang termasuk dalam kategori sedang atas adanya mekanisme review kinerja. Hal



tersebut menyebabkan kualitas dari pelaporan keuangan tidak memberikan hasil yang sesuai dengan kebutuhan.

Menurut Setyowati (2014), Mengemukakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah pengendalian internal, atau faktor internal. Sistem Pengendalian Intern membantu organisasi dalam mencapai tujuannya dengan menerapkan pendekatan yang sistematis dan berdisiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas proses pengelolaan risiko kecukupan kontrol dan pengelolaan organisasi Setyowati (2014).

Hasil Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Wardani & Andriyani, 2017) Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan.

### **5.2.9 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis data tentang Komitmen organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan diperoleh nilai P-Values (0,019) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Komitmen organisasi mempengaruhi Kualitas laporan Keuangan.

Pengaruh Komitmen organisasi terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,165 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa Komitmen organisasi dapat mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan sebesar 16,5%.

Hasil analisis data dari komitmen organisasi dalam mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan juga diperoleh nilai loading factor paling dominan yang terdapat pada indikator komitmen kontinew sebesar 0.968. Kemudian nilai loading

factor terkecil yaitu sebesar 0.952 pada indicator normative. Dengan demikian dalam mewujudkan kualitas pelaporan keuangan yang baik bergantung erat pada komitmen pada diri aparatur pegawai dimana adanya keinginan untuk tetap bertahan pada organisasi.

Keterkaitan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan dapat kita lihat dari karakteristik komitmen organisasi. menurut (Kharis 2010) salah satu karakteristik seseorang telah memiliki komitmen organisasi yang baik adalah adanya kemauan. Kemauan merupakan rasa peduli atau bersedianya seorang karyawan dalam memegang komitmen dalam sebuah organisasi. Kemauan itu timbul bisa dilatar belakangi seperti rasa cinta mereka terhadap organisasi, teman sepekerjaan ataupun faktor lain yang mendukung karyawan tersebut untuk berkomitmen dalam pencapaian tujuan organisasi (Kharis 2010).

Dari hasil pengujian deskriptif diketahui bahwa komitmen afektif yang mencerminkan adanya keterlibatan dalam pencapaian tujuan organisasi sebesar 3,35. Perolehan tersebut belum menunjukkan hasil yang optimal, dimana keterlibatan anggota organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi tidak terlaksana dengan baik. Kurangnya keterlibatan anggota organisasi dalam pencapaian tujuan organisasi berdampak pada kualitas pelaporan keuangan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Astini, Fauzi, & Widowati, 2019) komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan.

### **5.2.10 Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Good Governance yang di mediasi Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis data pengaruh tidak langsung Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Good Governace yang di mediasi oleh Kualitas Pelaporan Keuangan diperoleh nilai P-Values (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga  $H_0$  ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kualitas pelaporan Keuangan dapat memediasi pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Good Governance.

Pengaruh tidak Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Good Governance yang di mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,111 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan memediasi Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia Terhadap Good Governance sebesar 11,1%.

Dari hasil pengujian deskriptif diketahui bahwa pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia (aparatur Desa) termaksud dalam kategori sedang yaitu sebesar 3,40, dan 3,38 serta kemampuan dari sumberdaya manusia sebesar 3,33. Hal ini berdampak pada pencapaian efektifitas dan efisiensi serta pencapaian visi-misi organisasi yang tidak terlaksana dengan optimal.

Selain itu pengetahuan dan pemahaman serta kemampuan Sumber daya manusia juga berdampak relevansi dan keandalan kualitas laporan keuangan yang tidak terpenuhi. Pada pelaksanaan dan penerapannya salah satu unsur dalam pembentukan Good governance adalah transparansi. Ketidak terciptanya relevansi dan keandalan pelaporan keuangan mengakibatkan ketransparansian dalam pelaksanaan good governace tidak terlaksana.

### **5.2.11 Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Good Governance yang dimediasi Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis data pengaruh tidak langsung Teknologi Informasi terhadap Good Governace yang di mediasi oleh Kualitas Pelaporan Keuangan diperoleh nilai P-Values (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga H0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kualitas pelaporan Keuangan dapat memediasi pengaruh Teknologi Informasi terhadap Good Governance.

Pengaruh Teknologi Informasi terhadap Good Governance yang di mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,089 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan memediasi Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Good Governance sebesar 8,9%

Dari hasil pengujian deskriptif yang dilakukan diketahui bahwa penggunaan teknoli informasi di lingkungan pemerintahan desa belum sepenuhnya terlaksana dengan baik dimana pada pelaksanaannya produktifitas dari teknologi informasi memperoleh nilai deskriptif data sebesar 3,29. Yang termkasud dalam kategori sedang. Hal ini bedampak pada kelengkapan pelaporan keuangan yang tidak terpenuhi. Selain itu secara tidak langsung kurangnya produktifitas teknologi informasi untuk menciptakan kualitas laporan keuangan berpengaruh pada pelaksanaan good governance yang tidak tercapai.

### **5.2.12 Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Good Governance yang di mediasi Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis data pengaruh tidak langsung Sistem Pengendalian Intern terhadap Good Governace yang di mediasi oleh Kualitas Pelaporan Keuangan diperoleh nilai P-Values (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga H0 ditolak. Hal

ini dapat disimpulkan bahwa Kualitas pelaporan Keuangan dapat memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Good Governance.

Pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Good Governance yang di mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,074 (positif). Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan memediasi Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Good Governance sebesar 7,4%.

Dari hasil pengujian deskripti diketahui bahwa system pengendalian intern di lingkungan pemerintahan desa kabupaten langkat tidak terlaksana dengan optimal dengan perolehan nilai deskriptif sebesar 3,14 yang tergolong dalam kategori sedang pada kegiatan pengendalian.

Rendahnya kegiatan pengendalian dalam pelaksanaan system pengendalian intren berdampak pada relevansi dan keandalan laporan keuanganyang tidak terlaksana dengan baik. Hal ini juga sevara tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan dan pencapaian good governance dimana efektifitas dan efisiensi serta pencapaian visi misi dan tujuan organisasi tidak terlaksana.

### **5.2.13 Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Good Governance yang di mediasi Kualitas Laporan Keuangan**

Hasil analisis data pengaruh tidak langsung Komitmen Organisasi terhadap Good Governace yang di mediasi oleh Kualitas Pelaporan Keuangan diperoleh nilai P-Values (0,000) lebih kecil dari  $\alpha$  (0.05) sehingga H0 ditolak. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Kualitas pelaporan Keuangan dapat memediasi pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Good Governance.

Pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Good Governance yang di mediasi Kualitas Pelaporan Keuangan memiliki nilai koefisien jalur sebesar 0,050

(positif). Hal ini menunjukkan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan memediasi Pengaruh Komitmen Organisasi Terhadap Good Governance sebesar 5, %.

Komitmen organisasi yang dimiliki aparat desa di wilayah kabupaten Langkat belum mencerminkan komitmen organisasi memadai. Hal ini terlihat dari pencapaian unsur-unsur pembentuk komitmen dimana pada komitmen kontinew diperoleh deskriptif data sebesar 3,22 yang termasuk dalam kategori sedang.

Kurangnya komitmen kontinew yang mencerminkan tanggung jawab dan keterlibatan dalam pencapaian tujuan organisasi mengakibatkan relevansi laporan keuangan tidak tercapai. Hal ini juga secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dimana pencapaian visi misi dan tujuan tidak terpenuhi.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

1. Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi Good Governance
2. Teknologi Informasi mempengaruhi Good Governance
3. Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi Good Governance
4. Komitmen Organisasi mempengaruhi Good Governance
5. Kualitas Pelaporan Keuangan Mempengaruhi Good Governance
6. Kompetensi Sumber Daya Manusia mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan
7. Teknologi Informasi mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan
8. Sistem Pengendalian Intern mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan
9. Komitem Organisasi mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan
10. Kualitas Pelaporan Keuangan memediasi pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia terhadap Good Governance
11. Kualitas Pelaporan Keuangan memediasi pengaruh Teknologi Informasi terhadap Good Governance
12. Kualitas Pelaporan Keuangan memediasi pengaruh Sistem Pengendalian Intern terhadap Good Governance
13. Kualitas Pelaporan Keuangan memediasi pengaruh Komitmen Organisasi terhadap Good Governance

## 5.2 Saran

1. Diharapkan kepada pemerintahan Desa di wilayah kabupaten Langkat agar memberikan pelatihan kepada Sumber Daya Manusia yang dimiliki untuk meningkatkan pengetahuan, dan kemampuan Sumber Daya Manusia di wilayah pemerintahan Desa.
2. Diharapkan kepada pemerintahan Desa di wilayah kabupaten Langkat agar lebih mengoptimalkan dan melakukan pengembangan atas penggunaan Teknologi Informasi guna mendukung pencapaian tujuan Organisasi.
3. Diharapkan kepada pemerintahan Desa di wilayah kabupaten Langkat agar meningkatkan pengawasan dan pemantauan aktifitas kegiatan pemerintahan Desa.
4. Diharapkan kepada pemerintahan Desa di wilayah kabupaten Langkat untuk memberikan motivasi agar minat dan loyalitas dari aparatur pemerintahan desa semakin menjadi lebih baik
5. Diharapkan kepada pemerintahan Desa di wilayah kabupaten Langkat agar meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaporan keuangan.
6. Diharapkan kepada masyarakat Desa di wilayah Pemerintahan Kabupaten Langkat untuk meningkatkan partisipasi dalam melakukan pengawasan dan keterlibatan atas kegiatan pemerintahan desa.
7. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi. Diharapkan untuk lebih menyesuaikan penggunaan indikator-indikator pengukuran yang digunakan sehingga pembuktian terhadap hipotesis penelitian dapat tercapai dan hasil penelitian lebih sempurna.



## DAFTAR PUSTAKA

- Adha, W. (2014). Pengaruh Akuntabilitas, Ketidakpastian Lingkungan, dan Komitmen Pimpinan Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris pada SKPD Kota Dumai). *Jom Fekon*, 1(2).
- Adhi, D. K., & Suhardjo, Y. (2013). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kualitas Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Tual). *Jurnal STIE Semarang*, 5(3), 93-111.
- Adrianto, N. (2007). *Transparansi dan Akuntabilitas Publik melalui e-Government*. Palangkaraya: Bayumedia.
- Afiah, N. N. (2009). *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Agus, S. (2010). *Auditing (Pemeriksaan Akuntan) oleh Kantor Akuntan Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Anjarwati, M. (2012). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. *Accounting Analysis Journal*, 2, 1-7.
- Apriliani, N. K., Sujana, E., & Yuniarta, G. A. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, Karakteristik Kualitatif, Dan Aksesibilitas Terhadap Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung). *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 3(1).
- Ardiyanti, A., & Supriadi, Y. N. (2016). Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 8(1), 1-15.
- Arifian, D., & Bowo, F. A. (2014). Analisis Economic Value Added Return on Asset (ROA) Pada Kinerja Perusahaan Terbuka. *Jurnal Studia Akuntansi dan Bisnis*, 2(1), 2337-6112.
- Arifin, B. (2012). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi Dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi & Investasi*, 13(1), 15-27.
- Arifin, S. (2012). *Leadership Ilmu dan Seni Kepemimpinan*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

- Astini, Y., Fauzi, A. K., & Widowati. (2019). Determinan Yang Mempengaruhi Keberhasilan Pengelolaan Keuangan Desa. *Valid Jurnal Ilmiah*, 16(1), 29-47.
- Atmosudirjo, S. P. (2012). *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Azhar, S. (2007). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: T. Lingga Jaya.
- Aziz, M. A. (2016, November). Pengaruh motivasi kerja, disiplin kerja dan lingkungan kerja terhadap kinerja melalui kepuasan kerja pada pegawai Puskesmas Kecamatan Balapulang Kabupaten Tegal. *Jurnal Manajemen*, 1(1), 99-108.
- Badriah, M. (2015). *Manajemen Sumber Daya manusia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Baird, K., & Wang, H. (2010). Employee empowerment: extent of adoption and influential factors. *Personnel Review*, 39(5), 574-599.
- Bangun, W. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Erlangga.
- Bangun, W. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Baridwan, Z. (2013). *Sistem Informasi Akuntansi, edisi kedua*. Yogyakarta: BPFE.
- Bastian, I. (2010). *Akuntansi Sektor Publik Suatu Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Bastian, I. (2013). *Sistem Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boyatzis, R. E. (2008). Competencies in The 21st Century. *Journal of Management Development*, 27(1), 5-12.
- Cenik, A., & Hendro, L. (2016). *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Chien, M. (2004). An Investigation of The Relationship of Organizational Structure, Employee's Personality and Organizational Citizenship Behavior. *Jurnal of American Academy of Business*.
- Cintia, E., & Gilang, A. (2016, April). Pengaruh lingkungan kerja fisik dan nonfisik terhadap kinerja karyawan pada KPPN Bandung I. *Jurnal Sositologi*, 15(1), 136-154.
- Daft. (2010). *Era Baru Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Defitri, S. Y. (2018). Pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Benefita*, 3(1), 64-75.

- Delti. (2015). Pengaruh kepemimpinan terhadap kinerja karyawan pada PT. Trubaindo Coal Mining Di Kabupaten Kutai Barat. *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 3(2), 495-506.
- Dewi, N. L., & Utama, I. W. (2016). Pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan melalui mediasi motivasi kerja pada Karya Mas Art Gallery. *Jurnal Manajemen Unud*, 5(9), 5494-5523.
- Dewi, N. W., Sujana, D. E., & Sinarwati, N. K. (2015). Pengaruh Tekanan Eksternal, Faktor Politik, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 1(3).
- Dita, Ambara, M., & Putra., I. W. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Integritas Karyawan sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 15(1), 2302-8556.
- Djaelani, Y., & Subhan. (2019). Moderasi Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Manajerial Di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Akun Nabelo*, 2, 31-43.
- Djaelani, Y., & Subhan. (2019). Moderasi Komitmen Organisasi Terhadap Hubungan Antara Partisipasi Anggaran Dengan Kinerja Manajerial Di Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Akuntansi Netral, Akuntabel, Objektif*, 1(2), 31-43.
- Djarmiko, & Hayati, Y. (2003). *Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Dwiyanto, A. (2008). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Efendi, L., Darwanis, & Abdullah, S. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelaporan Keuangan Daerah. *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam*, 3(2), 182-195.
- Efrizar, R., Wiguna, H., & Meilda. (2017). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Akuntabilitas Publik, Dan Sistem Pelaporan Terhadap Kinerja Manajerial. *JOM Fekon*, 4(1), 1762-1740.
- Elsye, R. (2016). *Dasar-dasar akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia indonesia.
- Emilda, I. (2014). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada SKPD Kab. Lima Puluh Kota). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*, 15(2), 1-20.
- Fadel, M. (2009). *Reinventing Local Government*. Jakarta: Kompas Gramedia.

- Fahmi, I. (2011). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Bandung: Alfabeta.
- FASB. (2001). *Statement of Financial Accounting Concepts No. 5. Recognition and Measurement in Financial Statements of Business Enterprises*. Connecticut: Stamford.
- Fauziyah, A. A. (2016). pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Opini Audit, dan Umur Perusahaan Terhadap Audit Delay. *Jurnal Nominal*, 5(1).
- Febriyana, W. (2015, Desember). Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. Kabepe Chakra. *Proceeding of Management*, 2(3), 29-54.
- Gibson, J. L. (2008). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Gibson, J. L. (2008). *Organisasi dan Manajemen*. Jakarta: Erlangga.
- Greenberg, J., & Baron, R. A. (2000). *Perilaku Organisasi (Edisi Revisi)*. Jakarta: Prentice Hall.
- Hahenussa, S. J. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Ambon. *Jurnal Unissula*.
- Halim, A. (2007). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halim, A., & Kusufi, S. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Halmawati, & Mustin. (2015). *enerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Dalam Perspektif Tekanan Eksternal Dan Komitmen Organisasi*. Seminar Nasional Ekonomi Manajemen dan Akuntansi : Universitas Negeri Padang.
- Handoko, T. H. (2011). *Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: BPFE.
- Hanim, M. (2016). Pengaruh stres kerja terhadap kepuasan kerja serta dampaknya pada kinerja karyawan Hull Construction Di PT. DOK Dan Perkapalan Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen*, 4(3), 1-10.
- Hansen, D. R., & Mowen, M. M. (2015). *Cost Management (Accounting & Control)*. Canada: Cengage Learning.
- Harahap, S. S. (2013). *Analisa Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hartono, B. (2013). *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hasibuan, M. (2014). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Haura, G. a., Junita, A., & Meutia, T. (2019). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (Spip), Pengelolaan Keuangan Daerah, Dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Terhadap Good Governance Dengan Komitmen Organisasi Sebagai. *JENSI*, 3(1), 33-52.
- Hidayat, T. (2015). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Struktur Desentralisasi dan Locus Ofcontrol Terhadap Kinerja Manajerial. *Akuntabilitas*, 8(2), 148-161.
- IAI, I. A. (2012). *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ihyaul, U., & Sofyani, H. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. Malang: Aditya Media.
- James, S. R., & Lambert, D. M. (2001). *Strategic Logistic Management*. Boston: McGraw-Hill.
- Jaya, K. Y., & Adnyani, A. D. (2015). Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap disiplin kerja pegawai di Dinas Balai Bahasa Provinsi Bali. *Jurnal Manajemen Unud*, 9(4), 2702-2721.
- Juliandi, A. (2018). *Structural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) Menggunakan SmartPLS*. Batam: Universitas Batam.
- Juliandi, A., Irfan, & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis: Konsep dan Aplikasi*. Medan: UMSU Press.
- Kadir, A., & Triwahyuni, T. C. (2013). *Pengantar Teknologi Informasi Edisi Revisi*. Yogyakarta: ANDI.
- Kartono, K. (2011). *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasfauzi, M. A., & Diyanto, M. R. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jom Fekon*, 3(1), 1520-1534.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kasmir. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia (Teori dan Praktik)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Kassa, E. L., Asnawi, M., & Pangayouw, B. (2019). Analisis Pengaruh Partisipasi Dan Peran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap

- Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Yalimo. *Jurnal Kajian Ekonomi & Keuangan Daerah*, 4(1), 15-32.
- Kharis, I. (2010). Pengaruh Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 3 Bandung. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 3(1).
- Kharis, I. (2010). Pengaruh Komitmen Organisasional dan Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Guru SMA Negeri 3 Bandung. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 3(1).
- Kooiman, J. (2003). *Governing as Governance*. London: Sage Publication.
- Kreitner, & Kinicki. (2017). *Perilaku Organisasi (Organizational Behavior)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kreitner, R., & Kinicki, A. (2014). *Organizational Behavioral* (5 ed.). Boston: McGraw-Hill.
- Krina. (2003). *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi dan Partisipasi*. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Kumorotomo, W. (2008). *Etika Administrasi Negara*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, A. (2005). *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Laksana, A. P., & Handayani, B. D. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengawasan Fungsional, Dan Pelaporan Kinerja Terhadap Akuntabilitas Publik Di Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*, 3(2), 177-186.
- LAN, & BPKP. (2003). *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta: Akip.
- Locke, E. A., & Latham, G. P. (2002). Building a Practically Useful Theory of Goal Setting and Task Motivation. *Academy of Management Review*, 13(1), 23-39.
- Lubis, N. K. (2017). aktor Faktor yang Mempengaruhi Transparansi Pelaporan Keuangan dan Pengaruhnya Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan. *Jurnal Penelitian Ekonom Akuntansi*, 1(2).
- Luthans, F. (2006). *Perilaku Organisasi*. Yogyakarta: Andi.
- M. R, F., & handayani, N. (2017). Pengaruh Penyajian dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.

- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahsun. (2006). *Pengukuran Kinerja Sektor Publik : Cetakan Pertama*. Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta.
- Mangkunegara, A. A. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mangkunegara, A. A. (2013). *Manajemen sumber daya manusia*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Mardiasmo. (2006). *Akuntabilitas Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Marjoni, Amir, A. M., & Kahar, A. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem Keuangan Daerah, Pengendalian Intern, dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Keuangan SKPD Kabupaten Sgi. *e Jurnal Katalogi*, 6(1), 63-74.
- Martoyo. (2000). *Kepemimpinan Yang Efektif*. Yogyakarta: UGM.
- Marwansyah. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Alfabeta.
- Masruroh, A. F. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Kota. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 7.
- Matthew, A. A. (2014). Participative Budgeting and Managerial Performance in the Nigerian Food Products Secto. *Global Journal of Contemporary Research in Accounting, Auditing and Business Ethics(GJCRA) An Online International Research Journal*, 1(3), 148-167.
- Medina, F. (2012). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Transparansi Informasi Keuangan Pada Situs Resmi Pemerintah Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Miftah, T. (2010). *Prilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Moorhead, G., & Griffin, R. W. (2013). *Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moorhead, G., & Griffin, R. W. (2013). *Perilaku organisasi: Manajemen Sumber Daya Manusia dan Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Moulana, F. (2017). Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 44(1), 178-185.
- Mowday, Porter, & Steers. (2009). *Employee-Organization Linkages*. Texas: South-Western Cengage Learning.

- Mowday, R. T., & Porter, L. (2000). The Measurement of Organizational Commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 224-247.
- Mulyadi. (2007). *Sistem Perencanaan dan Pengendalian Manajemen*. Jakarta: Salemba Empat.
- Munawir. (2014). *Analisis Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty.
- Mursyidi. (2013). *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Mustafa, A. I. (2012). Pengaruh Pengajian Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten Pemalang. *Jurnal Akuntansi*, 1(1).
- Mustopadidjaja, A. R. (2003). *Manajemen Proses Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi Dan Evaluasi Kinerja*. Jakarta: Duta Pertiwi Foundation.
- Nilawati, F. E. (2009). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Dengan Komitmen Organisasional Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada Dosen Universitas Dian Nuswantoro Semarang). *URNAL BISNIS*, 18(1), 130-139.
- Nitisemito, A. S. (2008). *Manajemen Personalia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nogi, H. (2005). *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana.
- Noor, J. (2013). *Penelitian Ilmu Manajemen, Tinjauan Filosofis dan Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Noor, J. (2015). *Analisis Data penelitian Ekonomi Dan Manajemen*. Jakarta: Grasindo.
- Noprizal, R. (2017). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Komitmen Manajemen, Dan Sistem Pengendalian Pemerintah Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). *Jom Fekon*, 4(1).
- Novianto, D. (2015). Pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kepuasan kerja PT Galang Kreasi Sempurna. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 5(6), 1-16.
- Panjaitan, I., & Shopiana. (2017). Pengaruh Karakteristik Tujuan Anggaran Dan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Tingkat Desentralisasi Sebagai Pemoderasi. *Jurnal Tata kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 3(1).
- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.



- Pasolong, H. (2010). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Pituringasih, E., Asmony, T., & Basuki, P. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Keuangan Usaha Kecil Menengah dan Implikasinya terhadap Good Governance. *E-Jurnal Akuntansi*, 30(8), 2152-2166.
- Prabawa, S., Karamoy, H., & Mawikere, L. (2015). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Dan Akuntabilitas Pengelolaan keuangan Daerah Terhadap Good Governance(Studi Empiris Di Kabupaten Minahasa). *Jurnal Riset Akuntansi*, 15(2), 2020.
- Pradita, K. D., Hartono, A., & Mustoffa, A. F. (2019). Pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 87-100.
- Pranata, V. M. (2019). Pengaruh Pengendalian Internal dan Komitmen Organisasi Terhadap Kualitas Pelaporan Keuangan (Survei pada Perusahaan Tekstil di Kota Bandung dan Sekitarnya). *JAFTA*, 1(1), 15-30.
- Pratama, I. B., & Sriathi, A. A. (2015). Pengaruh stres kerja dan pemberdayaan terhadap kepuasan kerja karyawan di Prama Hotel. *Jurnal Manajemen aaaaaaunud*, 4(11), 3566-3592.
- Priansa, D. J. (2014). *Perencanaan dan Pengembangan SDM*. Bandung: Alfabeta.
- Purnomo, H., & Cholil, M. (2010, Juni). Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja berdasarkan motivasi kerja pada Karyawan Administratif Di Universitas Sebelas Maret Surakarta. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia*, 4(1), 27-35.
- Putra, R. (2013). *Pengantar Akuntansi 1 Pendekatan Siklus Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Rahman, F., Nadirsyah, & Abdullah, S. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Sistem Informasi Akuntansi Dan Peran Manajerial Pengelola Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Tengah. *Jurnal Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(4), 12-22.
- Rahmawanti, N. P., Swasto, B., & Prasetya, A. (2014, Maret). Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 8(2), 1-9.
- Rai, I. G. (2008). *Audit Kinerja Pada Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rasdianto, E. (2013). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrual*. Medan: Brama Ardian.

- Ratifah, I., & Ridwan, M. (2012). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 11(1), 29-39.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: Upp Stim Ykp.
- Ratmono, D., & Sholihin, M. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Ricardo, R., & Wade, D. (2001). *Corporate Performance Management*. Boston: Butterworth Heinemann.
- Rico, A. S., Kennedy, & Rheny. (2014). Pengaruh Anggaran Berbasis Kinerja, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Penerapan Good Government terhadap Penilaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Studi Pemerintahan d. *Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Ridha, M., & Basuki, H. (2012). pengaruh Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan dan komitmen Manajemen terhadap Penerapan Transparansi Laporan Keuangan. *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin*, 20-23.
- Ristanti, N. M., Sinarwati, N. K., & Sujana, E. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Komitmen Organisasi terhadap Penerapan Good Governance. *e-Journal*, 2(1).
- Rivai, V. (2011). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, V., & Mulyadi, D. (2012). *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi Edisi Ketiga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rivai, V., & Sagala, E. J. (2009). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rizal, N. A., & Hermanto, S. B. (2019). Peran Komitmen Organisasi Memediasi Pengaruh Gaya Kepemimpinan Dan Kompetensi Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 8(1).
- Robbins, S. P. (2006). *Organizational Behavior*. New Jersey: Prentice-Hal.
- Robbins, S. P. (2008). *Perilaku Organisasi* (10 ed.). Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2013). *Organizational Behavior*. New Jersey: Person Education.
- Robbins, S. P., & Judge, T. A. (2015). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.

- Rochman, M. G. (2008). *Good Governance*. Yogyakarta: Andi.
- Rosidi, U. (2010). *Otonomi Daerah dan Desentralisasi*. Bandung: Pustaka Setia.
- Rosita, T. (2016). Pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan dengan komitmen organisasional sebagai variabel intervening. *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 5(1), 1-20.
- Ruky, A. S. (2011). *Sistem Manajemen Kinerja*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Sandi, Djumadi, & Alaydrus, A. (2016). Pengaruh lingkungan kerja fisik dan motivasi terhadap kepuasan kerja pegawai SMA Negeri 2 Sendawar. *Jurnal Administrative*, 4(2), 145-156.
- Sanjaya, S., & Sulindawati, N. L. (2014). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah Dan Aksesibilitas Terhadap Penggunaan Informasi Keuangan Daerah (Studi Pada satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buleleng). *E Jurnal*, 2(1), 1-12.
- Santoso, U. (2008). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dalam Mencegah Fraud. *Jurnal Administrasi Dan Bisnis*, 25(3).
- Sari, E. N. (2012). Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Efektivitas Penerapan Akuntansi Sektor Publik Serta Dampaknya Terhadap Good Governance. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 25-54.
- Sari, E. N., Muhyarsyah, & Wahyuni, N. S. (2020). Pemerintah Dan Ketersediaan Anggaran Terhadap Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerahpada Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kotase-Sumatera Utara. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 166-197.
- Schermerhorn, J. R. (2013). *Management*. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.
- Sedarmayanti. (2007). *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2009). *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2011). *Tata Kerja dan Produktifitas Kerja*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Sedarmayanti. (2012). *Good Governance*. Bandung: Mandar Maju.
- Setiawan, E. Y. (2015, Februari). Pengaruh gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap kinerja karyawan PT. ISS Indonesia Di Rumah Sakit Nasional Surabaya. *Jurnal Ilmu Manajemen Magistra*, 1(1), 31-41.

- Setyowati, L. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Semarang. *Proceedings SNEB*, 20(2), 179=191.
- Shende, S., & Bennet, T. (2004). *Transparency and Accountability in Public Financial Administration*. DESA.
- Sholeh, C., & Rochmansjah, H. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Sebuah Pendekatan Struktural Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik*. Bandung: Fokus Media.
- Siagian, P. S. (2010). In *Manajemen Sumber Daya Manusia* (p. 12). Jakarta: Bumi Aksara.
- Siagian, S. P. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siahaan, C. A. (2017). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Dengan Kepuasan Kerja Dan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *JOM Fekon* , 4(1), 1351-1363.
- Simanjuntak, P. (2011). *Manajemen dan Evaluasi Kerja*. Jakarta: Salemba.
- Simanjuntak, P. J. (2005). *Manajemen dan evaluasi kerja*. jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Simanungkalit, Y. M., & Setyaningsih, E. (2013). Pengaruh gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan pada PT. Lion Mentari Air Lines. *UG Jurnal*, 7(6), 30-33.
- Sinambella, L. P. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Siwambudi, I. G., Yasa, G. W., & Badera, I. D. (2017). Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi Pengaruh Kompetensi Sdm Dan Sistem Pengendalian Intern Pada Kualitas Laporan Keuangan. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 6(1), 385-416.
- Soetjipto, B. W. (2008). *Paradigma Baru Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Amara Book.
- Sopiah. (2008). *Perilaku Organisasional*. Yogyakarta: ANDI.
- Stock, J. R., & Lamber, D. M. (2001). *Strategic Logistics Management Fourth ed*. Singapura: McGraw-Hill Higher Education.
- Suarmika, G. L., & Suputra, D. G. (2016). Kemampuan Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Intern Memoderasi Pengaruh Kapasitas Sdm Dan Penerapan Sikd Pada Kualitas Lkpd Kabupaten Karangasem. *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, 5(9), 2921-2950.

- Subagyo, J. (2011). *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudaryono. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sudibyso, S. (2012). *Laporan Keuangan Daerah*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Sugijanto. (2002). Peranan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat Dalam Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Implikasi UU No. 22/25 Tahun 1999. *Lintas Ekonomi*, 19(1).
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian pendidikan (pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D)*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian administratif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhartono, E., & Solichin, M. (2006). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran Instansi Pemerintah Daerah Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. *Simposium Nasional Akuntansi*, 23-26.
- Sujarweni, W. (2014). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukarja, R., & Machasin. (2015, Mei). Pengaruh kepemimpinan dan komunikasi terhadap kepuasan kerja dan kinerja pegawai Dinas Pendidikan Provinsi Riau. *Jurnal Tepak Manajemen Bisnis*, 7(2), 270-284.
- Sulastri, Tanjung, A. R., & Febrina, S. (2010). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Sistem Informasi Akuntansi Pada Bank Umum Pemerintah Dikota Pekanbaru. *Jurnal Ekonomi*, 18(2), 121-132.
- Sumiyati. (2015). Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada SKPD Pemerintah Kabupaten Rokan Hilir). *Jom Fekom*, 2(2), 1-15.
- Sunyoto, D. (2008). *Perilaku Konsumen*. Yogyakarta: CAPS.
- Sunyoto, D. (2012). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: CAPS.
- Supriyadi, B. (2017). *Kebijakan Akuntansi Akrual Pemerintah Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

- SURYANDARI, E. (2015). Pengaruh Implementasi Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Total Quality management Terhadap Penerapan Good Governance di Lembaga Amil Zakat. *JURNAL AKUNTANSI & INVESTASI*, 16(2), 145-154.
- Sutabri, T. (2012). *Analisis Sistem Informasi*. Yogyakarta: Andi.
- Sutedi, A. (2011). *Good Corporate Governance*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sutrisno, E. (2016). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Kencana.
- Suwatno, Priansa, H. J., & Donni. (2011). *Manajemen SDM dalam Organisasi Publik dan Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Syarmenda, A. (2016). Pengaruh Akuntabilitas, Tekanan Eksternal, Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Indragiri Hulu). *Jom Fekon*, 3(1).
- Tampubolon, F. M., & Basid, A. (2019). Pengaruh Komitmen organisasi, Kompetensi Sumber Daya manusia Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap kualitas Laporan keuangan pemerintah Daerah. *Jurnal Kajian Pendidikan Ekonomi dan Ilmu Ekonomi*, 3(1), 55-65.
- Tanjung, A. H. (2011). *Akuntansi, Transparansi, dan Akuntabilitas Keuangan Publik*. Yogyakarta: Sebuah Tangan.
- Tua, M. B., & Taufik, a. (2015). Pengaruh Good Governance, Kompetensi Sumber Daya Manusia Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan. *JOM FEKON*, 2(2), 1-14.
- Tunggal, A. W. (2012). *Audit kecurangan dan akuntansi forensik*. Jakarta: Harvarindo.
- Utami, S. S., & Hartanto, A. (2010). Pengaruh kepemimpinan, motivasi, komunikasi dan lingkungan. *Jurnal Manajemen Sumberdaya Manusia*, 4(1), 58-67.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88-98.
- Wibowo. (2017). *Manajemen Kinerja*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Wibowo. (2017). *Manajemen sumber daya manusia*. Surabaya: CV R A De Rozarie.
- Wibowo, S. E. (2013). *Manajemen Kinerja*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Wibowo, S. E. (2014). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wiguna, M. D., Yuniarta, G. A., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pendidikan Dan Pelatihan, Serta Peran Pendamping Desa Terhadap Efektivitas Penggunaan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) (Studi Pada Desa Penerima Dana Desa Di Kabupaten Buleleng). *e-Jurnal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2).
- Wijaya, H. (2017, Februari). Pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja pegawai pada Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Banyuasin. *Jurnal Ecoment Global*, 2(1), 40-50.
- Winarno, B. (2002). *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Presindo.
- Wintari, K. A., & Suardana, K. A. (2018). Pengaruh Tekanan Eksternal, Pengendalian Internal, Ketidakpastian Lingkungan dan Komitmen Organisasi Pada Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 22(1), 1-27.
- Wiprastini, G. A., Sinarwati, N. K., & Herawati, N. T. (2014). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Desentralisasi Dan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Pemoderasi. (1, Ed.) *e-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2.
- Wirakusuma, I. M., Julianto, I. P., & Prayudi, M. A. (2017). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Good Governance, Dan Budaya Organisasi Terhadap Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (Bos) (Studi Empiris Pada Sekolah-Sekolah Di Kota Denpasar). *e-Journal*, 8(2).
- Wiratno, A., Ningsih, W., & Putri, N. K. (2016). Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Komitmen Organisasi, Motivasi dan Struktur Desentralisasi Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi*, 20(1), 150-166.
- Wirawan. (2009). *Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia Teori Aplikasi dan Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wirawan. (2013). *Kepemimpinan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Wirawan. (2015). *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Yakub. (2012). *Pengantar Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Yesnita, M. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Penerapan

Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Bukittinggi). *Kom Fekon*, 3(1).

- Yesnita, M. (2016). Pengaruh Tekanan Eksternal, Komitmen Manajemen, dan Sistem pengendalian internal pemerintah Pemerintah terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan Daerah (Studi Empiris pada Pemerintahan Kota Bukittinggi). *Jom Fekon*, 3(1).
- Yosa. (2010). *Pengertian Pengawasan*. [www.Itjenkemdagri.Go.Id](http://www.Itjenkemdagri.Go.Id). Retrieved 22, 2021, from [www.Itjenkemdagri.Go.Id](http://www.Itjenkemdagri.Go.Id)
- Yuanida, M. (2010). *Implementasi Good Governance Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah*. Bandung: Universitas Widyatama.
- Yuliani, N. L. (2014). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Penerapan Anggaran Berbasis Kinerja Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *JURNAL MANAJEMEN & BISNIS*, 5(2), 129-157.
- Yusup, M. (2016). Pengaruh Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship*, 10(2), 149-160.
- Zein, M., & Supriono, Y. M. (2016). Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Siak Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Variabel Moderating. *JOM FEKOM*, 3(1), 1550-1565.
- Zurnali, C. (2010). *Learning Organization, Competency, Organizational Commitment, And Customer Orientation*. Bandung: Unpad Press.
- Zurnali, C. (2010). *Learning Organization, Competency, Organizational Commitment, And Customer Orientation: Knowledge Worker-KerangkaRisetManajemenSumberDayaManusiaMasaDepan*. Bandung: UNPAD Press.



## LAMPIRAN

### Data Variabel Bebas (X)

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.10	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6	
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	
1	1	1	1	2	1	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
2	2	1	2	2	1	1	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1
1	1	1	1	2	1	2	1	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	2	2	2	2	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1
2	2	2	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	2	1	1
2	2	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1
2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2
1	1	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	2	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2	1
4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	1	1	2	2	1	2
5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	2	2	1	1	1	2
5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	2	1	1	1	1	2
4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	2	2	2	1	1	1
5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	2	2	2
4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	2	2	1	1	1	1
4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1
4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	4	4	2	1	1	1	1	2
4	4	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	1	1	1	1	1	1

X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.10	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	4	4	2	2	2	2	1	1	1	1	5	5	5	4	4	4
4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	4	4	4	4	1	1	2	1	2	1	1	1	4	5	5	5	5	5
5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	5	5	4	4	2	2	1	2	2	1	1	1	5	5	5	5	5	4
5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	2	2	1	2	1	2	2	2	5	5	5	5	5	5
5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	2	2	2	2	2	1	1	1	4	4	5	5	5	4
4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	1	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	4	4
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	2	2	2	1	1	1	1	1	5	5	5	4	4	4
5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	1	1	1	1	2	2	2	2	4	4	4	5	5	5
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	2	2	2	1	1	1	1	1	4	4	4	4	4	4
5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	1	1	1	2	2	1	1	1	5	5	5	4	4	4
4	4	5	5	5	5	5	5	1	1	1	2	2	1	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5
5	5	5	4	4	5	5	5	1	1	1	1	1	1	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4
5	5	4	4	4	4	5	5	1	1	1	1	2	2	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5
4	4	4	4	5	5	4	4	2	2	2	2	1	1	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5
4	4	4	4	4	4	5	5	1	1	2	2	1	1	4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	4	4
5	4	4	5	5	5	5	5	1	1	1	2	2	1	5	5	5	4	4	4	4	5	4	4	4	5	5	5
4	4	4	4	4	5	5	5	1	1	1	1	1	1	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5
5	5	4	4	4	5	5	5	2	2	1	1	1	1	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4
4	4	5	5	5	4	4	4	1	1	1	1	1	1	4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4
5	5	5	5	4	4	4	4	1	1	2	2	1	1	5	5	4	4	4	5	5	4	5	5	5	5	4	4
1	1	1	2	2	2	1	1	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	4	4
1	1	2	2	2	1	1	1	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3
1	1	1	1	2	2	2	2	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	3	3	3	3	4	4
2	1	1	1	1	1	1	1	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	3	3	3



X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	X1.6	X1.7	X1.8	X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	X2.6	X3.1	X3.2	X3.3	X3.4	X3.5	X3.6	X3.7	X3.10	X4.1	X4.2	X4.3	X4.4	X4.5	X4.6
4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5
4	4	5	4	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	4	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	5	5
3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	3	4	4	4	4	3	3	3	3	3
4	4	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	4	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3
3	3	3	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	3	3	3	4	3	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4
3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	3	3	4
3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	3	3
3	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	4	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	3	3	4	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	4	4	4	4	3	3	4	4	4
3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3
3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	3	3	2	2	1	2	2	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1
3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2	2	2	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	3	3	2	2	2	3	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	3	3	3	3	3	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1	1
3	3	3	2	2	2	2	2	2	2	1	1	1	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2	1	1	2	2	1

## Datavariabel Intervening (Z) dan Variabel Terikat (Y)

Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.10	Y1	Y3	Y5	Y7	Y9	Y11	Y13	Y15
1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2	2	2
1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	2	2	2	1	1
1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	1	1	2	2	2	1
2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1
2	2	2	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	2	2	2
2	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	1	1	1	1	2
2	2	1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	1	2	2
1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1
2	2	2	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	2	2
1	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	2	2	1	1	1
5	5	4	4	5	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	5	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
4	5	5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4
5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4
4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5
5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4
4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4
5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4
5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4
4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4
4	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5
5	5	5	4	4	5	5	4	5	5	5	4	4	4	5	5
5	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4
5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4
5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5
4	4	4	4	5	5	5	4	5	5	5	4	4	5	5	5
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	5
4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	5
4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5
5	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	4	4
5	5	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5
5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4

Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.10	Y1	Y3	Y5	Y7	Y9	Y11	Y13	Y15	
5	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	5	5	5	5	
5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	4	
4	4	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	
5	5	5	5	4	5	4	5	4	4	5	5	5	5	5	5	
4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	5	5	5	
5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	
4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	
4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	4	4	5	
4	4	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	
5	5	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	
4	4	4	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	4	5	
5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	5	5
5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	
4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	
4	4	5	5	5	5	4	5	4	4	4	5	5	5	4	4	
4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	4	4	4	5	5	5	
4	4	4	4	5	5	5	5	4	5	5	5	5	4	4	4	
5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	4	
4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	5	5	
5	5	5	5	5	4	4	4	5	5	4	4	4	4	5	5	
5	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	
4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	4	4	4	4	4	4	
5	5	5	5	4	4	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	
4	4	4	5	5	5	4	4	5	5	4	4	4	4	4	4	
4	4	5	5	5	5	4	4	5	5	5	5	5	4	5	5	
5	5	5	5	5	5	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	
4	4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	4	5	5	5	
4	4	4	4	4	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	
5	5	5	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	
5	5	4	4	5	5	5	5	4	4	4	5	5	5	5	5	
5	5	4	4	5	5	5	4	3	3	3	3	3	3	4	3	
4	4	4	5	5	5	4	4	4	3	3	3	3	3	4	4	
5	5	5	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	4	4	
4	4	5	5	5	4	4	5	3	3	3	3	3	4	4	4	
4	4	5	5	5	5	4	4	4	4	3	3	3	4	4	4	
4	4	5	5	5	5	4	4	3	3	3	4	4	3	3	3	
5	5	5	5	5	5	5	4	3	3	4	4	4	3	3	3	
5	5	4	4	4	4	5	5	3	3	3	3	4	4	3	3	
5	5	5	5	5	5	5	5	4	4	3	3	3	3	3	3	
4	4	4	4	4	5	5	5	3	3	2	2	3	3	3	3	

Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	Z.6	Z.7	Z.10	Y1	Y3	Y5	Y7	Y9	Y11	Y13	Y15
5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	3	3	3	3	2
5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	2	2	2	3	3	3
5	5	5	5	5	5	5	5	3	3	3	2	2	2	2	2
4	4	4	4	5	5	5	5	3	3	3	3	3	2	3	3

### Deskripsi Data Karakteristik Responden

#### USIA

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG DARI 21 TAHUN	8	9.3	9.3	9.3
	21 TAHUN S/D 30 TAHUN	78	90.7	90.7	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

#### JENIS KELAMIN

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	LAKI-LAKI	50	58.1	58.1	58.1
	PEREMPUAN	36	41.9	41.9	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

#### PENDIDIKAN TERAHIR

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SLTA SEDERAJAT	30	34.9	34.9	34.9
	S-1	56	65.1	65.1	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**MASA KERJA**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	KURANG DARI LIMA TAHUN	68	79.1	79.1	79.1
	6 TAHUN S/D 10 TAHUN	18	20.9	20.9	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

Deskripsi Data Kriteria Jawaban Responden

**Frequency Table****Frequency Table****X1.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	14	16.3	16.3	16.3
	3	22	25.6	25.6	41.9
	4	31	36.0	36.0	77.9
	5	19	22.1	22.1	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X1.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	15	17.4	17.4	17.4
	3	21	24.4	24.4	41.9
	4	31	36.0	36.0	77.9
	5	19	22.1	22.1	100.0
	Total	86	100.0	100.0	



**X1.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.2	1.2	1.2
	2	16	18.6	18.6	19.8
	3	18	20.9	20.9	40.7
	4	28	32.6	32.6	73.3
	5	23	26.7	26.7	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X1.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.2	1.2	1.2
	2	19	22.1	22.1	23.3
	3	18	20.9	20.9	44.2
	4	22	25.6	25.6	69.8
	5	26	30.2	30.2	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X1.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.2	1.2	1.2
	2	19	22.1	22.1	23.3
	3	15	17.4	17.4	40.7
	4	29	33.7	33.7	74.4
	5	22	25.6	25.6	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X1.6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.2	1.2	1.2
	2	19	22.1	22.1	23.3
	3	18	20.9	20.9	44.2
	4	12	14.0	14.0	58.1
	5	36	41.9	41.9	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X1.7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	1	1.2	1.2	1.2
	2	18	20.9	20.9	22.1
	3	17	19.8	19.8	41.9
	4	18	20.9	20.9	62.8
	5	32	37.2	37.2	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X1.8**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	2	15	17.4	17.4	17.4
	3	24	27.9	27.9	45.3
	4	18	20.9	20.9	66.3
	5	29	33.7	33.7	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X2.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	12	14.0	14.0	14.0
	2	39	45.3	45.3	59.3
	3	19	22.1	22.1	81.4
	4	7	8.1	8.1	89.5
	5	9	10.5	10.5	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X2.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	13	15.1	15.1	15.1
	2	39	45.3	45.3	60.5
	3	18	20.9	20.9	81.4
	4	6	7.0	7.0	88.4
	5	10	11.6	11.6	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X2.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	15	17.4	17.4	17.4
	2	40	46.5	46.5	64.0
	3	15	17.4	17.4	81.4
	4	4	4.7	4.7	86.0
	5	12	14.0	14.0	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X2.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	11	12.8	12.8	12.8
	2	40	46.5	46.5	59.3
	3	19	22.1	22.1	81.4
	4	6	7.0	7.0	88.4
	5	10	11.6	11.6	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X2.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	10	11.6	11.6	11.6
	2	37	43.0	43.0	54.7
	3	23	26.7	26.7	81.4
	4	5	5.8	5.8	87.2
	5	11	12.8	12.8	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X2.6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	17	19.8	19.8	19.8
	2	32	37.2	37.2	57.0
	3	21	24.4	24.4	81.4
	4	3	3.5	3.5	84.9
	5	13	15.1	15.1	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X3.1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	18	20.9	20.9	20.9
	2	31	36.0	36.0	57.0
	3	7	8.1	8.1	65.1
	4	14	16.3	16.3	81.4
	5	16	18.6	18.6	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X3.2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	19	22.1	22.1	22.1
	2	30	34.9	34.9	57.0
	3	7	8.1	8.1	65.1
	4	15	17.4	17.4	82.6
	5	15	17.4	17.4	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X3.3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	20	23.3	23.3	23.3
	2	27	31.4	31.4	54.7
	3	9	10.5	10.5	65.1
	4	18	20.9	20.9	86.0
	5	12	14.0	14.0	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X3.4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	22	25.6	25.6	25.6
	2	23	26.7	26.7	52.3
	3	11	12.8	12.8	65.1
	4	23	26.7	26.7	91.9
	5	7	8.1	8.1	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X3.5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	20	23.3	23.3	23.3
	2	24	27.9	27.9	51.2
	3	12	14.0	14.0	65.1
	4	18	20.9	20.9	86.0
	5	12	14.0	14.0	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X3.6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	24	27.9	27.9	27.9
	2	20	23.3	23.3	51.2
	3	12	14.0	14.0	65.1
	4	13	15.1	15.1	80.2
	5	17	19.8	19.8	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X3.7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	22	25.6	25.6	25.6
	2	22	25.6	25.6	51.2
	3	12	14.0	14.0	65.1
	4	7	8.1	8.1	73.3
	5	23	26.7	26.7	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**X3.10**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	21	24.4	24.4	24.4
	2	23	26.7	26.7	51.2
	3	12	14.0	14.0	65.1
	4	7	8.1	8.1	73.3
	5	23	26.7	26.7	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**Z1**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	18	20.9	20.9	20.9
	4	41	47.7	47.7	68.6
	5	27	31.4	31.4	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**Z2**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	19	22.1	22.1	22.1
	4	40	46.5	46.5	68.6
	5	27	31.4	31.4	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**Z3**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	20	23.3	23.3	23.3
	4	38	44.2	44.2	67.4
	5	28	32.6	32.6	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**Z4**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	23	26.7	26.7	26.7
	4	31	36.0	36.0	62.8
	5	32	37.2	37.2	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**Z5**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	23	26.7	26.7	26.7
	4	35	40.7	40.7	67.4
	5	28	32.6	32.6	100.0
	Total	86	100.0	100.0	



**Z6**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	23	26.7	26.7	26.7
	4	32	37.2	37.2	64.0
	5	31	36.0	36.0	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**Z7**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	24	27.9	27.9	27.9
	4	37	43.0	43.0	70.9
	5	25	29.1	29.1	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**Z10**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	3	24	27.9	27.9	27.9
	4	32	37.2	37.2	65.1
	5	30	34.9	34.9	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

Y1

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	10	11.6	11.6	11.6
	2	2	2.3	2.3	14.0
	4	33	38.4	38.4	52.3
	5	41	47.7	47.7	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

Y3

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	10	11.6	11.6	11.6
	2	2	2.3	2.3	14.0
	4	32	37.2	37.2	51.2
	5	42	48.8	48.8	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

Y5

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	9	10.5	10.5	10.5
	2	3	3.5	3.5	14.0
	4	33	38.4	38.4	52.3
	5	41	47.7	47.7	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

Y7

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	7.0	7.0	7.0
	2	6	7.0	7.0	14.0
	4	30	34.9	34.9	48.8
	5	44	51.2	51.2	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

Y9

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	7.0	7.0	7.0
	2	6	7.0	7.0	14.0
	4	30	34.9	34.9	48.8
	5	44	51.2	51.2	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

Y11

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	6	7.0	7.0	7.0
	2	6	7.0	7.0	14.0
	4	35	40.7	40.7	54.7
	5	39	45.3	45.3	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**Y13**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	8	9.3	9.3	9.3
	2	4	4.7	4.7	14.0
	4	31	36.0	36.0	50.0
	5	43	50.0	50.0	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

**Y15**

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	1	7	8.1	8.1	8.1
	2	5	5.8	5.8	14.0
	4	29	33.7	33.7	47.7
	5	45	52.3	52.3	100.0
	Total	86	100.0	100.0	

## Analisis Data Outer Model

***Construct Validity and Reliability***

	Cronbach's Alpha	rho_A	Reliabilitas Komposit	Rata-rata Varians Diekstrak (AVE)
X1	0,982	0,982	0,984	0,885
X2	0,979	0,981	0,983	0,905
X3	0,986	0,986	0,988	0,911
X4	0,982	0,983	0,985	0,718
Y	0,976	0,976	0,979	0,855
Z	0,974	0,974	0,978	0,847

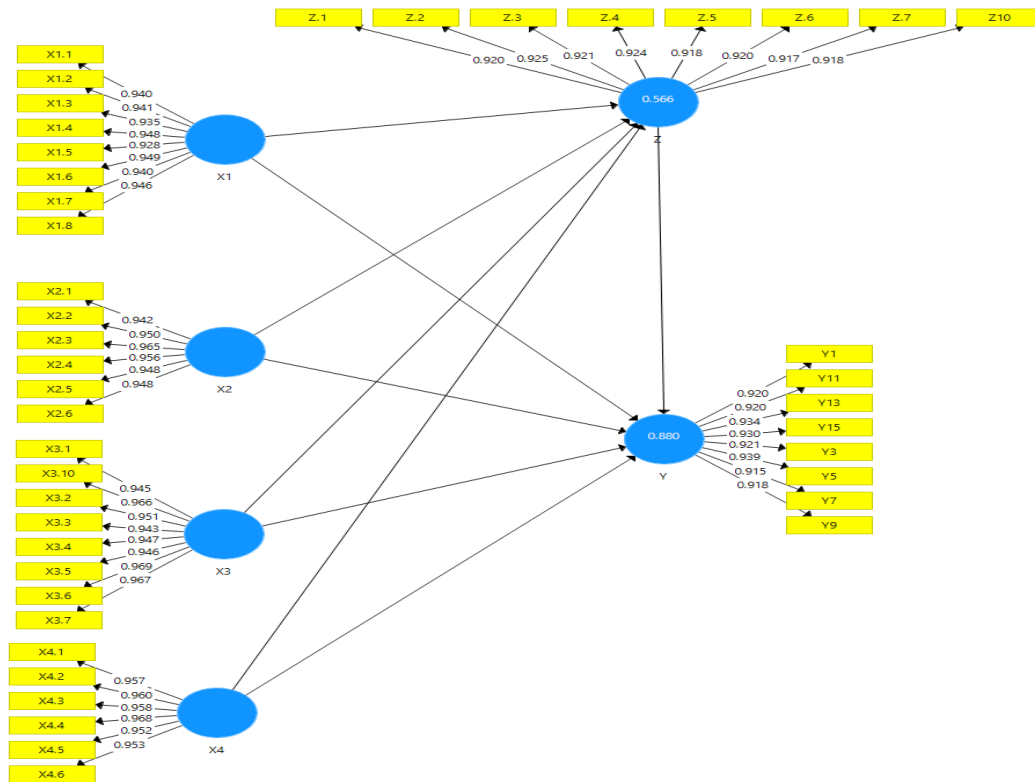
**Heroit-Monotrait Ratio (HTMT)**

	X1	X2	X3	X4	Y	Z
X1						
X2	0.199					
X3	0.289	0.374				
X4	0.506	0.280	0.325			
Y	0.670	0.620	0.663	0.671		
Z	0.588	0.512	0.520	0.518	0.839	

Analisis Inner Model

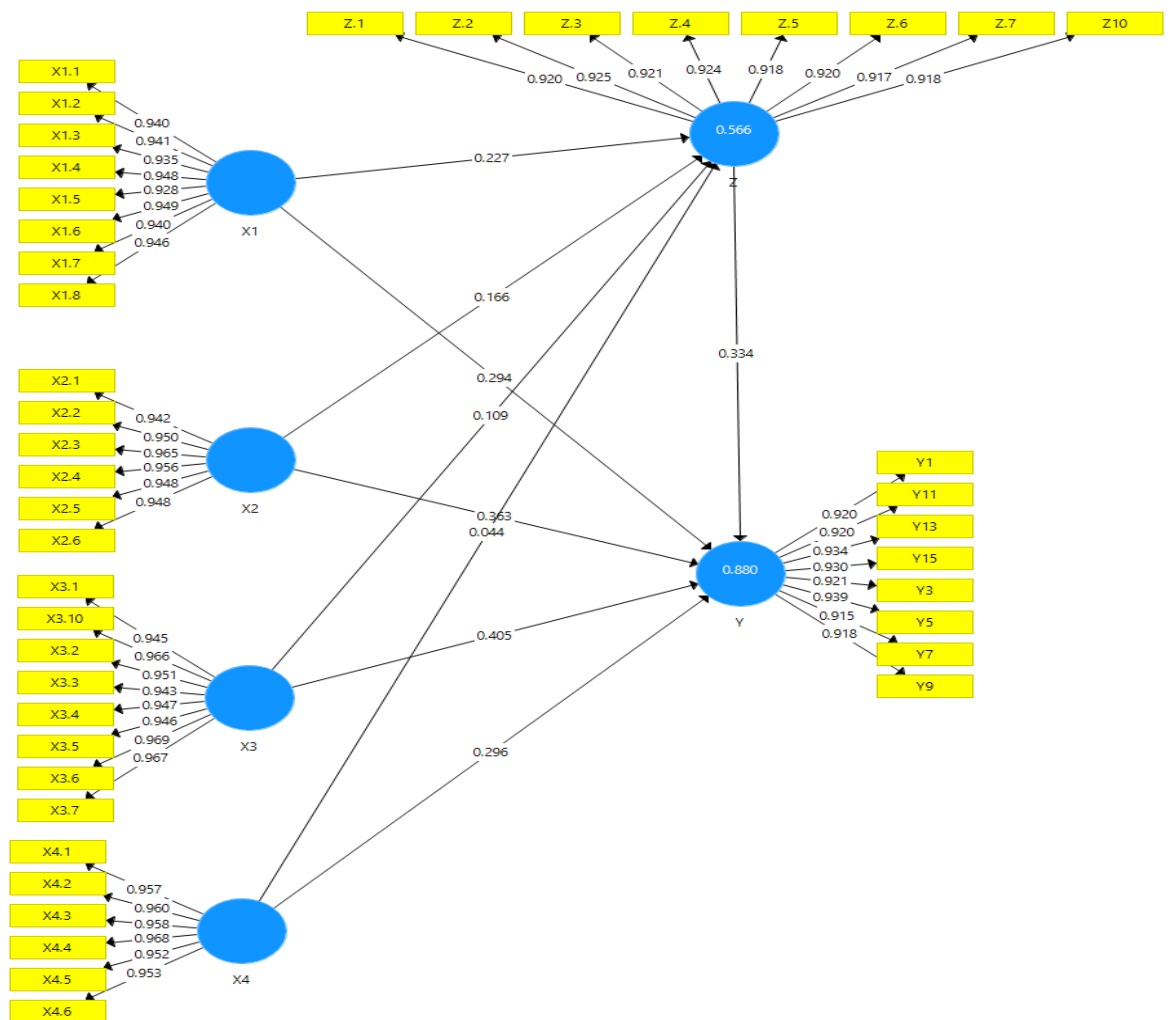
**Koefisien Determinasi (R-Square)**

	R-Square	Adjust R-Square
Y	0.880	0.872
Z	0,566	0,545



### F-Square

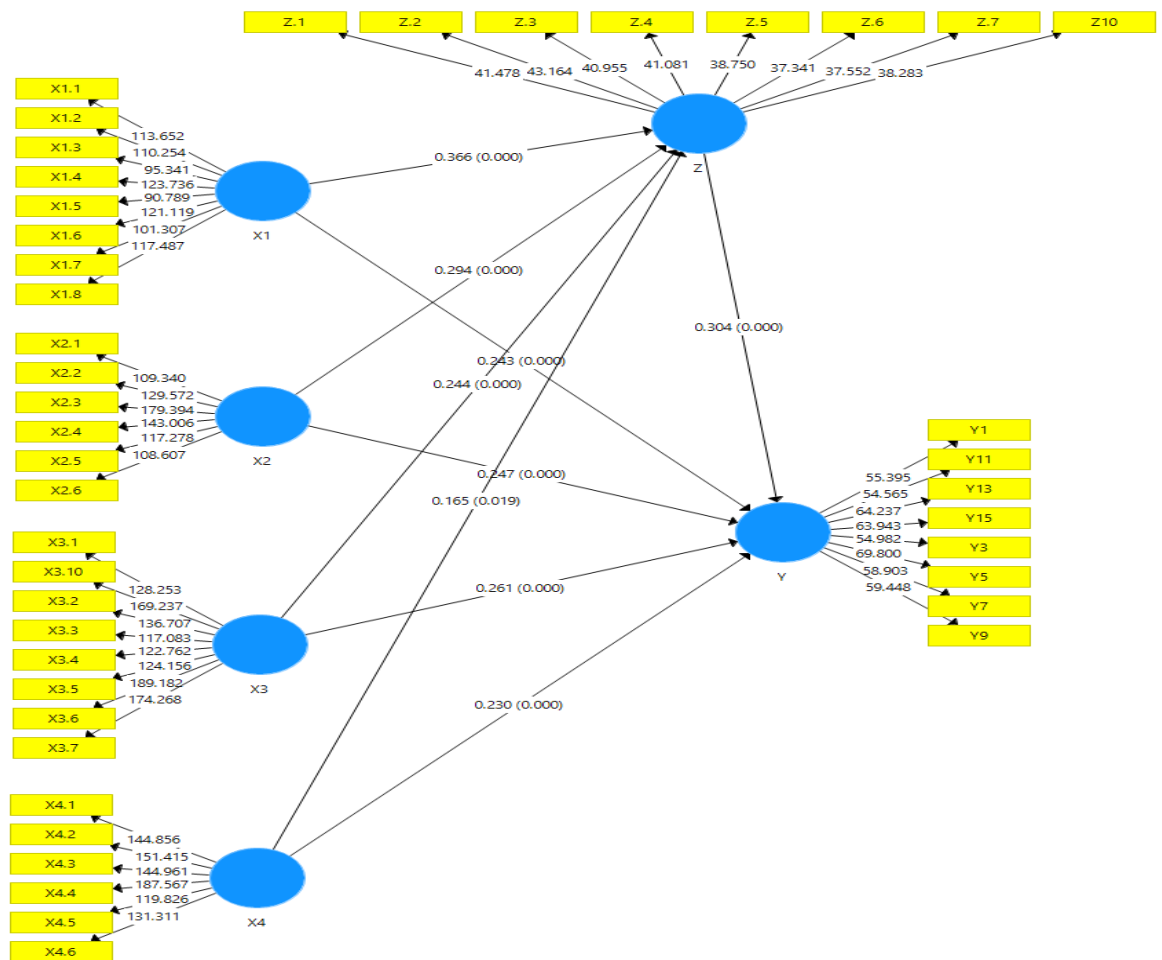
	X1	X2	X3	X4	Y	Z
X1					0.294	0.227
X2					0.363	0.166
X3					0.405	0.109
X4					0.296	0.044
Y						
Z					0.334	



### Pengaruh Langsung

	<i>Ordinal Sampel</i>	<i>Sampel Mean</i>	<i>Standart Deviasi</i>	<i>T Statistik</i>	<i>P Values</i>
X1 → Y	0,234	0.242	0.051	4,818	0.000
X1 → Z	0,366	0.371	0.050	7,379	0,000
X2 → Y	0,247	0.245	0.040	6,125	0.000
X2 → Z	0,294	0,296	0,050	5.825	0,000
X3 → Y	0,261	0,262	0,042	6.241	0,000
X3 → Z	0,244	0,242	0,060	4.066	0,000
X4 → Y	0,230	0,231	0,040	5.691	0,000
X4 → Z	0,165	0,159	0,070	2.352	0,019
Z → Y	0,304	0,302	0,050	6.089	0,000

Sumber :SmartPLS



**Pengaruh Tidak Langsung**

	<i>Ordinal Sampel</i>	<i>Sampel Mean</i>	<i>Standart Deviasi</i>	<i>T Statistik</i>	<i>P Values</i>
X1 → Z → Y	0,111	0.112	0.022	5,172	0.000
X2 → Z → Y	0,089	0.090	0.025	3,638	0,000
X3 → Z → Y	0,074	0.074	0.026	2,845	0.004
X4 → Z → Y	0,050	0.049	0.025	2,033	0,042

Sumber :SmartPLS

**Pengaruh total (*Total Effect*)**

	<i>Ordinal Sampel</i>	<i>Sampel Mean</i>	<i>Standart Deviasi</i>	<i>T Statistik</i>	<i>P Values</i>
X1 → Y	0,355	0.354	0.047	7,614	0.000
X1 → Z	0,366	0.371	0.050	7,379	0.000
X2 → Y	0,336	0.335	0.040	8,361	0.000
X2 → Z	0,294	0.296	0.050	5,825	0.000
X3 → Y	0,335	0.336	0.041	8,188	0.000
X3 → Z	0,244	0.242	0.060	4,066	0.000
X4 → Y	0,281	0.280	0.039	7,275	0.000
X4 → Z	0,165	0.159	0.070	2,352	0.019
Z → Y	0,305	0.302	0.050	6,089	0.000



**KUESIONER PENELITIAN**

No. : \_\_\_\_

**KATA PENGANTAR**

Kepada Yth. :

**Bapak/Ibu**

**1. Kepala Dinas PMD Kabupaten Langkat**

**2. Kepala Apartur Pemerintah Desa Kabupaten Langkat**

di-

**Tempat.**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan pengumpulan data yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan Tesis Program Pascasarjana Magister Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara di bawah bimbingan Ibu Dr. Maya Sari., Ak., M.Si dan Ibu Dr. Widia Astuty, S.E., M.Si., QIA., Ak., CA.CPA dengan judul penelitian: **Determinan Kualitas Pelaporan Keuangan Desa Dan Implikasinya Terhadap Good Governance (Studi Pada Desa Di Kabupaten Langkat)** , dengan ini saya mohon kesediaan Bapak/Ibu agar berkenan meluangkan waktu untuk menjawab pertanyaan dalam kuesioner terlampir.

Atas bantuan serta kerjasama yang diberikan oleh Bapak dan Ibu untuk pengisian kuesioner ini, saya ucapkan banyak terima kasih.

**Hormat Saya,**

**RIZKY RIDHANI SIRAIT**

### IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama : \_\_\_\_\_ (boleh tidak diisi)
2. Usia : \_\_\_\_\_
3. Jenis Kelamin :  Pria  Wanita
4. Pendidikan Terakhir :  S-1  S-2  S-3
5. Masa Kerja :  < 5 Thn  5-10 Thn  10-15 Thn  >15 Thn
6. Jabatan saat ini : \_\_\_\_\_
7. Lama menjabat : 1. Kurang dari 6 tahun;  2. 6-10 tahun;  
3. 11-20 tahun;  4. Lebih dari 20 tahun
- \_\_\_\_\_

---

#### PETUNJUK PENGISIAN :

1. Pengisian kuesioner ini semata-mata untuk tujuan ilmiah dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang akuntansi, oleh sebab itu semua pilihan jawaban dan pendapat yang Bapak/Ibu berikan akan menjadi kerahasiaan oleh peneliti.
2. Bapak/Ibu dapat memilih salah satu jawaban yang paling sesuai dengan kondisi lingkungan Bapak/Ibu dengan cara memberikan tanda silang (X) pada kolom jawaban yang telah disediakan. Setiap pernyataan diberikan 5 (lima) buah alternatif jawaban, dengan kriteria sebagai berikut :
 

- SM : Sangat Memadai	- SS : Sangat Setuju
- M : Memadai	- S : Setuju
- CM : Cukup Memadai	- CS : Cukup Setuju
- KM : Kurang Memadai	- KS : Kurang Setuju
- TM : Tidak Memadai	- TS : Tidak Setuju
- SB : Sangat Baik	
- B : Baik	
- CB : Cukup Baik	
- KB : Kurang Baik	
- TB : Tidak Baik	
3. Apabila terjadi kesalahan dalam pengisian jawaban dan akan melakukan perubahan jawaban, maka dapat mencoret dengan garis dua (==) pada jawaban semula dan memberi tanda silang (X) pada jawaban yang baru.

### KUESIONER PENELITIAN

Variabel	No	Good Governance Pernyataan	Kategori				
			SS	S	CS	TS	STS
Partisipasi Masyarakat	1	Masyarakat telah terlibat dalam penerapan Good Governance di lingkungan Pemerintahan Desa					
	2	Masyarakat dapat memberikan kontribusi, kritik, dan saran terhadap kegiatan Pemerintah Desa					
Penerapan Hukum	1	Pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa diatur dalam Peraturan dan Undang-Undang					
	2	Kegiatan Pemerintahan Desa dilaksanakan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang					
Transparansi	1	Masyarakat luas dapat mengetahui dan mengakses kegiatan-kegiatan pemerintah Desa					
	2	Kegiatan Pemerintahan Desa dilaksanakan tanpa adanya unsur-unsur kerahasiaan					
Daya tanggap	1	pemerintahan Desa dapat menyelesaikan permasalahan di lingkungan Desa					
	2	Kegiatan pemerintahan dilakukan dengan penuh inovasi dan pengembangan					
Berorientasi konsensus	1	Setiap kegiatan yang dilakukan didasari dengan musyawarah					
	2	Kegiatan pemerintahan desa dilakukan sesuai dengan hasil kesepakatan atau musyawarah					
Keadilan	1	Mayarakat desa memiliki hak dan kewajiban yang sama atas segala bentuk kegiatan pemerintahan					
	2	Setiap kegiatan pemerintahan yang dilakukan tidak memihak terhadap unsur-unsur tertentu					
efektifitas dan efisiensi	1	Pelaksanaan dan penyelesaian dilakukan tepat waktu dan penggunaan sumber daya yang baik					
	2	Hasil kegiatan pemerintahan desa sesuai dengan tujuan yang ditetapkan					
Visi Misi Strategis	1	Kegiatan pemerintahan didasari dengan penetapan visi dan misi yang baik					
	2	Visi dan misi yang di tetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat					

<b>Variabel</b>		<b>Kualitas Laporan Keuangan</b>	<b>Kategori</b>				
<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>CS</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
Relevan	1	Laporan keuangan memberikan informasi secara lengkap yang berguna untuk pengambilan keputusan					
	2	Hasil laporan keuangan menyediakan informasi yang dapat digunakan sebagai dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya					
Andal	1	Laporan keuangan menyajikan informasi keuangan dengan tepat					
	2	Pencatatan transaksi keuangan disertai bukti transaksi yang dapat diverifikasi					
Lengkap	1	Laporan keuangan yang dihasilkan menyajikan informasi sesuai dengan kebutuhan					
	2	laporan keuangan yang dihasilkan tidak menghilangkan aspek-aspek penting					
Dapat dipahami	1	Hasil Laporan keuangan dapat dipelajari					
	2	Laporan keuangan memberikan hasil yang dapat dipahami					
Dapat di akses	1	Hasil laporan keuangan dapat diakses oleh pengguna sistem dengan mudah					
	2	Pengguna informasi keuangan memiliki privasi tersendiri terhadap sistem informasi					

<b>Variabel</b>		<b>Sumber Daya Manusia</b>	<b>Kategori</b>				
<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>CS</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
Pengetahuan dan pemahaman	1	Pemerintahan desa telah menggunakan sumberdaya manusia yang memiliki pengetahuan dan pemahaman dalam aspek-aspek kegiatan pemerintahan desa					
	2	Adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan pengetahuan dan pemahaman sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa					
Kemampuan	1	Sumber daya manusia di lingkungan pemerintahan desa diberikan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kemampuan yang dimiliki					
	2	Adanya kegiatan pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kemampuan sumberdaya manusia					
Nilai dan sikap	1	Sumber daya manusia memiliki nilai dan sikap yang baik di lingkungan pemerintahan					
	2	Adanya sanksi sosial yang diterima apabila melanggar nilai dan melakukan sikap yang tidak etis di lingkungan pemerintahan					
Minat	1	Sumber daya manusia yang digunakan pemerintahan desa memiliki minat sesuai dengan kebutuhan pemerintahan					
	2	Dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan tidak dilakukan secara unsur keterpaksaan					

<b>Variabel</b>		<b>Teknologi Informasi</b>	<b>Kategori</b>				
<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>CS</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
Bermanfaat	1	Pemerintahan desa menggunakan teknologi informasi yang bermanfaat					
	2	Teknologi informasi yang digunakan pemerintahan desa memberikan dampak yang baik					
Produktifitas	1	Teknologi informasi yang digunakan mampu memberikan hasil sesuai dengan kebutuhan					
	2	Dengan penggunaan teknologi informasi, kegiatan pemerintahan berjalan dengan efektif dan efisien					
Pengembangan	1	Penggunaan teknologi informasi mendukung sistem pemerintahan dalam melakukan pengembangan kegiatan					
	2	Teknologi informasi yang digunakan membantu penyelesaian permasalahan pemerintahan desa					

<b>Variabel</b>		<b>Sistem Pengendalian Intern</b>	<b>Kategori</b>				
<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>CS</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
Lingkungan Pengendalian	1	Pemerintah Desa telah memiliki kode etik yang komprehensif					
	2	Pemerintah Daerah memiliki deskripsi pekerjaan yang jelas mengenai suatu pekerjaan tertentu					
Penilaian Resiko	1	Identifikasi risiko sudah ditetapkan dalam bentuk dokumen					
	2	Kinerja ditetapkan berbasis manajemen risiko					
Kegiatan pengendalian	1	Ada mekanisme untuk mereview kinerja					
	2	Pencatatan dan dokumentasi dilakukan secara lengkap dan akurat dan memungkinkan dilakukannya penelusuran					
Informasi dan Komunikasi	1	Terdapat mekanisme penyediaan informasi yang memadai					
	2	Terdapat saluran komunikasi bagi setiap orang untuk melaporkan adanya penyimpangan					
Pemantauan	1	Adanya unit kerja yang melakukan pemantauan atas pelaksanaan seluruh kegiatan					
	2	Terdapat bukti telah dilakukannya fungsi pengendalian seperti review penyerapan anggaran dan tindak lanjut hasil pemeriksaan					

<b>Variabel</b>		<b>Komitmen Organisasi</b>	<b>Kategori</b>				
<b>Indikator</b>	<b>No</b>	<b>Pernyataan</b>	<b>SS</b>	<b>S</b>	<b>CS</b>	<b>TS</b>	<b>STS</b>
Komitmen Afektif	1	Keinginan untuk tetap menjadi anggota organisasi					
	2	Merasa memiliki keterlibatan dalam mencapai tujuan perusahaan					
Komitmen kontinew	1	Ada perasaan bersalah meninggalkan perusahaan					
	2	Tetap bertahan merupakan kewajiban					
Komitmen Normatif	1	Mendapatkan keuntungan apabila bertahan					
	2	Bertahan dalam perusahaan merupakan kebutuhan					